

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 31
Juli 2021



PENTAHELIX

HADAPI COVID-19

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.
9, Jakarta Pusat

Rapat di Hari Ahad

Tak ada hari libur bagi Menteri Johnny G Plate. Selama pandemi Covid-19 melanda negeri ini, waktu kerja bisa mencapai 24/7, 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Begitu pula yang terjadi pada Minggu, 18 Juli 2021. Di hari itu, Menteri Komunikasi dan Informatika kita mengadakan pertemuan virtual dengan para pimpinan platform media sosial di Indonesia. Buat apa rapat di hari Ahad? Ternyata rapat daring tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali tanggung jawab platform dalam penanganan hoaks di masa pandemi Covid-19 ini.

Dari siaran pers kita ketahui bahwa Menteri Johnny menginstruksikan agar pengelola platform media sosial dapat secara lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait Covid-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi.

“Saya menyesalkan banjir informasi yang tidak tepat dan sangat memengaruhi laju pemulihan pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoaks, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan,” tegas Menteri Johnny.

Ketiga hal ini perlu dilakukan secara serius, tidak main-main, dan tidak bisa lagi dengan cara sehari-hari. “Penyebaran berita bohong sangat memengaruhi pemikiran manusia, yang menjadi taruhan adalah nyawa saudara-saudari kita sebangsa Indonesia. Sudah banyak yang jadi korban dari penyebaran infodemi yang kian masif ini, kita tidak boleh menyerah kalah,” tambah Menteri Johnny.

Selain menangani soal hoaks, peran dan kedudukan Kementerian Kominfo juga dituntut dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Kementerian Kominfo harus mampu menyampaikan berita atau informasi seputar vaksin yang akurat dan terpercaya. Selain itu juga menjaga dari kemungkinan berbagai berita hoaks atau bohong yang dapat merugikan masyarakat, serta mengganggu target vaksinasi nasional. Dalam hal pemerintah berkomitmen memastikan, informasi terkait kedatangan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus disampaikan kepada masyarakat secara akurat, kredibel, dan proaktif. Waktu pengiriman, jumlah vaksin, hingga masa tiba di tanah air, semuanya disampaikan Kementerian Kominfo secara realtime dan terus menerus ke publik.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Kementerian Kominfo menyediakan media center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

(KPCPEN), yang bekerjasama dengan Forum Media Barat 9 (FMB9) Kementerian Kominfo untuk hadir sebagai salah satu platform yang memberikan informasi terkait penanganan Covid-19, vaksin dan vaksinasi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional. Keberadaan berita atau informasi yang akurat terkait perkembangan terbaru vaksin maupun vaksinasi Covid-19, akan menjadi rujukan bagi semua dalam upaya mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi Covid-19 di seluruh penjuru negeri. Informasi perkembangan terbaru terkait vaksin maupun vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menjadi acuan kita semua dalam mendukung, mengawal, dan mendorong suksesnya vaksinasi Covid-19 di seluruh penjuru negeri kita.

Kita menyadari begitu pentingnya program vaksinasi ini. Vaksinasi akan menjadi sarana mencapai *herd immunity* bangsa ini agar kuat terhadap paparan virus Covid-19. Vaksinasi ini juga merupakan game changer yang diharapkan dapat mengubah kondisi krisis ekonomi dan kesehatan yang selama pandemi ini kita alami. Maka, dengan adanya informasi yang akurat mengenai manfaat vaksinasi, diharapkan menjadi momentum yang dapat memberikan daya dorong bagi bangsa Indonesia untuk melewati pandemi Covid-19 ini. Karena itu, Menteri Johnny dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa penting bagi kita sebagai bangsa membangun bersama optimisme dalam memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan bangkit dari keterpurukan.

Meski telah dijalankan program vaksinasi, upaya pengendalian Covid-19 ini masih belum cukup. Upaya-upaya tersebut harus disertai dengan langkah-langkah pengendalian yang efektif, seperti tetap konsisten melakukan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) yang dilakukan oleh pemerintah pada satu sisi dan di sisi yang lain memperkuat secara disiplin protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Majalah Kominfo Next Edisi Juli 2021 ini secara khusus mengangkat topik penanganan Covid-19 melalui beragam kebijakan, termasuk di sektor komunikasi dan informatika.

Selamat membaca!

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

• @FSetu • @FSetu • FSetu TV •

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

4 Rak Buku

10 Teknologi & Gadget

14 KominfoPedia

18 Kabar Istana

16 Menkominfo Bicara

32 Liputan Utama

50 Gagasan

58 Aksi Pemerintah

78 Serba-Serbi Covid-19

88 Kominfo Daerah

108 Foto Esai

114 Tanya Pakar

118 Jasa Beliau

122 OpiNext

124 Kominfo Talk

136 Liputan Khusus

152 Top 10 Hoaks

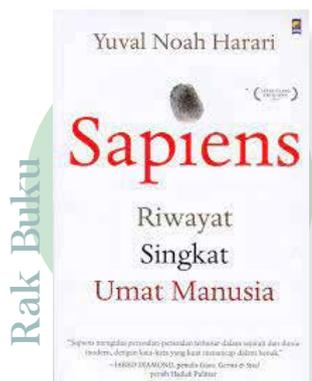


Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



Penulis :
Yuval Noah Harari

Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia

Selama dua setengah juta tahun, berbagai spesies manusia hidup dan punah di Bumi, sampai akhirnya tersisa satu, Homo Sapiens, Manusia Bijaksana, sejak seratus ribu tahun lalu. Bagaimana spesies ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan beranak pinak hingga berjumlah 7 miliar, dan kini menjadi kekuatan alam yang dapat mengubah kondisi planet. Apa penyebabnya?

Sapiens membahas sisi yang tak banyak diungkit buku sejarah atau evolusi manusia lain: Bagaimana manusia berangkat dari sekedar satu spesies hewan menjadi makhluk berperadaban, melalui tiga evolusi -- kognitif, pertanian, dan sains.

Rak Buku



Penulis :
Alex Singleton

The Pr Masterclass Pandai Menyusun Strategi Humas Yang Tepat Sasaran

Buku ini mengungkap rahasia humas yang efektif dan menunjukkan cara menyusun strategi promosi yang memberikan hasil terbaik bagi produk, bisnis, atau kegiatan Anda. Dalam buku ini, Anda akan menemukan cara menyusun materi promosi yang efektif - dengan anggaran berapapun. Buku ini ditujukan bagi praktisi humas, juga pemilik usaha kecil, maupun pebisnis yang perlu menerapkan strategi humas yang tepat sasaran.



Penulis :
Darwanto

Bentangkan Layar, Terjang Ombak, & Tembus Badai

Menyambut Tahun Bahari 1996, KRI Arung Samudera berlayar mengelilingi dunia dengan misi memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Diawaki oleh 16 anggota TNI AL beserta 1 orang wartawan, kapal ini membelah lautan, menghadapi tantangan badai, dan membawa pulang piagam penghargaan yang membanggakan negara.

Bentangkan Layar, Terjang Ombak, Tembus Badai mengisahkan seluruh perjuangan KRI Arung Samudera secara detail, mulai berangkat dari Jakarta dan singgah di 17 negara dengan 27 kota pelabuhan. Perjalanan selama setahun lebih itu menorehkan kenangan dan pengalaman yang sangat bernilai, khususnya bagi Indonesia sebagai negara maritim.

Sumber Foto :

Unsplash



Surviving Covid-19:

Tetap Waras di Tengah Pandemi

Lida Noor Meitania,
Pranata Humas Ahli Muda

Subkoordinator Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial, Ditjen IKP

Buku berjudul “Surviving Covid-19: Tetap Waras di Tengah Pandemi” ini ditulis oleh Amanda Margia Wiranata, S.Psi, M.Psi., (Psikolog Klinis & Psikoterapis), dan Donna Widjajanto, S.Psi. Penulis memaparkan kondisi pembatasan akibat pandemi Covid-19 yang dialami seluruh dunia, dapat menyebabkan berbagai gejala psikologis seperti stres, gangguan kecemasan hingga depresi atau memicu fobia tertentu. Penulis juga membagikan berbagai tip sederhana untuk mengatasinya, termasuk cara efektif agar tetap bersemangat menjalani hidup penuh makna.

Awal pandemi Covid-19 sejak adanya temuan di Rumah Sakit Pusat Wuhan, RRT, akhir 2019. Pada bulan Januari 2020, virus penyebab penyakit ini menyebar sampai ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Jepang. Kemudian WHO baru menyebut virus ini Covid-19 (Corona Virus Disease-19) pada tanggal 11 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama Covid-19. Selanjutnya membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 sampai satu per satu wilayah mulai melakukan pembatasan mobilitas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. tenang ketika berhubungan dengan anda.

Minggu-minggu pertama Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB), bisa dibilang terjadi kekacauan ketika orang-orang harus tinggal di rumah. Hari-hari pertama *work from home* awalnya dipersepsikan sebagai bonus liburan yang menyenangkan. Namun, ternyata kita benar-benar memindahkan pekerjaan dari kantor dan pelajaran di sekolah ke rumah.

Bekerja dan belajar di rumah juga seolah menjadi kehilangan jadwalnya. Rapat di rumah bisa sampai larut malam tanpa uang lembur dengan pekerjaan yang bertumpuk, karena panik menghadapi resesi ekonomi yang membayangi kondisi pandemi. Sama dengan yang dialami anak sekolah. Guru memberikan banyak tugas, dengan tenggat pengumpulan tugas sampai malam hari. Tugas yang diberikan pun cukup merepotkan, seperti membuat video penampilan murid atau membuat seni kriya.

Sementara itu, sebagian besar murid dan guru mengalami gagap *school form home*, karena tidak akrab dengan gawai dan piranti pertemuan virtual seperti Zoom, Google Classroom, atau Skype.

Stay Home Be Safe KEEP YOU DISTA



Surviving Covid-19:
Tetap Waras di Tengah Pandemi

Penulis :
Amanda Margia Wiranata,
S.Psi, M.Psi., Psikolog
Donna Widjajanto, S.Psi

Penerbit :
Gramedia

Semua ini dihadapi sembari menghadapi ketakutan akan pandemi Covid-19. Apakah kita terpapar? Apakah keluarga kita bisa tertular dan sakit? Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Apakah kita bisa mempertahankan pekerjaan kita atau apakah kita terancam kena PHK? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah nanti akan aman untuk mengirim mereka kembali ke sekolah?

Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mempublikasikan hasil penelitiannya pada 14 Mei 2020 dengan 2.364 responden swaperiksa dari lima provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil penelitiannya, sebanyak 69% responden mengalami masalah psikologis yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis pada masa pandemi Covid-19 ini.

Ada juga penelitian Mohammad Abdul Hakim, Ph.D, dosen Fakultas Psikologi Universitas Sebelas Maret. Penelitian independen ini melibatkan 1.319 responden. Menariknya, peneliti menemukan penyebab stres pada respondennya, yaitu pembatasan sosial, khawatir akan kurangnya kebutuhan dasar,



dan khawatir akan sulit menyesuaikan perilaku. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2020. Lima bulan kemudian tidak terbukti kurangnya kebutuhan dasar karena sembako selalu ada di pasar dengan harga yang terjaga.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada mereka yang tertular Covid-19 atau mereka yang memiliki keluarga atau teman yang tertular Covid-19, namun juga masyarakat umum. Pandemi ini memberi dampak ketakutan dan kecemasan terkait situasi yang kita hadapi semasa pandemi dan pascapandemi. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan sederhana dan alat bantu psikologis bagi kita dalam menghadapi pandemi dan pascapandemi Covid-19. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar tetap tenang. Bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan kita. Bagaimana kita bisa mengatur hari-hari kita dan menerima keadaan *new normal*.

Dalam menghadapi bencana, menurut Zunia dan Myers, ada enam fase kondisi emosional yang dialami manusia, yaitu prabencana (*pre-disaster*), tanggap bencana (*impact*), heroik (*heroic*), optimis (*honeymoon*), kenyataan (*disillusionment*), dan rekonstruksi (*reconstruction*).

Menariknya, buku ini banyak memberikan tips yang dapat dilakukan untuk mengelola stress seperti *deep breathing* (bernapas mendalam), tidur yang berkualitas, musik, minta bantuan, relaksasi, *exercise*/aktif bergerak, hormon oksitosin, melakukan ritual religius, dan membuat daftar *self care*.

Mereka yang telah berusaha mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan aktivitas di rumah sekitar 2-3 bulan, demi menurunkan kasus

penularan Covid-19, merasa marah pada orang lain yang tidak taat protokol kesehatan di luar rumah seperti ramainya kegiatan *car free day*, acara sunatan atau perkawinan yang mengundang banyak tamu sehingga meningkatkan risiko naiknya kasus penularan Covid-19.

Bila mengalami rasa kesal dan gemas ini, sebaiknya mengatur pernapasan agar emosi dapat terkendali. Apabila emosi terkendali, kita dapat memikirkan solusi dan tindakan yang tepat. Saat menarik napas dapat pula dengan membayangkan menghirup wangi bunga yang segar dan saat membuang napas, bayangkan meniup daun-daun hingga terbang melayang.

Cara lain menenangkan diri dengan menghitung mundur 20 sampai 0. atau dengan melakukan teknik 5,4,3,2,1. Aktifkan indra/sensori kita lalu fokus pada lingkungan sekitar. Cari dan temukan di sekitar kita: 5 benda yang dapat dilihat, 4 hal yang dapat didengar, 3 hal yang dapat dipegang/diraba, 2 hal yang dapat kita bau, dan 1 rasa yang kita kecap di lidah.

PSBB yang diberlakukan sejak pertengahan Maret 2020 di Indonesia juga dialami di berbagai negara. Ada yang melakukan karantina atau *lockdown* terlebih dahulu seperti China, Korea, Jepang, dan Vietnam. Ada juga yang lebih lambat dari Indonesia seperti Amerika Serikat. Kondisi ini membuat putaran ekonomi terhenti.

Pabrik-pabrik berhenti berproduksi, karena pekerjanya tinggal di rumah. Penjualan pun berhenti, karena mal tutup dan para pembeli tetap tinggal di rumah. Hampir seluruh sektor ekonomi terdampak Covid-19 dan merugi. Rata-rata omzet pada masa pandemi Covid-19 ini (Maret-April 2020) hanya setengah atau bahkan kurang dari setengah pada bulan-bulan yang sama pada tahun sebelumnya (2019).



Sumber Foto : Unsplash, Antara Foto



Selanjutnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah momok bagi bekerja. Apa lagi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang begitu mendadak. Orang yang di-PHK secara psikologis bisa mengalami kondisi shock. Mereka mencemaskan kehidupan di masa depan, pendidikan, hingga kebutuhan mendasar akan sandang, pangan, dan papan. Orang yang memiliki tabungan, masih bisa bertahan walaupun tetap cemas seberapa lama dia akan dapat bertahan.

Kita bisa mengalami kondisi yang mental tidak sehat selama pandemi Covid-19, bila: kemampuan analisis kita rendah (tidak dapat memilah berita bohong atau bukan), bersikap pesimis, sering berpikir negatif. Agar kesehatan mental tetap terjaga, atasi dengan mencoba berpikir positif, memilah berita dan informasi secara tepat dari sumber berita yang terpercaya, baca informasi positif dan memberi harapan/solusi, menyadari dan menghargai setiap pengalaman positif, mengingat kembali pengalaman saat pernah berhasil melewati masa sulit, yang dapat digunakan kembali sebagai solusi kondisi saat ini.

Jika mengalami kondisi mental emosi yang membuat kita cenderung tertutup untuk bercerita dan mengekspresikan emosi, atau mengalami trauma di masa lalu, atasi dengan mengenali dan menerima perasaan-perasaan yang muncul, sehingga memudahkan mencari solusi dan membangkitkan harapan.

Jika mengalami kondisi mental yang tidak sehat, memiliki jalinan keluarga yang tidak lekat, atau

memiliki masalah ekonomi dan gaya hidup, atau berada di lingkungan yang toksik, berada di tengah lingkungan yang mengalami KDRT, atau perundungan, atasi dengan saling memberikan dukungan kepada orang di sekitar, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, dan menawarkan bantuan kepada orang lain.

Meskipun buku ini banyak membahas tentang masalah psikologis yang mungkin dialami sebagai individu, namun penulis juga mengajak pembaca untuk memberikan kontribusi pada lingkungan, negara, bahkan dunia dalam situasi pandemi ini. Nyalakan saklar positif, maka akan banyak hal yang dapat kita syukuri. Ada beberapa jalan untuk mengekspresikan rasa syukur, seperti membuat daftar hal-hal yang disyukuri, menulis jurnal pribadi, kerja sukarela atau memberi kembali, dan berdoa.

Pada akhirnya, penulis buku mengajak pembaca untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan agar dapat bertahan dan keluar dari situasi krisis sebagai penyintas. Buku ini cocok untuk kita sivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memahami kondisi masyarakat umum yang kita layani saat pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, buku ini juga cocok dibaca pelajar dan mahasiswa yang berjuang belajar dari rumah, ibu rumah tangga yang berperan sebagai guru bagi anaknya di rumah, maupun keluarga.

Buku setebal 124 halaman ini saya pinjam secara daring melalui aplikasi Ruang Buku Kominfo dari Perpustakaan Kominfo. Sama dengan peminjaman buku langsung ke perpustakaan Kominfo, buku ini hanya ada dua eksemplar. Pinjam bukunya pun terbatas waktunya selama 14 hari. Jika sudah sampai batas waktu peminjaman buku, secara otomatis akan hilang dari aplikasi di perangkat kita. Jika ingin punya buku terbitan Gramedia Pustaka Utama ini secara digital atau fisik bisa diperoleh di toko buku kesayangan dengan harga sekitar Rp48.400,00 sampai dengan Rp62.000,00.

TEKNO LOGI & GAD GET

Perlengkapan Covid-19 Homecare

Presiden Jokowi resmi memulai PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 dan pada tanggal 25 Juli diperpanjang melalui PPKM Level 4. Kebijakan ini didasarkan pada tingginya tingkat penularan Covid-19 di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk bisa menurunkan penularan di tengah masyarakat serta menurunkan bed occupancy rate (bor) rumah sakit. Tingginya bor ini menyebabkan rumah sakit tidak bisa lagi menampung jumlah pasien Covid-19, sehingga mau tidak mau, pasien Covid-19 tanpa gejala maupun yang bergejala ringan harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Dengan semakin banyaknya pasien Covid-19 di Indonesia yang melakukan isolasi mandiri di rumah, tentunya akan membutuhkan perangkat-perangkat yang bisa mendukung dan memantau kondisi kesehatan selama proses isolasi ini. Sehingga, proses isolasi bisa lebih aman dan terkontrol hingga saatnya proses tersebut selesai dan dinyatakan sembuh dari Covid-19. Edisi ini, Majalah KominfoNext akan membahas peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan dan tersedia di rumah selama menjalani isolasi mandiri dan melewati masa pandemi Covid-19. Yuk kita simak.



Termometer

Salah satu gejala seseorang terpapar Covid-19, yaitu munculnya demam. Merujuk dari laman Alodokter.com, demam merupakan kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat celsius. Demam sendiri bukan merupakan penyakit, tetapi lebih pada alarm dari tubuh kita yang menyampaikan bahwa "Hey, ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu" sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti alarm tersebut.

Dari definisi yang sudah disampaikan sebelumnya, *golden number*-nya adalah 38. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan angka yang menunjukkan suhu tubuh tersebut? Alat yang bisa digunakan dan tentunya sudah familier dengan hampir sebagian besar masyarakat yaitu termometer. Orang yang berjasa dalam menemukan termometer ini yaitu seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang tersohor, Galileo Galilei. Galileo membuat alat bernama termoskop yang mengukur perubahan suhu dengan menggunakan pemuaian udara. Termoskop inilah yang menjadi cikal bakal termometer.

Termometer yang banyak beredar di masyarakat



umumnya merupakan termometer yang menggunakan air raksa dan termometer digital.

Penggunaannya pun bervariasi, mulai dari yang digunakan dengan dijepit di ketiak, kemudian yang dimasukkan di mulut, dimasukkan ke telinga hingga yang kekinian dengan metode touchless yang cukup diarahkan ke permukaan kulit akan langsung bisa membaca suhu tubuh manusia. Tentunya, dengan metode apapun, fungsi utama termometer untuk menunjukkan suhu tubuh, sangat dibutuhkan para pasien Covid-19 selama menjalani proses isolasi dan pemulihan kondisi

Oximeter

Oximeter (pulse oximeter) merupakan alat pengukur kadar oksigen dalam darah. Oximeter ini menjadi penting, karena biasanya, berkurangnya kadar oksigen dalam darah tidak menimbulkan gejala dalam tubuh. Sehingga, peran alat ini dalam menunjukkan angka %SpO2 saturasi oksigen dalam darah, menjadi krusial. Angka saturasi oksigen dalam darah ini menjadi salah satu parameter seorang pasien Covid-19, apakah dikategorikan sebagai pasien gejala sedang, ringan, maupun berat. Normalnya, seseorang akan memiliki saturasi oksigen diatas 95%. Pada pasien Covid-19, jika persentase SpO2 nya dibawah 95%, maka pasien tersebut masuk kategori sedang-berat yang harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut.



Tersedianya oximeter di rumah di masa pandemi ini penting dan sangat dimungkinkan. Alat ini sangat mudah digunakan dan diaplikasikan di rumah, bahkan untuk seseorang yang tidak memiliki pengalaman penanganan medis sekalipun. Umumnya, alat ini berbentuk klip, dan cukup dijepitkan pada ujung jari, kemudian oximeter akan menunjukkan persentase saturasi oksigen dalam darah kita dalam hitungan detik.

Tensimeter

Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid atau penyakit bawaan menjadi kelompok yang rentan, bahkan menjadi penyebab kematian pasien Covid-19 tertinggi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Salah satu penyakit bawaan yang wajib menjadi perhatian yaitu darah tinggi/hipertensi. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan kemkes.go.id, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/ tenang. Untuk bisa mendapatkan nilai sistolik dan diastolik tersebut, diperlukan alat yang bernama tensimeter.

Dahulu, untuk bisa mengukur tekanan darah, selain alat tensi, diperlukan juga stetoskop untuk bisa mendengarkan denyut pembuluh darah agar bisa menentukan tingkat sistolik dan diastolic tubuh kita. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, alat tensi / tensimeter saat ini sudah semakin sederhana dan mudah penggunaannya. Ditambah dengan angka digital yang sudah langsung tampil di layar, proses pengukuran tekanan darah bisa semakin mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun.

Dengan memiliki alat ini di rumah, masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi bisa terus mengontrol kondisi tubuhnya agar selalu pada kondisi yang prima. Ketika tekanan darah terkontrol, maka potensi mematikan penyakit Covid-19 bagi pasien komorbid, bisa ditekan. Mudahnya penggunaan alat ini, juga membuat alat ini sangat direkomendasikan untuk tersedia di rumah Anda selama masa pandemi ini.



Glucometer

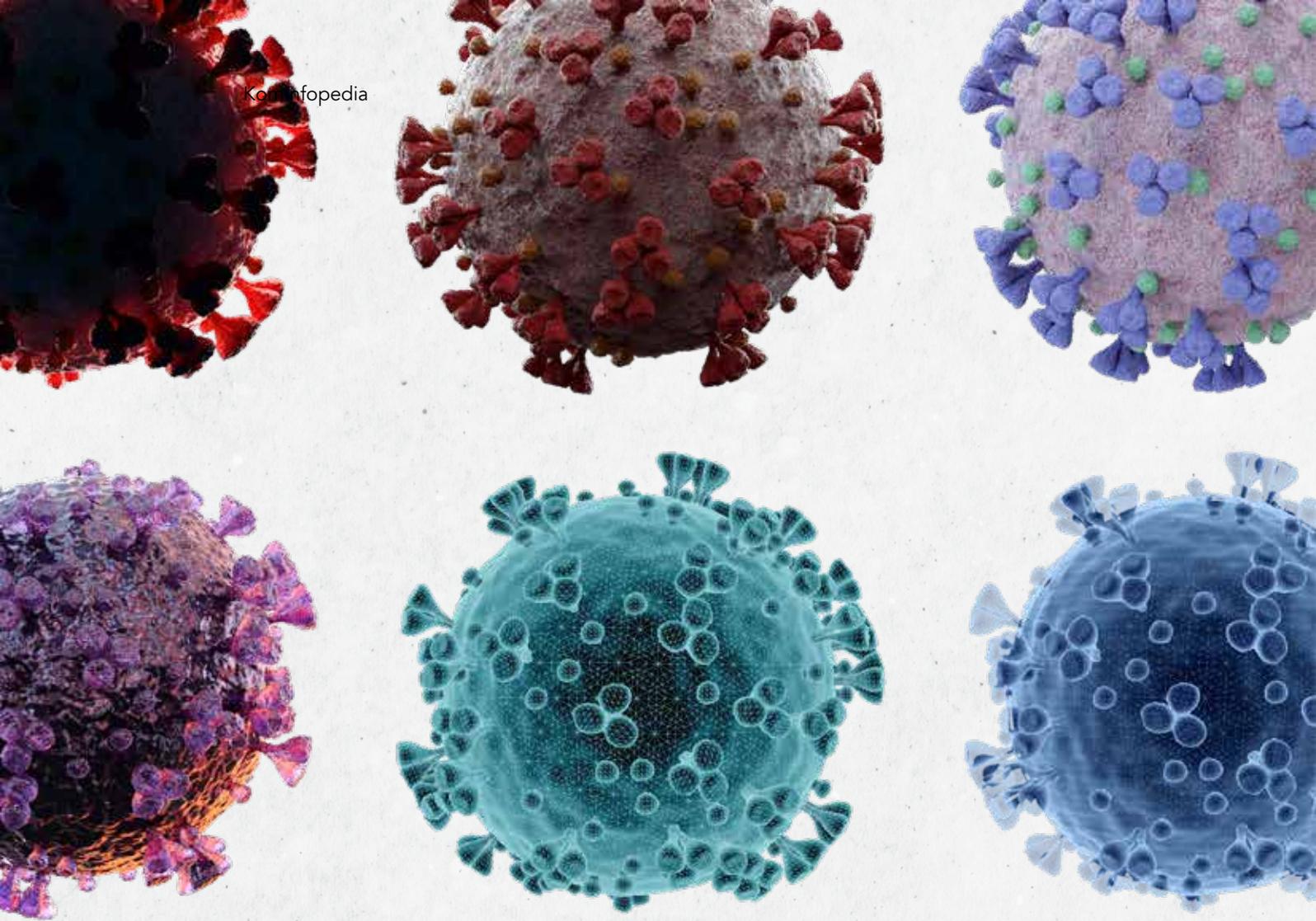
Penyakit penyerta yang menjadi penyumbang kematian pasien Covid-19 salah satunya yaitu Diabetes Melitus. Publikasi Kementerian Kesehatan pada Oktober 2020 menunjukkan bahwa pasien Covid-19 yang meninggal dengan penyakit penyerta Diabetes yaitu sebesar 7,7% atau kedua terbesar setelah hipertensi. Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999).

Untuk mengetahui seseorang memiliki penyakit diabetes/tidaknya, bisa dilakukan dengan tes gula darah. Pengetapan gula darah bisa menggunakan tes Gula Darah Sewaktu (GDS) maupun Gula Darah Puasa (GDP). Pada test GDS, tes dilakukan pada saat apapun bahkan ketika seseorang selesai makan. Jika kadar gula darah menunjukkan > 200 mg/dl, maka dipastikan orang tersebut menderita diabetes. Sedangkan pada test GDP, tes dilakukan setelah 8 - 10 jam. Pada tes ini, jika hasil menunjukkan angka > 126 mg/dl, maka orang tersebut menderita diabetes.

Untuk melakukan tes ini, biasanya seseorang

akan diambil darahnya dan kemudian akan diuji di laboratorium untuk mendapatkan nilai kadar darahnya. Namun, saat ini sudah ada alat yang bernama glucometer yang bisa digunakan di rumah oleh masyarakat umum untuk bisa mengukur kadar gula darah dalam tubuh. Walaupun, sifatnya hanya screening awal, namun alat ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran umum kondisi tubuh, terutama pada masa pandemi ini di mana pergi ke rumah sakit/sarana kesehatan lainnya, bisa meningkatkan potensi terpapar Covid-19.

Glucometer merupakan alat yang dilengkapi dengan display monitor kecil serta dilengkapi strip-kit. Strip-kit ini nantinya akan menampung sampel darah, yang kemudian akan diselipkan di glucometer. Glucometer akan membaca kadar gula darah dalam sampel dan menunjukkan hasilnya di layar alat tersebut. Dikarenakan dalam pemakaian alat ini melibatkan pengambilan sampel darah, maka untuk pengambilan sampelnya harus selalu memperhatikan kebersihan dan higienitas alat-alat yang dipakai untuk mendapatkan hasil yang akurat.



Kenali Karakteristik Enam Varian Covid-19

Tahukah SobatKom, sejak Juni 2021 lalu World Health Organization mengubah pelabelan varian baru virus Sars-CoV-2 penyebab Covid-19, untuk mempermudah sebutannya sekaligus menghindari stigma pada negara tempat varian ini dideteksi pertama kali. Seperti sifat virus pada umumnya, virus SARS-CoV-2 akan terus bermutasi, dan hingga saat ini cukup banyak mutasi virus penyebab Covid-19 yang ditemukan di berbagai negara, mulai dari Alpha, Delta, Theta, Epsilon, Kappa, hingga Lambda, varian terbaru yang tengah menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO).

KominfoPedia edisi kali ini, kita akan fokus membahas enam varian yang sudah ditemukan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada awal Juli 2021, yaitu varian Alpha, Beta, Delta, Eta, Kappa, dan Iota.

α

Alpha (B.1.1.7)

Dideteksi pertama kali di Inggris pada September 2020

Teridentifikasi di Indonesia pada Maret 2021

Memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibanding varian sebelumnya, sekitar 36% - 75%

Mutasi virus pada varian ini lebih mudah memasuki sel manusia. Artinya, partikel virus corona yang dihirup akan lebih mungkin masuk menginfeksi beberapa sel di sinus atau hidung, dan akhirnya masuk ke paru-paru.

Gejala: demam, batuk dan sakit tenggorokan, kelelahan dan nyeri otot, sulit bernapas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, serta keluhan pada saluran pencernaan

Risiko kematian lebih tinggi dibanding varian lain, namun belum terbukti mempengaruhi efektivitas vaksin

WHO mencatat peningkatan kasus hingga 49% yang bersirkulasi di Asia Tenggara.

Disebut sebagai penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Thailand beberapa waktu lalu.

Per 16 Juli 2021, sebanyak 55 kasus varian Alpha terdeteksi di 10 provinsi. Terbanyak adalah 35 kasus di DKI Jakarta, 9 kasus di Jawa Barat, 2 kasus di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur, serta masing-masing satu kasus di Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Selatan.

β

Beta (B.1.351)

Dideteksi pertama kali di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan, pada Mei 2020.

Memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat.

Gejala yang ditimbulkan tidak jauh berbeda dengan infeksi Covid-19 pada umumnya, tetapi mutasi varian ini tergolong cukup berbahaya.

Mempengaruhi netralisasi beberapa antibodi, namun belum terdeteksi apakah jenis tersebut mampu meningkatkan risiko keparahan Covid-19.

Dapat berpengaruh pada penurunan efikasi vaksin.

Per 16 Juli 2021, ditemukan sebanyak 5 kasus varian Beta di DKI Jakarta, 2 kasus di Jawa Barat, serta masing-masing satu kasus di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Bali.

Delta (B.1.617.2)

Terdeteksi pertama kali di Maharashtra, India pada Oktober 2020

Varian ini memiliki karakteristik yang lebih cepat menular, 60% lebih tinggi dari varian Alpha

Merupakan varian baru dari mutasi ganda L452R dan E484Q, yang mirip dengan E484K, hasil mutasi yang terlihat pada varian Beta dan varian Gamma (P.1, Brasil), yang membantu virus menghindari sistem kekebalan tubuh

L452R juga terdeteksi dalam varian virus Epsilon (B.1.429, California), yang terbukti meningkatkan transmisi virus serta mengurangi efektivitas antibodi

Laporan Public Health England menunjukkan varian ini berpengaruh menurunkan efektivitas vaksin terhadap gejala dibandingkan varian Alpha, dengan persentase mencapai sebesar 15% sampai 20%.

Gejala yang ditimbulkan antara lain nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat/pilek, mual atau muntah, diare, kehilangan nafsu makan, gangguan pendengaran, kehilangan fungsi indera penciuman dan perasa, pembekuan darah, hingga gangren (kematian jaringan tubuh).

Per 16 Juli 2021, tercatat ada 759 kasus Varian Delta yang ditemukan di 18 provinsi, dengan kasus terbanyak sejumlah 276 kasus di DKI Jakarta, 214 kasus di Jawa Barat, 131 kasus di Jawa Tengah, 20 kasus di Sumatera Utara dan DI Yogyakarta, masing-masing 13 kasus di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Lalu ditemukan 11 kasus di Sulawesi Selatan, 10 kasus di Papua, 8 kasus di Kalimantan Utara, 7 kasus di Banten, 8 kasus di Sumatera Selatan, 4 kasus di Kalimantan Tengah, 3 kasus di masing-masing Bengkulu, Lampung, dan Bali, serta 1 kasus di Kepulauan Riau dan Gorontalo.

Eta (B.1.525)

Pertama kali diidentifikasi di Inggris atau Nigeria, Afrika Barat, sejak Desember 2020

Varian ini memiliki beberapa mutasi pada gen protein lonjakan, termasuk adanya E484 K

Namun hingga saat ini tidak ada bukti varian Eta lebih menular atau mengarah ke penyakit yang lebih parah

Tersebar di 70 negara, dengan kasus terbanyak di Kanada sejumlah 1.415 kasus. Sementara di Asia, varian Eta ditemukan terbanyak di India, mencapai 226 kasus, serta juga ditemukan di Bangladesh, Jepang, Singapura, dan Filipina.

Berdasarkan data Kemenkes pada 23 Juni 2021 lalu, ditemukan 4 kasus varian Eta di DKI Jakarta dan 1 kasus di Kepulauan Riau.

Kappa (B.1.617.1)

K

Merupakan varian baru yang terdiri dari mutasi ganda, yang ditemukan pertama kali di India.

Sub-garis keturunan B1617,1 dan B1617,2 ditemukan masing-masing pada 21% dan 7% dari semua sampel.

B1617.1 dan B1617.2 terbukti resisten terhadap antibodi Bamlanivimab yang digunakan untuk pengobatan Covid-19, serta berkurangnya kerentanan terhadap antibodi netralisasi untuk B1617.1.

Berdasarkan data Kemenkes pada 23 Juni 2021 lalu, ditemukan masing-masing 1 kasus varian Eta di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan

Iota (B.1.526)

I

Ditemukan pada sampel yang dikumpulkan di New York, Amerika Serikat pada November 2021

Belum diketahui apakah varian virus corona Iota lebih menular dibandingkan virus aslinya

Varian Iota juga belum tersebar luas, namun menyebar cukup cepat melalui wilayah metropolitan New York dan sekitarnya.

Berdasarkan data Kemenkes pada 23 Juni 2021 lalu, ditemukan 2 kasus varian Iota di Bali.



Semoga penjelasan ini dapat membantu SobatKom memahami karakteristik, gejala, hingga dampak yang ditimbulkan berbagai varian virus Sars-CoV-2 yang saat ini ada di Indonesia. Seperti yang disebutkan di awal, layaknya sifat virus pada umumnya, ia akan terus bermutasi. Jadi, tetap jaga protokol kesehatan ya SobatKom, dan jangan lupa vaksinasi. **Pandemi belum berakhir, tapi kesadaran kita bersama akan membantu melindungi diri dan keluarga dari Covid-19.**

Sumber : kemenkes.go.id
 covid19.go.id
 kompas.com
 "Kolom Pakar" liputan6.com



Presiden Jokowi Tetapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tersebut akan diterapkan mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Saat menyampaikan keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 1 Juli 2021, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, langkah tegas tersebut diambil pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat. Presiden juga menyebut varian baru Covid-19 menjadi persoalan serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengaturan PPKM Darurat ini.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid. Seluruh aparat negara, TNI-Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi:

Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi

Dengan adanya vaksinasi di stasiun dan lingkungannya, Presiden berharap seluruh pihak dan masyarakat bisa segera terlindungi dari Covid-19.

Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi di tempat dengan mobilitas dan interaksi tinggi dipercepat. Tempat-tempat publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, bandara, hingga pelabuhan harus menjadi prioritas.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya selepas meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 17 Juni 2021.

“Kita ingin ada percepatan di tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport, dan juga pelabuhan, karena di situlah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran,” ujar Presiden.

Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi, Presiden tiba di Stasiun Bogor sekitar pukul 08.06 WIB. Presiden tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Bogor merupakan salah satu wilayah aglomerasi dan penyangga ibu kota Jakarta sehingga tingkat interaksi dan mobilitas penduduknya tinggi.

“Oleh sebab itu, kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga pekerja di stasiun untuk melindungi mereka dari Covid-19,” jelas Presiden.

Dengan adanya vaksinasi di stasiun dan lingkungannya, Presiden berharap seluruh pihak dan masyarakat bisa segera terlindungi dari Covid-19.

Untuk diketahui, vaksinasi di Stasiun Bogor diperuntukkan bagi sekitar 1.500 pengguna kereta rel listrik (KRL), pelaku ekonomi di stasiun, hingga masyarakat sekitar. Adapun vaksin yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca. (BPMI Setpres)

Sumber: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tetapan-ppkm-darurat-di-jawa-dan-bali/>



Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 17 Juni 2021.

#PrayFromHome, Presiden:

Usaha Lahiriah Harus Dibarengi Usaha Batiniah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Covid-19 ini, selain berbagai upaya lahiriah yang terus dilakukan, juga diperlukan upaya batiniah dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Hal tersebut disampaikan dalam acara doa bersama lintas agama bertajuk #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia, yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (11/07/2021) siang.

“Dalam menghadapi situasi sulit ini, selain ikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah. Memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah Swt. agar beban kita diringankan, agar rakyat, bangsa, dan negara, juga dunia segera terbebas dari pandemi,” tuturnya.

Kepala Negara menyampaikan, saat ini seluruh dunia masih terus berjuang untuk bebas dari pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi pandemi ini, imbuhnya, diperlukan kerja sama seluruh komponen bangsa karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

“Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha

berat ini,” imbuhnya. Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Ia juga bersyukur atas pandangan ormas-ormas keagamaan yang senapas dengan kepentingan untuk menjaga kepatuhan umat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah Covid-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, atas nama pribadi dan pemerintah serta negara, Presiden juga menyampaikan ungkapan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban pandemi yang wafat. Presiden mengajak semua pihak untuk mendoakan mereka, sekaligus mendoakan semua masyarakat yang sedang terpapar Covid-19 untuk segera bisa pulih kembali.

“Dari rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala, mengheningkan cipta, doa dari rumah, kita panjatkan dan berikhtiar ujian pandemi ini segera berakhir,” ujarnya.



Menutup sambutannya, Kepala Negara juga kembali meminta masyarakat untuk meyakinkan keluarga dan lingkungan terdekat untuk beraktivitas di rumah saja sebagai bagian dari upaya untuk menekan laju pandemi.

“Mengatasi persoalan Covid-19 merupakan ijhtihad kebangsaan kita hari ini karena bertujuan menyelamatkan jiwa dan kemaslahatan kita bersama. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan menjadikan negara

ini aman, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam laporannya menyampaikan acara doa bersama ini dilakukan secara serentak dan diikuti oleh berbagai komponen bangsa, mulai dari pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran TNI-Polri, kepala daerah, pemuka agama, hingga lapisan masyarakat lainnya. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari acara Hening Cipta Indonesia yang

telah dilaksanakan pada Sabtu (10/07/2021) kemarin, pukul 10.07 WIB.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar Allah Swt., agar Tuhan Yang Mahakuasa memberi rahmat, ampunan, dan perlindungannya kepada bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia,” ujar Menag

Yaqut menambahkan, dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman, penenang jiwa, dan penumbuh optimisme di dalam kehidupan.

“Semoga kejadian luar biasa Covid-19 ini disegerakan berakhir. Sebagai orang yang beriman kita yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua setelah semua usaha lahir dilakukan,” ujarnya.

Menag juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada serta berikhtiar menjaga diri, keluarga, dan lingkungan di sekitar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. “Tingkatkan kedermawanan sosial, semangat berbagi, dan rela berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Dalam acara #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia ini, pembacaan doa dilakukan oleh enam orang pemuka agama, yaitu Quraish Shihab (Islam), Pendeta Lippus Biniluk (Protestan), Kardinal Suharyo (Katolik), I Nengah Dana (Hindu), Bhante Sri Pannavaro Mahathera (Buddha), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Konghucu)



Presiden Jokowi pada acara #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia, Minggu (11/07/2021) siang, secara virtual. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Sumber: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tetapkan-ppkm-darurat-di-jawa-dan-bali/>

Presiden Luncurkan Pembagian Obat Isoman Gratis untuk Rakyat

Untuk tahap awal ini, pemerintah akan membagikan sejumlah 300 ribu paket berisi vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak di Pulau Jawa dan Bali.



Seorang warga mengambil paket obat isoman gratis yang dibagikan pemerintah mulai hari ini. Pembagian obat tersebut diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dari halaman Istana Merdeka.

Pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu, pemerintah mulai membagikan sejumlah bantuan baik berupa bahan pokok sembako melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun lewat Bantuan Sosial Tunai, serta bantuan paket vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

“Pemerintah mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membagikan paket obat isoman gratis untuk rakyat di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 15 Juli 2021.

Untuk tahap awal ini, pemerintah akan membagikan sejumlah 300 ribu paket berisi vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, pemerintah juga akan membagikan 300 ribu paket serupa bagi masyarakat terdampak di luar Pulau Jawa dan Bali.

Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang dibagikan oleh Presiden, masing-masing untuk tujuh hari. Paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG). Paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif dengan keluhan panas demam dan kehilangan penciuman. Adapun paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering.

“Nah untuk paket ini (paket 2 dan 3) membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, empat orang perwakilan warga menerima paket obat isoman gratis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka adalah

Sigit Tri Widodo mewakili Sumarno yang mendapat paket 3, Satria Abdi Surya yang mendapat paket 2, serta Okki Oktaviani dan Martini yang keduanya mendapat paket 1.

Presiden menegaskan bahwa ketiga paket isolasi mandiri tersebut tidak diperjualbelikan. Pasokannya akan disiapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan diproduksi oleh BUMN farmasi. Sementara untuk pendistribusiannya, paket obat tersebut akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda maupun desa, puskesmas, Babinsa, dan pengurus RT/RW,” tambahnya.

Presiden juga meminta agar program pembagian obat isoman gratis ini diawasi dengan ketat di lapangan sehingga bisa membantu pengobatan warga yang terpapar Covid-19.

“Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena Covid dan membantu pengobatan warga yang menderita Covid-19. Saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi Covid-19 di apotek maupun di rumah sakit,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sumber: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidentri-luncurkan-pembagian-obat-isoman-gratis-untuk-rakyat/>



Presiden:

PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli, Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun

Untuk tahap awal ini, pemerintah akan membagikan sejumlah 300 ribu paket berisi vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak di Pulau Jawa dan Bali.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah terus memantau penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu. Menurut Presiden, relaksasi penerapan PPKM Darurat akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021, dengan catatan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan.

"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM Darurat yang disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 20 Juli 2021.

Kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien Covid-19.

"Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," ungkapnya.

"Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan pemenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," imbuhnya.

Sejumlah aturan yang akan dilonggarkan jika tren kasus menurun antara lain pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan untuk buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Adapun pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

"Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah," lanjutnya.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen penjual voucher, pangkas rambut, penatu (laundry), pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturannya juga akan diatur oleh pemerintah daerah. Di samping itu, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.

Sementara itu, kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta agar semua pihak bisa bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus

Covid-19 akan segera turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun.

“Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah dua juta paket obat,” jelasnya.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa Bantuan Sosial Tunai (BST),

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Memang ini situasi yang sangat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tandasnya.

“

Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM.

”

Sumber: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-ppkm-darurat-dibuka-bertahap-pada-26-juli-jika-tren-kasus-covid-19-menurun/>

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait perkembangan PPKM Darurat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 20 Juli 2021. Foto: BPMI Setpres





Dukungan Sektor Kominfo

dalam Pelaksanaan

PPKM Darurat



Juli 2021 menjadi bulan yang mungkin tidak bisa terlupakan bagi masyarakat Indonesia. Pada rentang periode ini, tingkat penambahan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 seakan-akan tidak henti-hentinya memecahkan rekor. Dari yang semula di Bulan Juni hanya sekitar 3000-5000 an kasus, seketika melonjak hingga mencapai puluhan ribu kasus. Pemerintah pun segera bergerak, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa mulai 3 Juli 2021, diberlakukan PPKM Darurat di beberapa wilayah di Indonesia yang masuk sebagai zona merah penularan Covid-19. Indonesia Kembali masuk ke periode ketika awal pandemi di tahun 2020 lalu, aktivitas di perkantoran dibatasi hanya untuk sektor krusial, diberlakukan work from home, rencana pembelajaran tatap muka dibatalkan, perayaan hari besar juga dialihkan di rumah, serta program vaksinasi untuk masyarakat terus digenjut dan dimaksimalkan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan PPKM Darurat dan menyukseskan program penanganan Covid-19, Menteri Kominfo memberikan arahan dan juga program-program untuk mendukung arahan presiden.

Peran Serta Proaktif Sivitas Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginstruksikan sivitas Kementerian Kominfo proaktif dalam mendukung penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali. “Agar ikut serta mengambil inisiatif, bersifat proaktif, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali. termasuk TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya di Jakarta, Jumat (02/07/2021).

Perintah yang dimuat dalam Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali itu ditujukan sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Kominfo. Menurut Menteri Johnny hal itu juga sekaligus untuk mengimplementasikan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang berlaku dari tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021.

“Arahan Presiden tersebut menyangkut kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Untuk itu, arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak,” jelasnya. Menkominfo juga

memerintahkan sivitas Kementerian Kominfo melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T. "Yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas (5M), serta melakukan testing, tracking dan treatment (3T)," tandasnya. Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo yang tidak menaati dan lalai dalam menjalankan kebijakan tersebut, Menteri Johnny menegaskan penegean hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menggandeng Mitra Kerja dalam Memberikan Layanan Optimal di Masa PPKM



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau mitra kerja untuk tetap memberikan layanan optimal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali melalui Surat Nomor: 475/M.KOMINFO/UM.01.01/07/2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Penyelenggara Pos, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta (LPP dan LPS), serta Lembaga Pers/Media Massa. "Tetap memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan batasan pengetatan aktivitas yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ujarnya dalam surat yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (02/07/2021) kemarin.

Menkominfo mengajak mitra kerja untuk menaati dan melaksanakan sepenuhnya arahan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali. Selain itu juga mendorong untuk membantu percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengambil inisiatif, bersifat proaktif, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan PPKM Darurat termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, dan Pemerintah Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Menkominfo menekankan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali merupakan upaya menjaga kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak perlu mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah. "Arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak. Atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih," imbuhnya.

Penyiapan Digital Center

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), serta Satuan Tugas Covid-19 telah menyiapkan Digital Center PPKM Darurat dalam rangka mendukung kebijakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali. "Digital Center PPKM Darurat untuk menyampaikan update harian perkembangan kebijakan kepada masyarakat, dan penjelasan-penjelasan atas informasi-informasi penting yang seringkali membingungkan masyarakat," ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Integrasi Aplikasi Layanan Kesehatan Transportasi Udara, dari Jakarta, Minggu (04/07/2021) malam. Menurut Menkominfo, masyarakat saat ini menerima banyak informasi keliru yang membingungkan dan terkesan menakuti. "Padahal, kita perlu menjaga kenyamanan, menjaga percaya dirinya masyarakat sehingga kuat menghadapi Covid-19 ini," jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan sebagai upaya untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 saat kebijakan PPKM Darurat diberlakukan, Kementerian Kominfo melakukan beberapa langkah. "Yang pertama pemantauan infrastruktur telekomunikasi secara ketat, optimalisasi pemanfaatan platform-platform digital dan

peningkatan utilisasi aplikasi PeduliLindungi yang malam ini mendapatkan tekanan yang penting," ujarnya. Untuk aplikasi PeduliLindungi yang berkaitan dengan transportasi, Menkominfo menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dalam memanfaatkan fitur-fitur di aplikasi tersebut. "Saya berterima kasih sekali bahwa sekarang ada usaha yang sangat serius untuk memastikan pemanfaatan aplikasi ini. Utilisasi dan fitur-fitur aplikasi PeduliLindungi akan mendukung percepatan program Vaksinasi Covid-19, pemantauan zona resiko Covid-19 di seluruh Indonesia, tidak saja Jawa dan Bali," jelasnya.

Menurut Menkominfo, penguatan layanan telemedicine di aplikasi PeduliLindungi bekerja sama dengan mitra platform digital. Hal ini untuk mendapatkan beberapa manfaat penting. "Salah satunya penambahan fitur pindai QR Code check-in bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dan mengakses fasilitas publik, tolong dimanfaatkan baik-baik," tandasnya. Menteri Johnny menekankan bahwa melalui penambahan fitur-fitur tersebut, masyarakat turut berperan aktif memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemutakhiran kebijakan penanganan Covid-19. "Aplikasi PeduliLindungi akan mengintegrasikan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen, dan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan laboratorium, serta fasilitas pelayanan kesehatan di pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta secara realtime," ujarnya. Dengan demikian, lanjut Menkominfo, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi seperti

Electronic Health Alert (e-HAC), Kartu Vaksinasi Covid-19 dan hasil pemeriksaan RDT Antigen dan PCR yang dapat divalidasi oleh petugas bandar udara di counter check in bagi penumpang transportasi udara.

Menteri Johnny menyatakan selama lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi, disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan dengan setertib mungkin. Upaya bersama tersebut membutuhkan peran masyarakat.

"Keberhasilan kita bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan menjadi kunci penting untuk memutus rantai Covid-19, tidak akan pernah bosan itu kita sampaikan. Peran serta dan peran aktif masyarakat sangat penting dan menentukan kecepatan kita mengakhiri pandemi Covid-19," ujarnya.

Disamping itu, proses Vaksinasi akan terus berjalan pada saat diberlakukan kebijakan PPKM Darurat, pembatasan gerakan masyarakat tidak menghambat usaha untuk melakukan Vaksinasi yang masif sebagaimana arahan Presiden untuk dilakukan lebih agresif. "Di bulan Juli ini, Saya sudah mendengar sekitar 1 juta vaksinasi bahkan lebih perhari, dan di bulan agustus nanti harus mencapai 2 juta di saat di mana PPKM darurat ini yang membatasi kegiatan kita, tetapi vaksinasi harus terus secara agresif kita lakukan," jelasnya. Menurut Menkominfo, kerja sama semua pihak untuk mengambil bagian dalam Vaksinasi akan sangat diharapkan dan menentukan agar masyarakat lebih kuat dan untuk mencapai herd immunity bisa lebih cepat.



Menekan Peredaran Infodemi

Dalam pertemuan dengan para pimpinan platform media sosial pada Minggu(18/7) lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan kembali tanggung jawab platform dalam penanganan hoaks di masa pandemi Covid-19. Menteri Johnny menginstruksikan agar pengelola platform media sosial dapat secara lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait Covid-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi. "Saya menyesalkan banjir informasi yang tidak tepat dan sangat memengaruhi laju pemulihan pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoaks, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan," tegas Menteri Johnny.

Ketiga hal ini perlu dilakukan secara serius, tidak main-main, dan tidak bisa lagi dengan cara-cara sehari-hari. "Penyebaran berita bohong sangat memengaruhi pemikiran manusia, yang menjadi taruhan adalah nyawa saudara-saudari kita sebangsa Indonesia. Sudah banyak yang jadi korban dari penyebaran infodemi yang kian masif ini, kita tidak boleh menyerah kalah," tambah Menteri Johnny.

Infodemi Masih Marak Beredar

Penanganan infodemi perlu dilakukan secara lebih tegas karena hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 masih terus beredar. Infodemi yang dibahas dalam pertemuan Menteri Kominfo dengan perwakilan platform media sosial tersebut secara khusus terdiri atas persebaran berita keliru di 3 isu, yakni:



Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi Covid-19

Sepanjang 23 Januari 2020 hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 1.763 isu hoaks Covid-19 yang tersebar ke dalam 3.817 postingan media sosial, di mana 3.356 postingan diantaranya telah diturunkan atau di-take down. Beragam temuan tersebut ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum oleh Kepolisian RI terhadap 767 kasus yang dilakukan sampai dengan 15 Juli 2021 lalu.

Temuan hoaks ini menyangkut isu antara lain pemelintiran informasi bahwa rumah sakit sengaja meng-covid-kan para pasien yang datang demi keuntungan komersil hingga kabar sesat bahwa Covid-19 merupakan konspirasi.



Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi **Vaksin Covid-19**

Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 252 isu hoaks vaksin Covid-19 pada 1.850 postingan media sosial, di mana seluruhnya telah ditangani atau di-take down.

Temuan hoaks ini menyangkut isu, diantaranya: 1) vaksin yang menyebabkan gelombang radiasi elektromagnetik, 2) informasi keliru yang menuding bahwa vaksin menyebabkan kematian, dan juga 3) informasi keliru yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 varian Delta disebabkan karena vaksinasi.



Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat**

Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM Darurat pada 209 postingan media sosial, di mana 136 postingan diantaranya telah ditangani atau di-takedown.

Temuan isu hoaks ini utamanya menyangkut informasi keliru tentang penolakan PPKM Darurat di berbagai daerah serta pemahaman yang salah mengenai perpanjangan PPKM Darurat.

Penanganan hoaks juga akan terus dilakukan Kementerian Kominfo dari hulu ke hilir, dimulai dari edukasi literasi digital, pemutusan akses (take down) konten negatif bersama platform media sosial, penerbitan klarifikasi hoaks bersama pemangku kepentingan terkait, hingga mendukung Kepolisian RI dalam upaya penegakkan hukum. "Diperlukan juga dukungan yang besar dari platform media sosial untuk proaktif menangani hoaks dan secara agresif mendorong literasi digital di masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal-kanal informasi untuk melakukan pemeriksaan hoaks secara mandiri dan melakukan pengaduan konten hoaks melalui kanal aduan yang tersedia," ujar Menteri Johnny.

Saat ini, berbagai kanal telah diaktifkan sebagai bagian dari upaya mengatasi infodemi Covid-19, diantaranya yakni kanal pemeriksaan fakta untuk klarifikasi hoaks (hoax debunking) mandiri seperti melalui s.id/infovaksin dan s.id/datacovid19id. Masyarakat juga dapat mengadukan konten yang dinilai mengandung informasi yang tidak tepat melalui kanal-kanal seperti salah satunya melalui aduankonten.id.

PPKM Darurat Jawa-Bali Solusi Selamatkan Negeri

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, tentu tujuan utamanya adalah memutus mata rantai pandemi Covid-19. Jauh sebelum memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali, Presiden RI Joko Widodo telah memikirkan berbagai dampak dan keberhasilan dikemudian hari. Karena pemerintah tidak berjalan sendiri, perlu dukungan dari para ahli, ilmuwan, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Presiden Jokowi terus mengamati perkembangan pandemi Covid-19 yang berkembang sangat cepat, karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi tersebut yang kemudian mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar secara bersama-sama dapat membendung penyebaran wabah.

Dalam rangka mendukung kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginstruksikan sivitas

Kementerian Kominfo untuk proaktif menyukseskan kebijakan tersebut. Seluruh civitas Kementerian Kominfo harus mengambil inisiatif, bersifat proaktif, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali, termasuk koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

"Arahan Presiden menyangkut kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Untuk itu, arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak," kata Menkominfo Johnny G. Plate di Jakarta, Jumát, 2 Juli 2021.

Sebagai tindak lanjut dukungan

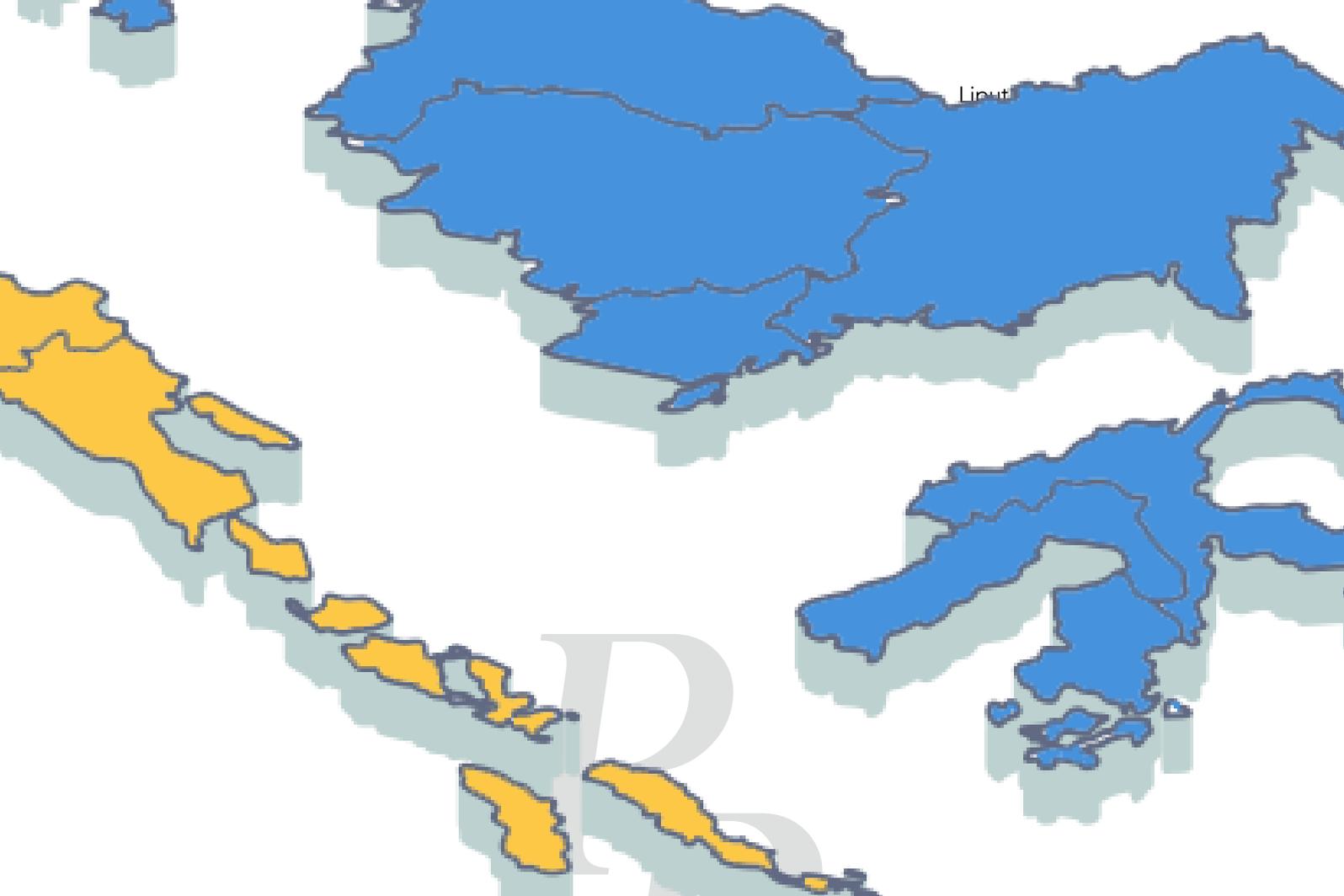
kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali, Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyukseskan PPKM Darurat Jawa-Bali, salah satunya dengan menyiapkan *digital center*. Hal itu disampaikan melalui Siaran Pers No.235/HM/KOMINFO/07/2021, pada hari Minggu, 4 Juli 2021.

Dalam keterangan rilis tersebut dikatakan bahwa Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), serta Satuan Tugas Covid-19 telah menyiapkan *Digital Center* PPKM Darurat dalam rangka mendukung kebijakan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali.

"*Digital Center* PPKM Darurat untuk menyampaikan update harian perkembangan kebijakan kepada masyarakat, dan penjelasan-penjelasan atas informasi-informasi penting yang seringkali membingungkan masyarakat," kata Menkominfo melalui Konferensi Pers Virtual Integrasi Aplikasi Layanan Kesehatan Transportasi Udara, Jakarta, Minggu Juli 2021.



Arahan Presiden menyangkut kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Untuk itu, arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak



Update Covid-19 dan PPKM Darurat Jawa-Bali

Dua minggu paska PPKM Darurat Jawa-Bali diberlakukan, pemerintah menyampaikan perkembangan terkini jumlah peningkatan kasus Covid-19. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, kebijakan PPKM Darurat telah menghasilkan suatu upaya yang maksimal, yakni dengan menurunnya BOR (Bed Occupancy Rate) atau keterisian tempat tidur khusus di provinsi se-Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali juga menghasilkan mobilitas penduduk yang semakin menurun. Artinya bahwa, upaya bersama dan kerja keras antar berbagai pihak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mematuhi kebijakan tersebut.

Meskipun BOR yang memadai dan mobilitas masyarakat yang menurun selama kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali diberlakukan, penekanan terhadap jumlah kasus masih menjadi kendala. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 per 20 Juli 2021, jumlah kasus masih mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dengan jumlah kasus aktif mencapai 542.938 atau 18,65 persen. Meningkatkan jumlah kasus diakibatkan oleh masuknya berbagai varian Covid-19 di Indonesia, khususnya varian Delta yang mencapai 661 kasus di pulau Jawa dan Bali.

Sebagai catatan, sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia terdapat beberapa jenis varian yang bermutasi. Sejauh ini kita kenal ada varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa yang terus bermunculan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ketentuan PPKM Darurat Jawa Bali

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga sebagai Wakil Ketua KPCPEN Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat koordinasi untuk menerapkan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Dalam hasil rapat koordinasi diputuskan 14 langkah strategis atau ketentuan yang berlaku selama PPKM Darurat Jawa-Bali. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

1

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen *work from home* (WFH).

2

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara *daring/online*;

3

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf *work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan, pada sektor kritikal mencakup energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sektor yang dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan. Sedangkan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

4

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara.

5

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*).

6

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7

Tempat ibadah dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara.

8

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9

Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/ rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11

Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

12

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13

Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

14

Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dilakukan.

Dari 14 ketentuan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali tampak memberikan gambaran bagaimana upaya dan komitmen pemerintah mempertegas kebijakan strategis dalam memutus rantai Covid-19. Langkah-langkah tersebut juga didukung dengan cakupan pembatasan area PPKM Darurat se-Provinsi Jawa dan Bali, dengan cakupan area yang berlaku di kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 dan 4.

Rincian setiap provinsi yang masing-masing memiliki kriteria dimulai dari Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria level 4, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Provinsi Banten terdapat 3 kabupaten dan 1 kota masuk dalam kriteria level 3, dan level 4 mencakup 3 kota. Provinsi Jawa Barat kriteria level 3 di 14 kabupaten dan level 4 di 4 kabupaten dan 8 kota. Provinsi Jawa Tengah kriteria level 3 di 21 kabupaten dan 1 kota, sedangkan level 4 dilakukan di 8 kabupaten dan 5 kota. Daerah Istimewa Yogyakarta kriteria level 3 mencakup 2 kabupaten dan level 4 di 2 kabupaten dan 1 kota.

Provinsi Jawa Timur dengan kriteria level 3 diberlakukan di 23 kabupaten dan 2 kota, sedangkan level 4 berlaku di 4 kabupaten dan 7 kota. Untuk Provinsi Bali, pemerintah memutuskan untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 3 berada di 6 kabupaten dan 1 kota.

Belajar dari Pandemi Masa Lalu

Melawan wabah virus bukanlah sebuah anekdot yang memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat. Kerja keras serta berbagai upaya menghadirkan solusi dan kebijakan strategis menghentikan pergerakan pandemi Covid-19 seharusnya menjadi tugas bersama. Kita harus belajar dari sejarah, di mana jauh sebelum wabah Covid-19 dengan banyaknya varian yang berbahaya, dunia sempat dilanda pandemi Flu Spanyol.

Dari berbagai sumber menyatakan bahwa Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 merupakan pandemi terparah di dunia yang berlangsung selama dua tahun. Wabah itu tercatat dalam sejarah sebanyak 500 juta terinfeksi, juga diperkirakan sekitar 50-100 juta orang meninggal dunia karena serangan tiga gelombang varian Flu Spanyol.

Jumlah kematian yang begitu banyak ternyata ada alasan yang tidak diduga, bahwa masyarakat kala itu menganggap wabah Flu Burung hanyalah sebuah ilusi dan tidak benar adanya. Alhasil, imbauan melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, melakukan karantina dan menghindari kerumunan diabaikan begitu saja.

Ganasnya Flu Spanyol memakan banyak korban pada gelombang kedua karena masyarakat tidak mematuhi kebijakan pemerintah, melakukan aktivitas sosial dengan penuh suka cita, menganggap sebuah wabah hanyalah penyakit biasa. Sikap dan perilaku sebagian masyarakat di masa lalu tidak jauh berbeda dengan masyarakat era modern saat ini saat dunia kembali dilanda pandemi Covid-19.

Sebagian negara mungkin berhasil sedikit demi sedikit mengatasi dampak pandemi karena faktor keterlibatan masyarakatnya. Namun masih banyak negara-negara di dunia yang saat ini mencari jalan keluar untuk memutus mata rantai Covid-19, termasuk Indonesia, negara dengan populasi penduduk terbanyak yang menjadi salah satu tantangan tersendiri.

Setelah mengamati hasil pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut hingga 25 Juli 2021. Terdapat beberapa perubahan, seperti PPKM Darurat dilakukan menjadi PPKM Level 4. Pandemi Covid-19 belum usai, sehingga berbagai kebijakan yang dilakukan tentunya bertujuan untuk memutus rantai persebaran wabah ini. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat menjadi kunci suksesnya Indonesia mengakhiri pandemi.

Digital Center PPKM Darurat untuk menyampaikan update harian perkembangan kebijakan kepada masyarakat, dan penjelasan-penjelasan atas informasi-informasi penting yang seringkali membingungkan masyarakat

Sinergitas Pentahelix dalam Mewujudkan Herd Immunity

Dari PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 dan 4



Keberhasilan kita bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan menjadi kunci penting untuk memutus rantai Covid-19, tidak akan pernah bosan itu kita sampaikan. Peran serta dan peran aktif masyarakat sangat penting dan menentukan kecepatan kita mengakhiri pandemi Covid-19.



Ubi concordia, ibi victoria. Di mana ada keselarasan, di sana ada kemenangan. Sebuah adagium yang selaras dengan konteks saat ini, dimana kemenangan atas Covid-19 dengan terwujudnya *Herd Immunity* atau kekebalan komunal hanya akan terjadi, apabila semua elemen saling bersinergi. Mulai dari pemerintah sebagai regulator, implementator, sekaligus pengawas kebijakan, pihak media sebagai amplifikator informasi yang benar dan edukatif, hingga swasta dan masyarakat umum sebagai sasaran implementasi kebijakan publik, harus berada dalam keselarasan yang mutual.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Februari 2021 saat pemerintah memberlakukan PPKM kabupaten/kota, Indonesia pernah mengalami puncak kasus positif Covid-19.

Selanjutnya kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami *trend* menurun. Sayangnya, pada Juni dan Juli 2021 tren positif Covid-19 kembali naik dan mencapai puncak yang lebih tinggi yaitu dengan 54.517 kasus pada Rabu (14/7/2021). Hal ini sempat menimbulkan polemik. Di satu sisi, banyak pihak yang menyalahkan pemerintah. Namun di sisi lain, banyak pilihan juga yang membela pemerintah dan menyatakan bahwa fenomena pemuncakan kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan aturan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kelalaiannya dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes) 5M.

Terlepas dari siapa salah dan siapa benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Juli 2021 lalu, telah mengumumkan pengimplementasian PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, yang diberlakukan mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Hal ini ditempuh sebagai lanjutan upaya pemerintah dalam menguraikan aktivitas kerumunan, sembari terus meningkatkan aktivitas vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Berdasarkan regulasi PPKM Darurat, semua karyawan pada sektor industri yang tidak penting harus bekerja dari rumah, sementara 50% karyawan di industri penting, termasuk keuangan, dapat bekerja di kantor.

Sektor-sektor penting seperti fasilitas kesehatan dan gerai makanan, dapat beroperasi dengan kapasitas total di lokasi. Pusat perbelanjaan harus tutup, dan toko kelontong dan supermarket dapat beroperasi hingga jam 8 malam setiap hari dengan kapasitas 50%. Sementara itu gerai-gerai makanan hanya dapat menawarkan layanan *take away* atau beli bungkus dan pesan antar. Selanjutnya untuk sektor angkutan



publik, aturan PPKM mewajibkan kapasitas maksimal 70% penumpang. Para pelancong yang naik bus, kereta api jarak jauh, kapal, serta pesawat udara harus menunjukkan hasil swab test dalam kurun waktu 24 jam serta kartu vaksin Covid-19, setidaknya vaksin tahap 1. Sedangkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara *online*.

Melihat kasus Covid-19 yang belum juga menurun signifikan, Presiden Jokowi pada 20 Juli 2021 kembali menginstruksikan perpanjangan PPKM dengan pergantian istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4, yang berlaku dari 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021. Hal ini ditempuh, mengingat belum adanya signifikansi penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

Melansir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2021 tentang PPKM level 4 di wilayah Jawa Bali, PPKM Level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan

disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil asesmen.

Istilah PPKM level 3 dan 4 resmi dipakai ketika Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagikan dokumen Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada Rabu (21/7/2021) pagi.

Dalam Inmendagri tersebut, istilah PPKM darurat tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Inmendagri menyebut PPKM Level 4 dan 3 Covid-19 Jawa dan Bali.

Apapun istilahnya, tentunya kebijakan yang berhubungan dengan pembatasan aktivitas kerumunan, dimaksudkan untuk mengendalikan kasus Covid-19 gelombang kedua di Indonesia yang pada Juli 2021 mulai melonjak drastis hingga menempati urutan pertama di dunia. Secara umum, aturan-aturan dalam PPKM Darurat tetap diakomodir dalam PPKM Level 4 dan 3.

Dukungan Penuh Kementerian Kominfo

Sebagai *Government Public Relation*, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menyatakan secara tegas tentang dukungan Kementerian Kominfo terhadap kebijakan PPKM oleh pemerintah. Dukungan Kominfo terhadap implementasi PPKM Darurat hingga PPKM level 3 dan 4 dilakukan melalui penguatan tiga aspek, yaitu komunikasi publik, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Komunikasi Publik

1

Pada aspek komunikasi publik, Kementerian Kominfo terus melakukan diseminasi informasi terkait PPKM melalui berbagai kanal, seperti: aktivitas kanal media konvensional, konferensi pers harian selama masa PPKM Darurat dan PPKM Level 3 dan 4, amplifikasi informasi melalui media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan lainnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo secara juga proaktif, melalui tim AIS melakukan pemantauan disinformasi, malinformasi, dan hoaks yang beredar di jagad digital selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Hal ini tentunya dimaksudkan agar informasi yang sampai ke publik terkait kebijakan PPKM adalah informasi yang bermanfaat, edukatif, efektif, dan efisien.

Agar komunikasi kebijakan publik pemerintah terkait PPKM dan perkembangan Covid-19 sampai kepada publik, serta dalam rangka mendukung kebijakan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), serta Satuan Tugas Covid-19 telah menyiapkan sistem informasi satu pintu, yaitu melalui *Digital Center* PPKM Darurat.

Pemanfaatan Teknologi

2

Pandemi Covid-19, alih-alih menghalangi laju perkembangan teknologi di Indonesia, justru merupakan momentum transformasi digital. Untuk itu, Kementerian Kominfo pada masa PPKM ini terus memantau perkembangan teknologi dari hulu ke hilir.

Di hulu, Kementerian Kominfo memantau traffic penggunaan internet melalui upaya monitoring *base transceiver station* (BTS).

Kementerian Kominfo juga aktif memantau *quality of service* (QoS) dan *quality of experience* (QoE) layanan operator seluler (opsel) serta berkoordinasi dan berkoordinasi untuk mengoptimalkan layanan. Sedangkan dari hilir, Kementerian Kominfo memastikan platform-platform digital, seperti e-commerce agar tetap berfungsi maksimal dalam mendukung aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pembatasan sosial saat ini.

Salah satu gebrakan Kementerian Kominfo di tengah pandemi adalah meng-upgrade fungsi-fungsi pada platform digital PeduliLindungi untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19 nasional, pemantauan situasi zonasi risiko Covid-19 di seluruh Indonesia, serta penguatan layanan telemedis yang bekerja sama dengan berbagai mitra platform digital.

Menurut Menkominfo, penguatan layanan *telemedicine* di aplikasi PeduliLindungi bekerja sama dengan mitra platform digital. Salah satunya penambahan fitur pindai QR Code *check-in* bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dan mengakses fasilitas publik.

Menteri Johnny pun menambah bahwa melalui penambahan fitur-fitur tersebut, masyarakat turut berperan aktif memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemutakhiran kebijakan penanganan Covid-19.

Aplikasi PeduliLindungi juga akan mengintegrasikan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen, dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dilakukan laboratorium, serta fasilitas pelayanan kesehatan di pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta secara *real-time*. Dengan demikian, aplikasi PeduliLindungi sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi seperti *Electronic Health Alert* (e-HAC), Kartu Vaksinasi Covid-19, dan hasil pemeriksaan RDT Antigen dan PCR yang dapat divalidasi oleh petugas bandar udara di counter *check in* bagi penumpang transportasi udara.

Menteri Johnny berharap sarana dan prasarana fasilitas publik di perkotaan juga bisa memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi untuk mengatur kunjungan dan tahapan aktivitas masyarakat, seperti ke restoran dan lain sebagainya. Hal itu dapat bermanfaat suatu saat nanti apabila aktivitas masyarakat kembali normal setelah kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali.

Koordinasi Lintas Stakeholders

3

Menyadari bahwa kebijakan PPKM hanya akan berhasil apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, maka Kementerian Kominfo juga melakukan koordinasi lintas *stakeholders* atau pemangku kepentingan dan mendorong optimalisasi jaringan *pentahelix*, yaitu sinergitas antara pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media, dalam menyukseskan implementasi PPKM di tengah masyarakat.

Sinergi Pentahelix dalam Mewujudkan Herd Immunity

Telah dijelaskan bahwa Kementerian Kominfo, dalam mendukung kebijakan PPKM, terus mendorong dan memantau optimalisasi jaringan *pentahelix*. Hal ini dirasakan begitu penting, karena Menteri Johnny melihat betapa peran dari masing-masing *stakeholders* sangat menentukan suksesnya tujuan kebijakan publik pemerintah. Berikut peran dari masing-masing mitra *pentahelix* pemerintah:

Pertama, Media. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satu masalah yang sudah menjadi lagu lawas ialah disinformasi dan hoaks. Ini semacam duri dalam daging bagi implementasi penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kominfo selalu membangun sinergi dengan berbagai platform media untuk memastikan bahwa informasi yang sampai kepada publik, adalah informasi yang benar, berguna, dan mencerahkan. Aspek inilah yang membuat kehadiran media menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan *herd immunity*. Tanpa amplifikasi media, pemerintah akan sulit menjangkau publik yang lebih luas.

Kedua, Akademisi. Tugas akademisi adalah mencerahkan, bukan menyesatkan. Menyadari hal ini, Kementerian Kominfo terus bersinergi dengan para akademisi guna membantu pemerintah dalam suksesi *herd immunity*. Di sini, akademisi juga hadir untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi ilmiah kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (*prokes*), sembari terlibat aktif dalam program vaksinasi nasional.

Ketiga, Swasta. Pemerintah menyadari bahwa pihak swasta adalah salah satu yang sangat terdampak secara ekonomi, ketika pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Namun, demi keselamatan masyarakat Indonesia, saat ini pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mematuhi aturan-aturan yang termaktub dalam PPKM.



Sumber: ANTARA Foto

Berkaca pada aturan PPKM Darurat, perintah mewajibkan aturan *full Work from Home* (WFH) bagi sektor perkantoran non esensial. Sedangkan bagi sektor perkantoran yang masuk kategori esensial, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran berupa kebijakan sebagian *Work from Office* (WFO). Sektor esensial yang dimaksud antara lain: keuangan dan perbankan (hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan), pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi (meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat), perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Sementara itu untuk sektor ekonomi lainnya seperti warung makan hanya boleh menerima pesanan *take away*.

Keempat, Masyarakat. Sebagai sasaran kebijakan publik, Menteri Johnny senantiasa berharap dan mendorong masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

"Keberhasilan kita bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan menjadi kunci penting untuk memutus rantai Covid-19, tidak akan pernah bosan itu kita sampaikan. Peran serta dan peran aktif masyarakat sangat penting dan menentukan kecepatan kita mengakhiri pandemi Covid-19," tutur Menteri Johnny Plate.

Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa kebijakan PPKM sejatinya tidak menghambat upaya vaksinasi oleh pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Tentunya, kerja sama semua pihak untuk mengambil bagian dalam program vaksinasi akan menentukan mencapai *herd immunity*.

Beragam Fitur Terbaru Aplikasi PeduliLindungi



...pemerintah membuat dashboard *tracing*, *tracking* dan *fencing* yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. *Tracing* dan *tracking* berfungsi untuk melihat pengguna yang pernah memiliki kontak dekat dengan pasien positif. Sedangkan *dashboard fencing* berfungsi untuk melihat pergerakan orang dalam karantina mandiri



Memanfaatkan kecanggihan teknologi di tengah pandemi Covid-19 merupakan salah satu pilihan paling penting. Selain untuk memudahkan komunikasi daring dengan berbagai platform digital, ekosistem teknologi termutakhir sangat membantu pencegahan, mengurangi penularan hingga memutus mata rantai penyebaran wabah sampai ke akar-akarnya. Menyadari pentingnya peran teknologi, pemerintah menggandeng tangan-tangan kreatif anak bangsa untuk menciptakan pelbagai aplikasi dan fitur-fitur pendukung lewat kecanggihan teknologi untuk melawan pandemi Covid-19. Salah satu aplikasi yang dicetuskan adalah PeduliLindungi.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020 lalu, pemerintah mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dan saling membagikan data lokasinya saat melakukan perjalanan. Hal itu agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita atau pasien Covid-19 dapat dilakukan.

PeduliLindungi memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan oleh setiap penggunanya, misalnya untuk mendapatkan notifikasi jika pemegang gadget berada di lingkungan keramaian atau zona merah Covid-19. Apabila seseorang yang terjangkit virus berada di lingkungan kelurahan atau desa tertentu, akan ada notifikasi atau informasi dari PeduliLindungi jika ada orang yang terinfeksi positif Covid-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melalui keterangan resminya pada tanggal 15 Juni 2020 mengatakan bahwa, pemerintah

membuat *dashboard tracing*, *tracking* dan *fencing* yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. *Tracing* dan *tracking* berfungsi untuk melihat pengguna yang pernah memiliki kontak dekat dengan pasien positif. Sedangkan *dashboard fencing* berfungsi untuk melihat pergerakan orang dalam karantina mandiri. Jika seseorang melewati batas karantina sampai dengan 500 meter, pengguna langsung terlihat dalam dashboard tersebut.

Fitur lain yang dikembangkan dalam aplikasi PeduliLindungi adalah dengan menambahkan QR Code pada *diary* perjalanan digital pengguna, yang ditujukan bagi WNI dan WNA yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, juga ada fitur registrasi hasil *rapid test* dan *swab test*, dan fitur Face Recognition untuk pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker.

Aplikasi PeduliLindungi hadir atas kerja sama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta berbagai institusi yang terkait. Hingga saat ini, aplikasi yang telah diunduh lebih dari 5 juta pengguna itu mengambil peran aktif dalam membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19, informasi zonasi dan notifikasi keramaian, dan pemeriksaan kesehatan.

Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo bersama pihak-pihak terkait terus melakukan pembaharuan dengan menyediakan lebih banyak lagi fitur-fitur dalam mendukung program dan kebijakan nasional terkait pencegahan pandemi Covid-19.

Registrasi Vaksin

Pada bulan Februari 2021, Menkominfo Johnny G. Plate mengumumkan bahwa masyarakat yang telah melakukan vaksinasi, baik tahap pertama dan tahap kedua, bisa melakukan registrasi dan mendapatkan sertifikat Vaksin Covid-19 pada aplikasi PeduliLindungi yang dapat diunduh secara digital.

Untuk mendapatkan sertifikat Vaksin secara digital, peserta Vaksinasi terlebih dahulu melakukan registrasi ulang Vaksinasi Covid-19 dengan mengisi data diri Nomor Induk Penduduk (NIK) dan nomor ponsel yang terdaftar.

Selanjutnya, peserta akan diminta mengecek data pribadi untuk validasi. Setelah melakukan registrasi, pengguna dapat mengunduh sertifikat vaksin dengan melakukan langkah-langkah sederhana.



Jika mengakses PeduliLindungi menggunakan ponsel, pengguna cukup membuka aplikasi PeduliLindungi dan mengunjungi laman “Akun” untuk proses awal. Setelah itu, pilih menu “Sertifikat Vaksin” dan akan muncul nama pengguna. Bagi peserta yang telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan kedua, sertifikat vaksin akan tersedia secara terpisah pada menu layar. Kemudian, klik gambar sertifikat dengan keterangan “Vaksin Pertama” dan “Vaksin Kedua” untuk mengikuti langkah akhir “Unduh Sertifikat”.

Perlu diketahui, setelah mendapatkan sertifikat vaksin secara digital, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengimbau dan melarang masyarakat tidak mengedarkannya di media sosial. Karena dalam sertifikat digital itu terdapat data pribadi yang harus dilindungi seperti NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan QR Code.

Selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali dari tanggal 3 – 20 Juli 2021, sertifikat Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu syarat perjalanan jarak jauh. Sehingga pelaku perjalanan tidak hanya menyiapkan hasil tes PCR atau hasil tes swab antigen saja. Melalui sertifikat Vaksinasi Covid-19 untuk syarat perjalan diyakini dapat mengurangi mobilitas perjalanan dan mengurangi angka penularan Covid-19.

Scan QR Code

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai sertifikat Vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu persyaratan baru bagi pelaku perjalanan. Fitur lain yang diperbaharui pada aplikasi PeduliLindungi adalah Scan QR Code *check in* bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dan mengakses fasilitas publik. Fitur tersebut juga dihadirkan guna mendukung kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan fitur QR



Code pada aplikasi PeduliLindungi sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menekan risiko penyebaran virus.

Melalui scan QR Code di setiap pintu masuk lokasi, pihak pengelola lokasi dapat mengatur kepadatan pengunjung. Menkes menegaskan aplikasi ini juga digunakan untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan. Upaya tersebut sebagai bagian dari langkah tegas dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, fitur QR Code juga sangat membantu dalam penguatan *test*, *tracing* dan *treatment* atau 3T yang secara konsisten dijalankan oleh pemerintah. Sehingga *tracking* dan *tracing* melalui pemanfaatan teknologi digital, tidak hanya mempermudah masyarakat untuk melakukan pelaporan, tetapi juga terdapat banyak manfaat yang bisa diimplementasikan.

Integrasi dengan e-HAC

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, aplikasi PeduliLindungi telah terintegrasi dengan aplikasi *electronic Health Alert Card* (e-HAC) dari Kementerian Kesehatan dan beberapa persyaratan penerbangan lainnya. Menurut Menteri Johnny, fitur-fitur tersebut membantu memudahkan setiap pengguna agar terhindar dari penularan Covid-19.

“Aplikasi PeduliLindungi yang sudah berintegrasi dengan aplikasi e-HAC, kartu Vaksinasi Covid-19, dan hasil pemeriksaan antigen dan PCR dapat divalidasi oleh petugas bandar udara di counter *check in* bagi penumpang transportasi udara,” ujarnya.

Sebelum pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali, aplikasi e-HAC dari Kementerian Kesehatan ini telah banyak membantu



Sumber foto: Freepik



masyarakat dan petugas bandara dalam memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan pelaku perjalanan. Bagi yang hendak melakukan perjalanan udara diwajibkan mengisi data diri dan keterangan sehat di kota asal. Setelah sampai di kota tujuan, setiap penumpang juga wajib mengisi beberapa persyaratan penting seperti data pribadi, riwayat perjalanan, jenis kendaraan dan nomor kursi, jam tiba dan alamat lengkap tujuan.

Diary Perjalanan

Saat mengoperasikan aplikasi PeduliLindungi, pengguna juga dapat memantau perkembangan persebaran Covid-19 di wilayah tempatnya berada dengan mengakses fitur *Diary Perjalanan*. Dalam fitur tersebut, kita dapat mengetahui jumlah kasus terkonfirmasi, suspect dan kontak erat yang di-update setiap harinya, dimulai dari wilayah tingkat kelurahan, kota hingga provinsi domisili.

"Melalui penambahan fitur-fitur tersebut masyarakat turut berperan aktif memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemutakhiran kebijakan penanganan Covid-19," jelas Menteri Johnny.

Menkominfo Johnny G. Plate meyakini fitur-fitur terbaru dalam aplikasi PeduliLindungi membantu masyarakat selama melaksanakan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat diharapkan agar pemanfaatan

teknologi digital dimaksimalkan untuk memutus rantai Covid-19 dapat berjalan dengan baik.

Jika masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan berbagai ekosistem teknologi untuk melakukan aktifitas di tengah pandemi Covid-19, pemerintah optimis dan bertekad dapat mengakhiri penyebaran wabah dengan cepat. Oleh karena itu, kekuatan masyarakat dalam mematuhi setiap peraturan dan kebijakan sangat efektif untuk Indonesia kembali pulih dan bangkit.

Wujudkan *Herd Immunity* di Indonesia

Kementerian Kominfo Lawan Virus Covidiot dan Infodemi



Ada tiga isu utama yang ditemukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pandemi Covid-19, yaitu: infodemi Covid-19, infodemi vaksin Covid-19, dan covidiot PPKM Darurat.

Persebaran virus covidiot dan virus infodemi jauh lebih cepat daripada Covid-19. Bila terus dibiarkan, maka hal ini akan membuat tujuan pemerintah dalam mewujudkan *herd immunity* semakin sulit diwujudkan”

Sejak *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) menyerang Indonesia, pemerintah pun dengan sigap memberlakukan berbagai aturan mulai dari pemberlakuan PSBB, PPKM, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3 dan 4. Dalam proses pengimplementasiannya, pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan (prokes), seperti pembatasan aktivitas kerumunan masyarakat, *social distancing*, *physical distancing*, mencuci tangan, memakai masker di luar rumah, dan lain sebagainya. Di samping itu, pemerintah Indonesia tampaknya terus bergerilya untuk mengimplementasikan program percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Tak ayal semuanya dilakukan untuk mewujudkan *herd immunity*. Lantas, apa itu *herd immunity*?

Mengutip laman Kementerian Kesehatan, *herd immunity* merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Dampak langsung dari *herd immunity* ialah terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. Dalam konteks Covid-19, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa *herd immunity* ditandai dengan vaksinasi penuh terhadap setidaknya 60-70% populasi. Apabila *herd immunity* sudah tercapai dan rantai penularan Covid-19 sudah terputus, maka aktivitas dan mobilitas masyarakat bisa kembali dibuka secara perlahan.

Namun sayangnya, di tengah upaya pemerintah untuk menekan laju perkembangan Covid-19, muncul dua virus baru

yang lebih cepat penyebarannya daripada Covid-19. Dua virus yang dimaksud adalah covidiot dan infodemi. Kedua virus ini merupakan penghalang utama bagi pemerintah dalam mengimplementasikan program vaksinasi nasional, sehingga *herd immunity* tampaknya masih “jauh panggang dari api.”

Vaksinasi di Indonesia dan Target *Herd Immunity*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bahwa *herd immunity* di Indonesia harus dapat tercapai pada Desember 2021. Melanjutkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa *herd immunity* di Indonesia bisa tercapai apabila 70 persen populasi sudah ikut vaksinasi Covid-19.

"Jadi kalau jumlah vaksinnya kita bisa mencapai 70 persen dari 363 juta. Karena kita butuhnya 363 juta dosis suntikan, 363 juta kali 70 itu sekitar 260-270 juta dosis vaksin itu mungkin baru akan bisa dicapai di bulan Oktober. Jadi, di bulan Oktober kita baru di jumlah available, di kita sejumlah 70 persen dari 181,5 juta orang," kata Menkes dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR secara daring pada 5 Juli 2021.

Tentunya kecepatan vaksinasi akan menentukan waktu suatu negara, termasuk Indonesia untuk mencapai *herd immunity*. Namun, tren vaksinasi Covid-19 di Indonesia boleh dikatakan masih naik-turun. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi waktu Indonesia untuk mencapai *herd immunity*.

Mengutip catatan *Our World in Data*, rata-rata tujuh harian vaksinasi Covid-19 di Indonesia sempat di atas 1 juta dosis per hari selama dua hari yaitu 19 dan 20 Juli 2021. Namun sehari kemudian langsung turun lagi menjadi 671.041 dosis. Penurunan dosis vaksinasi ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah masyarakat yang enggan mengikuti program vaksinasi Covid-19. Tentunya keengganan masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor juga. Namun dua faktor yang cukup signifikan adalah covidiot dan infodemi.



Virus Berbahaya: Covidiot dan Infodemi

Wabah Covid-19 memang merupakan virus yang cukup berbahaya bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadi semakin berbahaya karena masyarakat tampak belum begitu antusias mengikuti vaksin Covid-19, bahkan tidak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan, seperti efek samping yang berbahaya hingga vaksin yang tidak halal. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ada dua hal berbahaya yang turut menyebabkan tren penurunan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, yaitu covidiot dan infodemi.

Covidiot adalah gabungan dari kata "Covid-19" dan "idiot". Menurut laman *Urban Dictionary*, covidiot

memiliki dua arti, yaitu: **pertama**, orang yang mengabaikan peringatan terkait kesehatan atau keselamatan publik. **Kedua**, orang yang menimbun barang-barang, tidak memberikannya kepada tetangga.

Kata covidiot pada awalnya muncul dan berkembang di media sosial Twitter. Kata ini menjadi bentuk kegeraman netizen ketika melihat beberapa orang tidak peduli pada aturan *social distancing* dan *physical*

Covidiot adalah gabungan dari kata "Covid-19" dan "idiot". Menurut laman Urban Dictionary, covidiot memiliki dua arti, yaitu: pertama, orang yang mengabaikan peringatan terkait kesehatan atau keselamatan publik. Kedua, orang yang menimbun barang-barang, tidak memberikannya kepada tetangga.

distancing, serta menolak imbauan pemerintah untuk tetap di rumah. *Urban Dictionary* juga memberi contoh penggunaan kata *covidiot* dalam kalimat, seperti: "*Lihat covidiot yang beli 300 gulung tisu toilet itu?*" atau "*Covidiot itu memeluk semua orang yang dilihatnya.*" Secara umum dapat dikatakan bahwa *covidiot* adalah "orang bodoh yang dengan keras kepala mengabaikan aturan *social distancing*, sehingga membantu penyebaran Covid-19."

Fenomena *covidiot* sangat nampak di Indonesia. Sejak Pemerintah mengeluarkan aturan PSBB, PPKM, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3 dan 4, tampak masih banyak masyarakat yang mengabaikan dan terus melakukan mobilisasi. Hal ini tentunya akan mempercepat penularan Covid-19. Karena bisa jadi

walaupun merasa sehat, seseorang bisa saja menjadi "*invisible carrier*" yang membawa virus dan menularkannya ke orang lain jika dia berkeliaran di jalan.

Tak dimungkiri bahwa *covidiot* merupakan salah satu halangan bagi Pemerintah dalam mewujudkan *herd immunity*. Betapa tidak, ketika negara memberlakukan aturan PPKM, justru peningkatan kasus positif Covid-19 terus terjadi secara signifikan hingga pada bulan Juli 2021 ini, Indonesia menduduki puncak klasemen positif Covid-19 di dunia. Secara logika dapat dikatakan bahwa Indonesia masih ada begitu banyak *covidiot* yang mengabaikan aturan PPKM dari Pemerintah.

Selain *covidiot*, permasalahan lain yang juga mengancam kesuksesan pemerintah dalam mewujudkan *herd*

immunity di Indonesia adalah virus infodemi. Menurut WHO, infodemi adalah upaya yang disengaja untuk menyebarkan informasi yang salah untuk merusak respons kesehatan masyarakat dan memajukan agenda alternatif kelompok atau individu. Secara etimologi infodemi merupakan gabungan dari kata informasi dan pandemi. Kata infodemi merujuk pada sesuatu yang bergerak sangat cepat dan menyebar cukup luas mengenai hal-hal yang bersifat tidak akurat seperti hoaks, disinformasi, bahkan malinformasi.

Berikut data infodemi Covid-19 periode 23 Januari 2021 hingga 22 Juli 2021 yang dikumpulkan tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo):

Penanganan Sebaran Isu Hoaks Covid-19 Periode 23 Januari - 23 Juli 2021

Temuan Isu Hoaks Covid-19	Diseminasi ke Kementerian/ Lembaga dan Masyarakat	Pengajuan Takedown		Penegakan Hukum
		Total Sebaran	Ditindaklanjuti (Taks Down)	
1.786	1.786	3.949	3.488	767

Pengajuan Takedown Sebaran Hoaks Covid-19 di Media Sosial				
	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Taks Down)	Sedang Ditindaklanjuti
facebook 	3.314	3.314	2.942	372
instagram 	32	32	28	4
twitter 	554	554	473	81
youtube 	49	49	45	4
Total	3.949	3.949	3.488	461

Penegakan Hukum Hoaks Covid-19 Operasi Satgas Aman Nusa II POLRI

1. Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut		
No.	Tindak Lanjut	Jumlah
1	Limpah Subdit Dittipidsiber	5
2	Limpah Polda	11
3	Restoratif Justice	2
4	Blokir	42
5	Pendalaman	707
TOTAL		767

2. Berdasarkan Issue pada Konten		
No.	Issue	Jumlah
1	Terkait Vaksin Covid-19	215
2	Terkait PPKM Covid-19	533
3	Terkait HET Obat Covid-19	19
TOTAL		767

Keterangan:

Penegakkan hukum kasus berita bohong/hoaks terkait Covid-19 pada POLRI sd 15 Juli 2021

3. Berdasarkan Platform		
No.	Platform	Jumlah
1	Facebook	432
2	Instagram	135
3	Twitter	150
4	Youtube	12
5	Tiktok	6
6	WhatsApp	13
7	Telegram	1
8	Website Lainnya	18
TOTAL		767

4. Berdasarkan Jenis Kejahatan		
No.	Kejahatan	Jumlah
1	Berita Bohong / Berita Palsu	554
2	Menghasut U/Pidana, Kekerasan	35
3	Pencemaran Nama Baik	11
4	Pemerasan Daring	0
5	Penipuan Daring	12
6	Ujaran Kebencian / SARA	148
7	Pengancaman Daring	1
8	Manipulasi Data	4
TOTAL		765

5. Berdasarkan Satuan Kerja		
No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	DITTIPIIDSIBER	99
2	POLDA ACEH	117
3	POLDA SUMBAR	4
4	POLDA JAMBI	5
5	POLDA RIAU	10
6	POLDA BENGKULU	2
7	POLDA METRO JAYA	92
8	POLDA BANTEN	31
9	POLDA JATENG	15
10	POLDA JATIM	180
11	POLDA DIY	19
12	POLDA BALI	124
13	POLDA KALTARA	6
14	POLDA KALSEL	3
15	POLDA KALBAR	3
16	POLDA KALTENG	28
17	POLDA SULBAR	8
18	POLDA SULTRA	6
19	POLDA SULUT	13
20	POLDA MALUKU	2
TOTAL		767

PENANGANAN PERSEBARAN KONTEN HOAKS VAKSIN COVID-19

Periode 22 Juli 2021 (Pukul 06.00 WIB)

TEMUAN
HOAKS VAKSIN
COVID-19:

259

PLATFORM DIGITAL	Sebaran	Takedown
 Facebook	1.702	1.702
 Instagram	11	11
 Twitter	99	99
 Youtube	41	41
 TikTok	17	17
Total :	1.870	1.870

Tim AIS menemukan total 1.786 kasus infodemi Covid-19 untuk periode 23 Januari - 22 Juli 2021. Dari jumlah ini, ditemukan bahwa terdapat sebanyak 3.949 kasus persebaran di seluruh kanal media sosial. Dari 3.949 persebaran, Kominfo telah melakukan pemblokiran atau *take down* terhadap 3.488 konten dan 767 konten yang diteruskan ke ranah hukum.

Berdasarkan persebarannya, tampak bahwa Facebook menjadi kanal persebaran infodemi terbanyak dengan 3.314 kasus dengan jumlah 2.942 kasus yang di-*take down* dan 372 kasus yang sedang dalam proses pendalaman dan *tracing* persebaran. Pada urutan kedua terdapat kanal media sosial Twitter dengan total 554 kasus infodemi, yang mana terdapat 473 kasus di-*take down* dan 81 kasus yang masih dalam proses pendalaman dan *tracing* persebaran. Selanjutnya Youtube dengan 49 kasus infodemi, dengan 45 kasus yang di-*take down* dan 4 kasus yang masih dalam proses pendalaman dan *tracing* persebaran. Pada urutan terakhir terdapat Instagram dengan 32 kasus infodemi, dengan 28 kasus di-*take down* dan 4 kasus yang masih dalam proses pendalaman dan *tracing* persebaran.

Selain data mengenai infodemi Covid-19, Tim AIS juga melakukan *tracing* terhadap infodemi vaksin Covid-19. Pada tanggal 22 Juli 2021, Tim AIS menemukan 259 kasus infodemi vaksin Covid-19. Temuan ini membuat total infodemi vaksin Covid-19 dari 23 Januari hingga 22 Juli 2021 menjadi 1.870 kasus. Sama seperti infodemi Covid-19, infodemi mengenai vaksin Covid-19 juga paling banyak tersebar di platform Facebook dengan jumlah 1.702 kasus. Selanjutnya 99 kasus infodemi di Twitter, 41 kasus infodemi di Youtube, 17 kasus infodemi di Tik Tok, dan 11 kasus infodemi di Instagram.

Infodemi yang seringkali muncul pada masa pandemi Covid-19, antara lain: Covid-19 termasuk bagian dari konspirasi dunia atau Covid-19 sebenarnya tidak ada, vaksin Covid-19 justru membuat orang terkena Covid-19, hingga malinformasi tentang Nakes dan alat pemeriksa Covid-19 yang sengaja meng-covid-kan orang. Hal-hal inilah yang membuat masyarakat menjadi abai dan tidak peduli mengenai bahayanya virus tersebut.

Infodemi ini tentunya dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental masyarakat, meningkatkan stigmatisasi masyarakat terhadap pemerintah, yang bermuara pada kepatuhan yang buruk terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya juga mengurangi efektivitas dan efisiensi upaya negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Apalagi Indonesia saat ini tengah berjuang melakukan vaksinasi massal guna mewujudkan *herd immunity*. Tak mengherankan jika Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Konferensi Keamanan di Munchen, Jerman, 2020 lalu, menyatakan bahwa yang sedang dihadapi sebenarnya adalah infodemi dan bukan pandemi.

Langkah Kementerian Kominfo Hadapi Covidiot dan Infodemi

Ada tiga isu utama yang ditemukan Kementerian Kominfo terkait pandemi Covid-19, yaitu: infodemi Covid-19, vaksin Covid-19, dan covidiot masyarakat dalam melaksanakan PPKM Darurat. Persebaran virus covidiot dan virus Infodemi jauh lebih cepat daripada Covid-19. Bila terus dibiarkan, maka hal ini akan membuat tujuan pemerintah dalam mewujudkan *herd immunity* semakin sulit diwujudkan.

Dalam rangka menghadapi covidiot dan infodemi tersebut, Kementerian Kominfo, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), serta Satuan Tugas Covid-19 telah menyiapkan sistem informasi satu pintu, yaitu melalui *Digital Center* PPKM Darurat. Menghadapi covidiot, Kementerian Kominfo terus melakukan diseminasi informasi terkait aturan-

aturan PPKM level 3 dan 4 dan sanksinya kepada publik semasif mungkin dan memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat "akar rumput."

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate juga senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan *social distancing*, *physical distancing*, dan mempraktikkan prokes 5, sembari mendukung percepatan vaksinasi Covid-19. Menteri Johnny juga senantiasa memberikan pencerahan publik bahwa dalam mengatasi permasalahan seputar Covid-19, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik tersebut.

Sementara itu dalam menghadapi infodemi, Kementerian Kominfo juga melakukan pengendalian informasi secara positif informasi-informasi publik yang baik dan benar, mengingat ada begitu banyak hoaks, disinformasi, dan malinformasi yang terus menyebar bahkan lebih cepat dari penyebaran Covid-19. Dalam upaya ini, Kementerian Kominfo juga bersinergi dengan lintas Kementerian dan Lembaga dalam hal verifikasi dan klarifikasi informasi hoaks, disinformasi, dan malinformasi.

Kementerian Kominfo secara juga selalu proaktif dalam menghadapi covidiot dan infodemi. Melalui Tim AIS dari Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Kementerian Kominfo, perlawanan terhadap covidiot, lebih-lebih infodemi terus dilakukan. Dalam hal ini, Tim AIS Kementerian Kominfo melakukan pemantauan dan *tracing* konten-konten disinformasi, malinformasi, dan hoaks yang beredar di jagad digital selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tugas tim AIS adalah memantau secara penuh aktivitas jagad maya dan

mengumpulkan konten-konten hoaks, disinformasi, dan malinformasi yang beredar untuk kemudian diklarifikasi kebenarannya kepada publik.

Pada tahap amplifikasi, Kominfo menggunakan berbagai kanal, seperti: aktivitas kanal media konvensional, konferensi pers harian selama masa PPKM Darurat dan PPKM Level 3 dan 4, amplifikasi informasi melalui media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang sampai ke publik terkait kebijakan PPKM adalah informasi yang bermanfaat, edukatif, efektif, dan efisien. Lebih dari itu, hal ini ditujukan untuk mendorong kesadaran masyarakat supaya taat aturan PPKM serta berani mengikuti vaksin Covid-19, sehingga tujuan mewujudkan *herd immunity* di Indonesia bisa tercapai pada Desember 2021.

Melihat banyaknya konten infodemi yang berseliweran di jagad maya, Menteri Johnny juga saat bertemu dengan para pimpinan platform media sosial, Minggu (18/7/2021), meminta seluruh platform media sosial,

seperti facebook, twitter, instagram, youtube, dan lain sebagainya, untuk lebih bekerja keras dalam menangkal hoaks, disinformasi, dan malinformasi seputar Covid-19.

"Penyebaran berita bohong sangat memengaruhi pemikiran manusia, yang menjadi taruhan adalah nyawa saudara-saudari kita sebangsa Indonesia. Sudah banyak yang jadi korban dari penyebaran infodemi yang kian masif ini, kita tidak boleh menyerah kalah," tuturnya.

Menteri Johnny juga meminta semua platform digital untuk lebih proaktif dalam melakukan penanganan konten hoaks, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. (Emild Kadju)

Pandemi Covid-19 dan Komunikasi Publik



Oleh:
JH Phillip Gobang
Staf Khusus Menkominfo
Bidang Komunikasi Politik

Fortiter in re, suaviter in modo – teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Ungkapan Latin ini setidaknya tercermin dalam pernyataan Presiden Joko Widodo baru-baru ini yang mengingatkan seluruh aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk tidak bersikap keras dan kasar. Menurutnya, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.

Presiden secara terbuka merespons cara yang dilakukan para aparat dalam penerapan PPKM Darurat. Di beberapa daerah terjadi protes warga terhadap tindakan aparat yang terlihat keras dan kasar dalam penertiban sosial. Karenanya, Presiden meminta untuk mengevaluasi pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyekatan di jalan-jalan. Presiden juga meminta agar ada kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan tersebut. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker, menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu berkaitan dengan upaya bersama pemerintah dan masyarakat menangani pandemi Covid-19 yang kini memasuki bulan keenambelas. Menghadapi situasi darurat saat ini, komunikasi publik pemerintah adalah hal yang sangat penting. Komunikasi adalah esensi manajemen krisis. Situasi krisis adalah situasi yang berpotensi menyebabkan gangguan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Psikoterapis Anthony de Mello SJ, menjelaskan adanya kaitan antara kepanikan publik dengan peningkatan jumlah korban suatu wabah. Menurutnya, korban wabah bisa menjadi lima kali lipat, jika terjadi kepanikan saat wabah. Dengan kata lain, jika terdapat seribu kematian akibat wabah, maka akan ada empat ribu kematian akibat kepanikan. Dari sisi kesehatan diungkapkan bahwa panik yang berlebihan menghadapi Covid-19 dapat memicu gejala psikosomatik.

Dalam konteks itu, komunikasi menjadi urat nadi dalam manajemen krisis pandemi Covid-19. Kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak panik, sehingga penanganan pandemi dapat berjalan lancar. Tujuan dari komunikasi publik, yaitu pertama, menciptakan masyarakat yang tenang dan paham apa yang harus dilakukan. Kedua, membangun persepsi

masyarakat bahwa negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis. Tujuan itu akan tercapai jika terbangun persepsi publik bahwa pemerintah mampu menangani masalah. Masyarakat akan tenang bila yakin pemerintah terbuka terhadap usul solusi dan saran objektif masyarakat.



Distorsi Infodemi

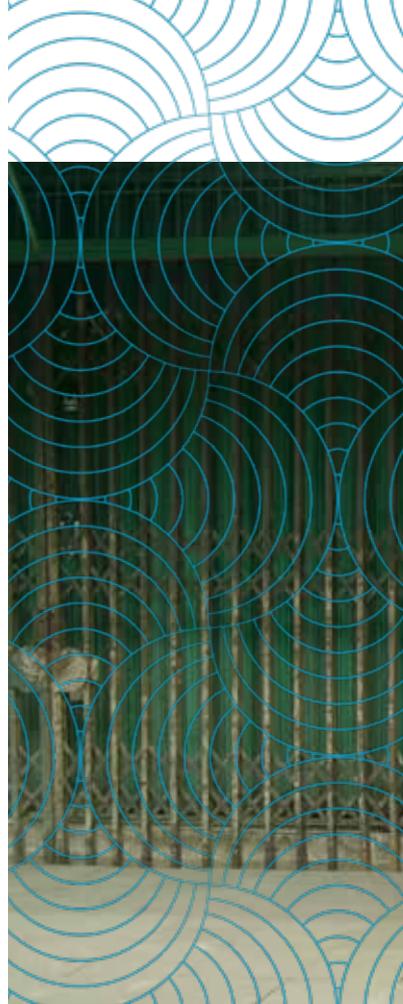
FAKE NEWS FAKE NEWS

Saat ini media sosial adalah medium komunikasi utama yang menggantikan interaksi tatap muka. Realitas informasi dunia maya bahkan dianggap realitas nyata. Dengan semakin masifnya penggunaan media sosial, muncul fenomena infodemi yang menyita perhatian publik di tengah upaya keras pemerintah dan berbagai pihak mengatasi pandemi Covid-19. Secara luas, infodemi dikategorikan sebagai misinformasi atau berita palsu/fake news terkait suatu wabah/pandemi yang menyebar dengan cepat dan meluas/viral di dunia maya melalui aplikasi media sosial.

Infodemi dapat dikenali dalam tiga hal, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi terkait informasi-informasi yang awalnya tidak diniatkan untuk menimbulkan kekacauan, tetapi berkembang menjadi informasi yang mengacaukan. Dalam disinformasi si penyebar informasi mengetahui bahwa informasinya salah. Namun disebarkan untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain. Sedangkan malinformasi dibuat oleh kelompok/orang tertentu dengan tujuan kriminal, phising dan pencurian informasi.

Dalam infodemi, tidak hanya virus yang menyebar dengan sangat cepat, tetapi juga disinformasi tentang wabah, misinformasi tentang vaksin atau hoaks/berita bohong, sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat. Viralitas informasi keliru tentang pandemi Covid-19 di media sosial bahkan berakselerasi lebih cepat daripada penyebaran virusnya. Hal itu terlihat misalnya, mulai dari teori konspirasi liar, penyembuhan virus corona palsu, klaim vaksin palsu dan saran kesehatan yang berbahaya, penyebaran virus corona varian Delta karena vaksinasi, hingga penolakan PPKM Darurat di berbagai daerah.

Distorsi informasi ini berpotensi memicu penyebaran virus/penyakit, menghambat respons kesehatan efektif publik, memicu kejadian fatalistik, serta menimbulkan kebingungan, kepanikan dan ketidakpercayaan publik.



Menyikapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menginstruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoaks, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

Menurut Menteri Johnny, penyebaran berita bohong sangat memengaruhi pemikiran manusia dan mempertaruhkan nyawa saudara-saudari sebangsa Indonesia. Karenanya, penanganan terhadap infodemi perlu dilakukan secara serius, tidak main-main, dan tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa. Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan tidak boleh menyerah kalah.



Komunikasi Publik Kontekstual dan Holistik



Menghadapi maraknya infodemi yang mencemari ruang-ruang digital dan menimbulkan kerancuan informasi, kini diperlukan model pendekatan komunikasi publik yang kontekstual dan holistik. Yakni mengedepankan kolaborasi dan sinergitas multipihak dengan memperhatikan semua aspek sosial-ekonomi, kepentingan publik dan kearifan lokal. Tujuannya agar dapat memberikan dampak yang mendalam bagi publik, membangun hubungan harmonis pemerintah-publik, serta membuat komunikasi bersifat kontekstual dan sistemik.

Kolaborasi dan sinergitas ini melibatkan semua pihak terkait, seperti pemuka masyarakat, lembaga pendidikan (kampus, sekolah), lembaga keagamaan, institusi sosial, birokrasi lokal (RT, RW), dan sebagainya. Serta menggunakan kombinasi media digital dan konvensional dengan jalur komunikasi tradisional atau lokal, media massa, media sosial, aplikasi diskusi, dan jaringan inisiatif-kreatif hingga ke akar rumput.

Komunikasi publik holistik memfasilitasi informasi, dialog, menstimulasi partisipasi, pengambilan kebijakan dan pemberdayaan publik. Dalam upaya manajemen krisis, komunikasi publik pemerintah juga dimaksudkan untuk mendalami dan mengevaluasi respon publik.

Publik pun perlu terus-menerus disadarkan bahwa saat ini masih situasi 'perang' dan bukan kondisi normal. Kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan harus

terus diterapkan. Narasi tunggal yang disampaikan harus mampu mengikat elemen masyarakat untuk bergerak bersama melakukan tindakan preventif dan penanganan pandemi Covid-19.

Komunikasi publik kontekstual juga dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman, yaitu menjaga mental masyarakat dari rasa gelisah, cemas, marah atau emosi lain yang berpotensi menimbulkan perilaku negatif. Kunci dari rasa aman adalah kepastian. Komunikasi yang konsisten dan terbuka, tidak ambigu atau tumpang tindih, kebijakan satu data serta sinkronisasi pernyataan dengan kebijakan, adalah model komunikasi yang memberikan kepastian tersebut.

Rasa aman dan optimisme yang tumbuh, tidak hanya memberikan 'kekebalan' atau daya tahan masyarakat, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Termasuk menumbuhkan kekuatan masyarakat untuk melawan infodemi. Dengan begitu masyarakat dan bangsa Indonesia bisa melewati situasi pandemi Covid-19 ini dengan selamat sekaligus menata kehidupan peradaban baru yang lebih baik.



Kolaborasi Heptahelix, Kunci “Vaksinasi” Virus Infodemik

Oleh:
Devie Rahmawati
Tenaga Ahli Menkominfo Bid.
Komunikasi dan Media Massa



Bulan Agustus 2020 lalu, BBC Inggris sempat melansir sebuah berita tentang jatuhnya korban jiwa sedikitnya 800 orang selama 3 bulan pertama pandemi Covid-19 merebak, akibat berbagai misinformasi yang beredar. Studi lain yang dikeluarkan oleh *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* juga memperkirakan ada 5.800 orang harus berada di RS akibat kekeliruan informasi yang menyebar di media sosial dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Sebut saja informasi bahwa mengkonsumsi metanol atau produk pembersih yang mengandung alkohol akan mampu menghancurkan virus Covid-19. Tentu saja, data tersebut tidak merepresentasikan fenomena kematian yang sebenarnya. Karena diduga lebih banyak kematian yang tidak tercatat atau dilaporkan.

Menariknya, misinformasi yang sama juga mampu menembus batas negara. Sebut saja di Iran misalnya, dilaporkan juga kejadian kematian akibat korbannya juga mengkonsumsi produk beralkohol, karena keyakinan yang sama bahwa alkohol dapat menjadi pembunuh Virus Covid-19.

Gelombang tsunami misinformasi atau infodemik, namun lebih sering dikenal dengan istilah hoaks ini, tidak pandang bulu. Sebarannya menyerang bahkan masyarakat di negara-negara dengan tingkat pendidikan dan pendapatan tinggi di dunia, sebut saja Amerika Serikat. Tahun lalu, sebuah survei menyatakan bahwa 1 dari 4 orang Amerika percaya bahwa pandemi Covid-19 sengaja diciptakan. Keyakinan seperti ini yang kemudian mendorong kelompok anti vaksin di Amerika berhasil menyerang dan memaksa sebuah klinik vaksin di Los Angeles tutup, paling tidak selama satu hari. Lain lagi kejadian di Eropa, di mana beberapa menara pemancar jaringan selular dibakar oleh warga yang percaya bahwa Covid-19 disebabkan oleh sinyal jaringan 5G.

Masyarakat dunia, semenjak pandemi Covid-19 tahun 2020, tidak terkecuali Indonesia, kemudian dihadapkan pada tantangan untuk menanggulangi dua virus yaitu Covid-19 dan Virus Infodemik. Di mana serangan kedua virus ini juga melahirkan kelompok masyarakat

yang "OTG" (Orang Tanpa Gejala). Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa keputusan mereka untuk menunda bahkan menolak mengikuti protokol kesehatan maupun vaksin misalnya, karena pengaruh-pengaruh informasi yang mereka peroleh di berbagai media sosial. Mereka adalah "OTG" dari meresapnya hoaks dalam pikiran hingga perbuatan mereka.

Hal ini tentu saja menjadi momok dalam upaya dunia lepas dari jeratan pandemi. Untuk itu, dibutuhkan upaya melakukan "vaksinasi" masyarakat dari pengaruh infodemik. Jalan vaksinasi tersebut tentu saja ditempuh melalui edukasi agar masyarakat dapat mengelola dan mengkonsumsi informasi yang tepat, sehat dan aman untuk mereka. Diharapkan melalui literasi digital, masyarakat akan memiliki "antibodi" terhadap serangan infodemik.

Namun, penguatan literasi digital telah menjadi tantangan bagi banyak negara. Seiring cepatnya jumlah perangkat, akses, penetrasi dan inovasi teknologi digital, aspek literasi tertinggal jauh. Literasi digital tidak sekadar tahu cara mengakses, tetapi juga menjadi tanggap akan isu sosial di dunia digital. Sekaligus menjadi warga digital yang tangguh baik dalam pengetahuan, kecakapan, dan etika. Sebelum pandemi sekalipun, Indonesia sudah mengalami banyak sekali isu dunia digital seperti peretasan, perundungan siber, *phishing*, dsb. Modusnya kejahatan siber pun terus berkembang. Namun sayang, pemahaman atas apa dan bagaimana isu teknis dan sosial-kemanusiaan belum dijabarkan dan diterapkan dalam pendidikan kita.

Inilah kemudian yang mendorong Kominfo dan berbagai *stakeholder* untuk tidak tinggal diam dalam menangani isu tersebut. Kemenkominfo kemudian mengkoneksikan jejaring kepedulian dan gerakan gotong royong, dalam bingkai kerjasama Heptahelix (tujuh unsur) yang terdiri atas pemerintah, akademisi, swasta, media, komunitas, masyarakat sipil dan individu masyarakat. Embrio dari gotong royong ini sudah dimulai melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi semenjak tahun 2017 lalu. Pandemi 2020 kemudian semakin mengukuhkan kolaborasi ini dalam upaya melahirkan program yang semakin sistematis dan masif. Mengingat, seluruh masyarakat menjadi “mendadak digital”.

Kemenkominfo menilai bahwa untuk menghalau virus hoaks ini, yang kali pertama dibutuhkan ialah “panduan hidup” di ruang digital, yang diharapkan dapat menjadi “kompas” agar masyarakat tidak tersesat dalam pusaran hoaks. Maka, Kemenkominfo bergerak bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi yang sudah memiliki 115 mitra, dalam menyusun panduan untuk memahami dunia digital. Maka diluncurkanlah Empat Modul Literasi Digital oleh Kominfo, GNLD Siberkreasi dan Japelidi pada April 2021. Produk ini merupakan hasil gotong royong berbasis kepedulian atas isu-isu negatif di ruang digital. Literasi menjadi jawaban sekaligus kunci menyongsong generasi digital yang lebih baik.

Banyak negara telah menginisiasi perancangan dan penerapan literasi digital. Di negara-negara Uni Eropa, Korea Selatan, Amerika Serikat, dll. Pengolahan dan penyusunan literasi digital di banyak negara dimulai dari pemerintah. Sedangkan di Indonesia, pemerintah memfasilitasi multi-*stakeholder* yang tergabung dalam Gerakan Siberkreasi. Berbeda dari banyak negara yang cenderung *top-down* dalam penyusunan konsep dan praktek literasi digital. Indonesia menggunakan pendekatan *bottom-up*. Dengan kata lain, semua aspirasi, saran, dan pengalaman menjadi sebuah *body of knowledge* yang diwujudkan dalam kurikulum literasi digital ini.

Ada 4 pilar yang menjadi inti dari kurikulum Literasi Digital. Pertama adalah *Digital Skills* atau kecakapan digital. Lalu ada *Digital Culture* atau berbudaya digital. Kemudian *Digital Ethics* atau beretika digital,

Ada 4 pilar yang menjadi inti dari kurikulum Literasi Digital. Pertama adalah *Digital Skills* atau kecakapan digital. Lalu ada *Digital Culture* atau berbudaya digital. Kemudian *Digital Ethics* atau beretika digital, dan *Digital Safety* atau keamanan digital.

dan *Digital Safety* atau keamanan digital. Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Namun merupakan satu rangkaian saling mendukung. Netizen yang cakap berinternet sebaiknya memiliki norma dan netiket yang baik. Pun, mereka paham akan pentingnya keamanan saat berada di dunia digital. Dari tiap pilar diejawantahkan menjadi 4 modul yang juga saling melengkapi. Sehingga akan tercipta generasi yang kuat bukan saja dalam literasi, tetapi juga *best practice*. Dan sudah barang tentu dengan tetap memiliki karakter kuat nilai-nilai Pancasila. Inilah yang menjadi karakter khas kurikulum Literasi Digital di Indonesia.

Akses kepada kurikulum Literasi Digital diberikan secara gratis. Ke-4 modul dari kurikulum Literasi Digital ini menjadi panduan untuk pengguna dalam memaknai, mengimplementasi, dan mewujudkan sebuah *Digital Nation* yang berdaulat. Ke-4 modul tersebut adalah Cakap Bermedia Digital, Budaya Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Aman Bermedia Digital. Kembali, ke 4 modul ini adalah satu kesatuan yang utuh. Walau dalam penggunaannya, baik individu atau institusi dapat menerapkannya secara kontekstual.

Digital Nation yang ingin dicapai tersusun atas 3 elemen penting. Pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Digital yang berdaulat dalam regulasi dan pengendalian. Yang kedua adalah membangun Masyarakat Digital yang beretika dalam aktivitas, aman mengakses aplikasi digital, dan memiliki infrastruktur yang mumpuni. Terakhir adalah memperkuat Ekonomi Digital dengan SDM digital yang kompeten, teknologi penunjang yang baik, serta riset dan inovasi yang kuat. Kesemuanya ditunjang dengan pondasi dasar literasi digital yang kuat. Dari berbagai inisiatif penguatan literasi digital oleh publik, swasta dan pemerintah,



kurikulum Literasi Digital Kominfo menjadi titik kulminasi. Namun, ini bukanlah perjalanan akhir.

Setelah diluncurkannya empat modul literasi digital, negara, dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia, kemudian langsung mencanangkan Program Literasi Digital Nasional, Indonesia Makin Cakap Digital, pada perayaan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021 lalu. Untuk itu, Kemenkominfo kemudian menargetkan pelaksanaan program Literasi Digital, Indonesia Makin Cakap Digital, untuk menysasar kepada 12,5 juta masyarakat di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2021, dan sebanyak minimal 50 juta masyarakat hingga akhir 2024 nanti.

Program ini dirancang untuk memberikan “suntikan vaksinasi” literasi digital dasar berbasis empat modul kepada seluruh masyarakat nusantara, dalam bentuk pertemuan hibrid di ruang nyata dan maya. Dalam setiap kegiatannya, akan menghadirkan para pembicara nasional, lokal dan tokoh publik digital: *Key Opinion*

Leader (KOL). Masyarakat dapat mengakses kegiatan ini tanpa dipungut biaya apapun.

Kurikulum Literasi Digital yang telah dihasilkan ini tidak akan berdaya tanpa keterlibatan publik secara aktif untuk memanfaatkannya. Kurikulum Literasi Digital Kominfo ini memang menjadi sebuah sumber belajar atau *resource platform* literasi digital. Namun tanpa individu atau institusi yang bergerak menerapkannya bersama-sama, maka pengaruh besar yang diharapkan tidak akan terwujud. Sehingga Kemenkominfo akan terus bergerak hingga 2024, untuk memastikan kurikulum Literasi Digital yang ada saat ini dapat diketahui, dimanfaatkan, serta diterapkan sebagai panduan hidup keseharian di ruang digital. Harapannya, upaya ini akan menjadi salah satu kontribusi nyata agar masyarakat siap mengikuti berbagai program negara termasuk penanganan Covid-19, tanpa ragu hanya karena berita hoaks yang terus memburu.

Kemenkes Sediakan 11 Platform Telemedisin

untuk Pasien Isolasi Mandiri

Kementerian Kesehatan menyediakan layanan kesehatan telemedisin bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Layanan telemedisin ini berupa konsultasi virtual yang bisa diakses kapan dan dimana pun oleh pasien Covid-19. Untuk tahap awal fasilitas layanan telemedisin ini berlaku untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Menyusul layanan ini diperluas lagi untuk wilayah perkotaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa layanan telemedisin ini bertujuan untuk memudahkan pasien positif Covid-19 yang memerlukan konsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit sehingga mengurangi risiko penularan. "Dengan layanan telemedisin ini, semua pasien Covid-19 mendapatkan layanan medis tepat waktu, tanpa perlu antri di RS. Dengan demikian layanan rumah sakit dapat diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang dan berat/kritis," jelasnya.

Kemenkes bekerja sama dengan 11 platform telemedisin untuk memberikan jasa konsultasi dan jasa pengiriman obat secara gratis. Selain itu layanan ini juga dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium, dengan syarat pasien harus melakukan tes PCR/ antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan.

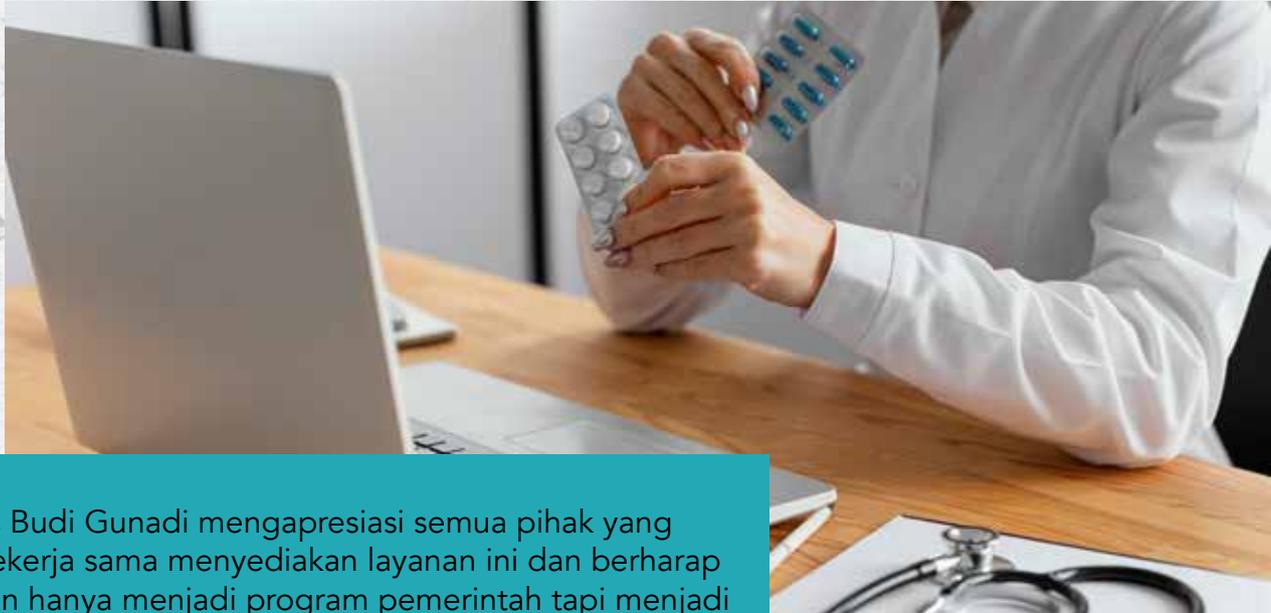
11 Platform Layanan Telemedisin yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan:

	Alodokter https://bit.ly/alodokter-isoman		KlikDokter https://bit.ly/kd-kemenkes-isoman		ProSehat https://prosehat.com/wa
	GetWell https://play.google.com/store/apps/details?id=id.paquesid.getwell		KlinikGo https://klinikgo.com/isoman		SehatQ https://sehatqapp.onelink.me/
	Good Doctor https://gooddoctor.onelink.me/Cmiw/efeba7ae dan GrabHealth		Link Sehat https://link.linksehat.com/mRMf		YesDok https://bit.ly/ISOMAN-YesDok
	Halodoc https://bit.ly/isoman_halodoc		Milvik Dokter https://milvik.id/about-us/		

Alur Layanan 11 Platform Telemedisin



- 1** Pasien melakukan tes PCR/swab antigen di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Jika hasil tesnya positif dan lab melaporkan hasilnya ke *database* kasus positif Covid-19 di Kemenkes (NAR), maka pasien akan menerima pesan WhatsApp (WA) dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis. Namun, apabila tidak mendapatkan pesan pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs <https://isoman.kemkes.go.id>
- 2** Pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 platform layanan telemedisin secara gratis dengan klik link yang terdapat dalam pesan WA dari Kemenkes dan memasukkan *voucher* di aplikasi yang dipilih
- 3** Lakukan konsultasi dokter dengan menginformasikan Anda adalah pasien program Kementerian Kesehatan
- 4** Setelah melakukan konsultasi secara daring, dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien masuk dalam kategori yang dapat melakukan isoman, obat dapat ditebus gratis
- 5** Untuk menebus resep obat gratis dari Kemenkes, pasien harus mengirim pesan WA ke salah satu gerai apotek Kimia Farma
- 6** Pasien harus mengirimkan resep digital (PDF atau *screen capture*) yang dikeluarkan dari platform telemedisin, KTP dan alamat pengiriman ke nomor Whatsapp Kimia Farma yang dituju
- 7** Obat dan/atau vitamin akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan. Terdapat 2 paket obat yang ditanggung Kemenkes yakni Paket A (Orang Tanpa Gejala) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari. Kemudian, Paket B (bergejala ringan) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari, Azithromisin 500mg sebanyak 5 butir konsumsi sehari sekali, Osetamivir 75mg sebanyak 14 butir konsumsi dua kali sehari dan parasetamol tab 500 mg sebanyak 10 butir (apabila dibutuhkan).
- 8** Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan jasa pengiriman dari Sicepat untuk mengambil obat dan/atau vitamin dari Apotek Kimia Farma dan mengirimkan ke alamat pasien.

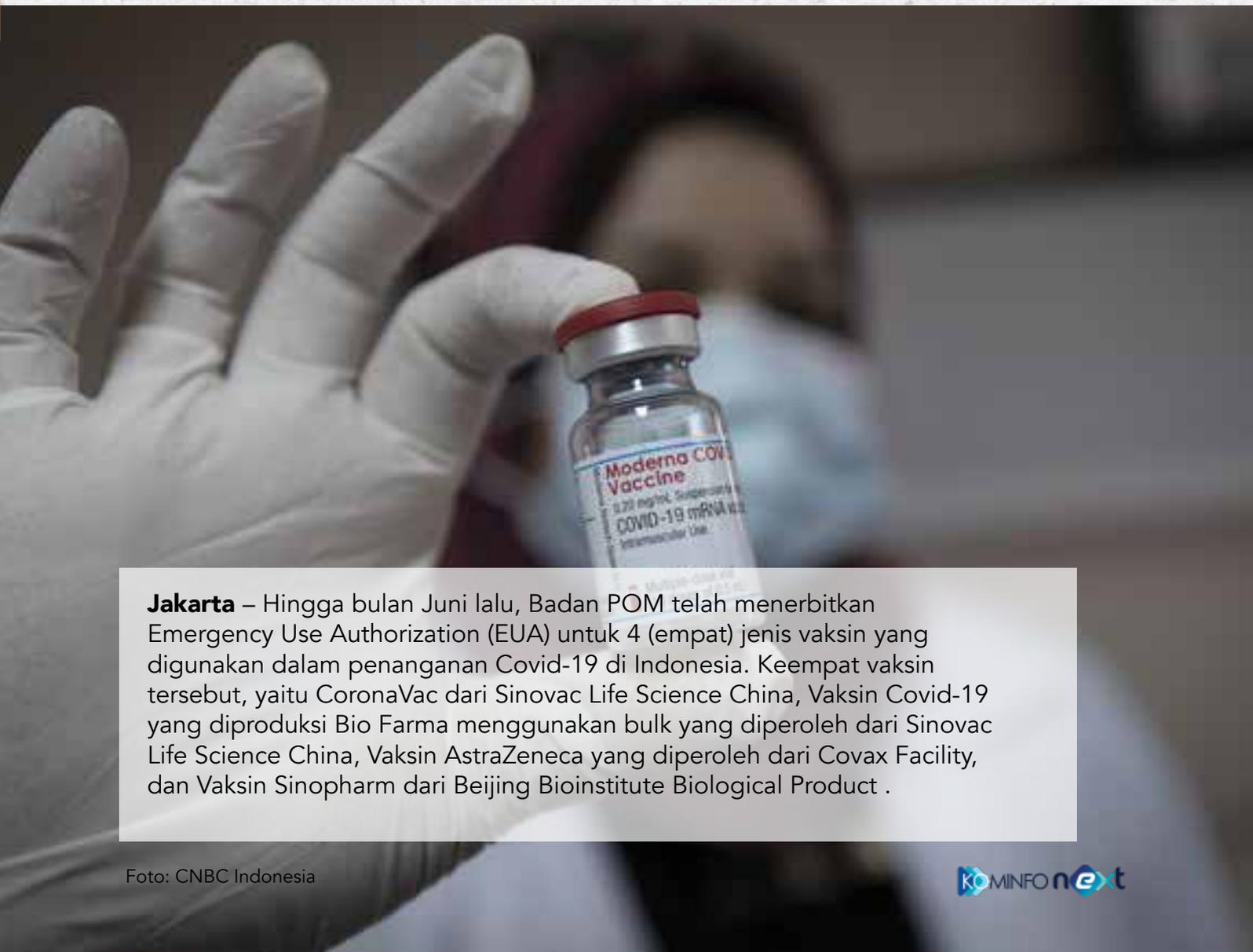


Menkes Budi Gunadi mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama menyediakan layanan ini dan berharap ini bukan hanya menjadi program pemerintah tapi menjadi gerakan bersama, di mana semua komponen bangsa dan kelompok sosial ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19.



Badan POM Terbitkan EUA Moderna

Covid-19 Vaccine sebagai Vaksin Pertama dari Platform mRNA



Jakarta – Hingga bulan Juni lalu, Badan POM telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk 4 (empat) jenis vaksin yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Keempat vaksin tersebut, yaitu CoronaVac dari Sinovac Life Science China, Vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma menggunakan bulk yang diperoleh dari Sinovac Life Science China, Vaksin AstraZeneca yang diperoleh dari Covax Facility, dan Vaksin Sinopharm dari Beijing Bioinstitute Biological Product .

Kamis (01/07), Badan POM kembali menerbitkan EUA untuk Moderna Covid-19 Vaccine. Moderna Covid-19 Vaccine merupakan vaksin yang dikembangkan dengan platform mRNA. Vaksin ini diperoleh melalui COVAX facility yang merupakan jalur multilateral dan diproduksi oleh Moderna TX., Inc USA. Vaksin ini digunakan dengan indikasi pencegahan

Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Diberikan secara injeksi intramuskular, dosis 0,5 mL dengan 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan.

“Moderna Covid-19 Vaccine merupakan vaksin pertama dari pengembangan menggunakan platform mRNA yang memperoleh

EUA dari Badan POM. Vaksin ini merupakan bantuan dari Pemerintah Amerika yang disalurkan melalui skema COVAX facility,” terang Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat memberikan keterangan pers.

Badan POM telah melakukan pengkajian bersama dengan Tim Ahli Komite Nasional Penilai Vaksin



Covid-19 dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait dengan keamanan dan efikasi dari vaksin ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum keamanan vaksin ini dapat ditoleransi, baik reaksi lokal maupun sistemik dengan tingkat keparahan grade satu dan dua. Kejadian reaksi yang paling sering timbul dari penggunaan

vaksin ini, antara lain nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan minggil.

Sementara untuk data efikasi, berdasarkan data uji klinik fase 3 pada tanggal 21 November 2020, efikasi Moderna Covid-19 Vaccine untuk mencegah Covid-19 yang parah adalah sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 hingga di bawah 65 tahun dan 86,4% pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Hasil ini diperoleh melalui pengamatan mulai hari ke-14 setelah penyuntikan kedua.

Salah satu poin kritikal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan vaksin ini adalah dalam hal penyimpanan dan distribusinya. "Moderna Covid-19 Vaccine merupakan vaksin mRNA yang memerlukan teknologi penyimpanan berbeda dari jenis vaksin dari platform *inactivated virus* yang sebelumnya telah memperoleh EUA. Vaksin ini perlu sarana penyimpanan pada suhu -200 C. Karena kebutuhan teknologi khusus tersebut, vaksin ini akan diserahkan ke Indonesia bersamaan dengan teknologi penyimpanan dan distribusinya," jelas Kepala Badan POM lagi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan POM menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait yang telah bersama Badan POM melakukan pengkajian secara intensif, EUA untuk Moderna Covid-19 Vaccine dapat diterbitkan. Kehadiran vaksin ini di Indonesia menjadi hal yang positif untuk merespons kebutuhan vaksin yang sangat tinggi dan mendesak saat ini dalam Program Vaksinasi Covid-19.

"Apresiasi pada kerja keras dan kerja sama dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lintas sektor lainnya, untuk mendatangkan vaksin Covid-19 dengan berbagai

upaya. Semoga dalam waktu dekat akan semakin banyak jenis vaksin lainnya yang juga akan masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat segera meningkatkan cakupan vaksinasi untuk tercapainya *herd immunity* yang ditargetkan," ungkap Kepala Badan POM.

Tak henti, Badan POM mengimbau masyarakat untuk selalu menegakkan protokol kesehatan sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19.

Sumber: pom.go.id





Foto: Andhika Prasetya/detikcom

Gubernur Anies

Tetapkan KEPGUB PPKM Level 4 Covid-19

Balai Kota Jakarta - Melihat perkembangan kasus Covid-19 selama 14 hari terakhir, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Coronavirus Disease 2019 selama 5 (lima) hari sejak 21 Juli - 25 Juli 2021.

Gubernur Anies Baswedan menyatakan, kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Coronavirus Disease di Wilayah Jawa dan Bali.

"Upaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat masih akan terus kami lanjutkan dengan mempertimbangkan tren kasus di lapangan. Insya Allah, ikhtiar kita semua bisa membuahkan hasil

dalam 5 (lima) hari ke depan, jika kita mampu bersama-sama untuk disiplin, tidak lengah, tidak lelah, untuk terus menjaga protokol kesehatan di manapun dan kapanpun. Saya juga tidak bosan mengajak kepada semua jajaran, seluruh elemen masyarakat untuk terus menguatkan kolaborasi, saling dukung di situasi pandemi seperti sekarang," ungkap Gubernur Anies.

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019.

Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat **Level 4 Covid-19**

#jakartatanggapcorona

**PEMBERLAKUKAN
PPKM LEVEL 4**

DKI JAKARTA

26 JULI – 2 AGUSTUS 2021
SESUAI KEPGUB NO. 938 TAHUN 2021

Jakarta
kota kelurahan

Pemprov DKI Jakarta | @DKIJakarta | jakarta.go.id

#jakartatanggapcorona



HBKB Ditiadakan

TEMPAT IBADAH

- ❌ Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah.
- ✅ Ibadah di rumah.



TEMPAT RESEPSI PERNIKAHAN Ditiadakan



Lokasi Seni, Budaya, Sarana Olahraga dan Kegiatan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan DITUTUP



Area Publik, Taman Umum, Tempat Wisata Umum & Area Publik Lainnya DITUTUP



6/8

 Pemprov DKI Jakarta |  @DKIJakarta |  jakarta.go.id

 Jakarta
kota kelibukoran

#jakartatanggapcorona



SEKTOR ESENSIAL

KEUANGAN DAN PERBANKAN HANYA MELIPUTI ASURANSI, BANK, PEGADAIAN, BURSA BERJANGKA, DANA PENSUN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN FISIK DENGAN PELANGGAN.

50% WFH

- Untuk lokasi yang berkaitan pelayanan pada masyarakat.
- Prokes lebih ketat.

75% WFH

- Pelayanan administrasi perkantoran.
- Prokes lebih ketat.

SEKTOR PEMERINTAHAN YANG MEMBERI PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK BISA DITUNDA PELAKSANAANNYA.

75% WFH

- Prokes lebih ketat.



Karyawan/pegawai & pengunjung yang beraktivitas, wajib sudah divaksinasi dengan menunjukkan sertifikat (cetak/daring via JAKI).

PASAR MODAL (BERORIENTASI PADA PELAYANAN DENGAN PELANGGAN DAN BERJALANNYA OPERASIONAL PASAR MODAL); TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (OPERATOR SELULER, DATA CENTER, INTERNET, POS, MEDIA TERKAIT DENGAN PENYEBARAN INFORMASI KE MASYARAKAT); PERHOTELAN NON PENANGANAN KARANTINA COVID-19.

50% WFH

- Prokes lebih ketat.

3/8

[Pemprov DKI Jakarta](#)

[@DKIJakarta](#)

[jakarta.go.id](#)

INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR*

50% WFH

- Hanya di fasilitas produksi/pabrik.
- Prokes lebih ketat.

90% WFH

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Prokes lebih ketat.

*Perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir/dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).



#jakartatanggapcorona



SEKTOR KRITIKAL

PENANGANAN BENCANA, ENERGI, LOGISTIK, TRANSPORTASI & DISTRIBUSI TERUTAMA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT, MAKANAN, MINUMAN & PENUNJANGNYA (TERMASUK UNTUK TERNAK/HEWAN PELIHARAAN), PUPUK DAN PETROKIMIA, SEMEN DAN BANGUNAN, OBJEK VITAL NASIONAL, PENANGANAN BENCANA, PROYEK STRATEGIS NASIONAL, KONSTRUKSI (INFRASTRUKTUR PUBLIK), UTILITAS DASAR (LISTRIK, AIR, PENGOLAHAN SAMPAH).

100% BEROPERASI

- ✔ Hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan pada masyarakat.
- ✔ Prokes lebih ketat.

75% WFH

- ✔ Pelayanan administrasi perkantoran.
- ✔ Prokes lebih ketat.

Karyawan/pegawai & pengunjung yang beraktivitas, wajib sudah divaksinasi dengan menunjukkan sertifikat (cetak/daring via JAKI).

SUPERMARKET, PASAR TRADISIONAL, PASAR RAKYAT DAN PASAR SWALAYAN YANG MENJUAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI.

MAKS. 50% DARI KAPASITAS

- ✔ Maks. pukul 20:00 WIB
- ✔ Prokes lebih ketat.
- ✔ Kecuali pasar induk beroperasi seperti biasa dengan prokes lebih ketat.

KESEHATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

100% BEROPERASI

- ✔ Prokes lebih ketat.



PASAR TRADISIONAL DAN PASAR RAKYAT YANG MENJUAL NON-KEBUTUHAN SEHARI-HARI.

- ✔ Maks. pukul 15:00 WIB.
- ✔ Kapasitas maks. 50%.
- ✔ Prokes lebih ketat.



4/8

Pemprov DKI Jakarta
 @DKIJakarta
 jakarta.go.id



#jakartatanggapcorona

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan sejenisnya.

- ✔ Maks. pukul 20:00 WIB
- ✔ Prokes lebih ketat

APOTEK & TOKO OBAT DAPAT BUKA 24 JAM

✔ Prokes lebih ketat.

Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya.

- ✔ Maks. pukul 20:00 WIB.
- ✔ Dine-in maks. 3 orang.
- ✔ Waktu makan maks. 20 menit.

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 100% BEROPERASI

✔ Prokes lebih ketat.



Pedagang/pegawai/pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin (cetak/daring via JAKI).

Restoran/rumah makan dan kafe berlokasi dalam gedung/toko tertutup di lokasi tersendiri ataupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall.

- ✔ Dine-in ditiadakan.
- ✔ Hanya menerima delivery/takeaway.

PUSAT PERBELANJAAN/ MALL DITUTUP

- ✔ Kecuali akses restoran, supermarket dan pasar swalayan.
- ✔ Maks. 3 pegawai toko untuk penjualan online.
- ✔ Dengan memperhatikan sektor kritikal.

5/8

f Pemprov DKI Jakarta |
 @DKIJakarta |
 jakarta.go.id



#jakartatanggapcorona



HBKB Ditiadakan

TEMPAT IBADAH

- ❌ Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah.
- ✅ Ibadah di rumah.



TEMPAT RESEPSI PERNIKAHAN Ditiadakan



Lokasi Seni, Budaya, Sarana Olahraga dan Kegiatan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan DITUTUP



Area Publik, Taman Umum, Tempat Wisata Umum & Area Publik Lainnya DITUTUP



6/8

 Pemprov DKI Jakarta |  @DKIJakarta |  jakarta.go.id

 Jakarta
kota kelibukoran

#jakartatanggapcorona



TRANSPORTASI

Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online)

Maks. **50%** kapasitas.

Pelaku perjalanan domestik menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (min. vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1 keberangkatan) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Kendaraan Pribadi

Maks. **50%** kapasitas. **100%** jika berdomisili di alamat yang sama.

Ojek (Online/Pangkalan)

100% dari kapasitas.

Tidak boleh berkumpul.



7/B

 Pemrov DKI Jakarta |
  @DKIJakarta |
  jakarta.go.id



 kota kolaborasi

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/2355-SP-HMS-07-2021>

Infografik: Pemrov DKI Jakarta



Photo by Fadhi N

Jalan Panjang Komunikasi Publik

di Masa Pandemi

Oleh : Farida Dewi Maharani

JFT Prahum Ahli Madya,
Tim Media Center Satgas Covid-19,
Tim Media Center KPCPEN
Direktorat Pengelolaan Media, Ditjen IKP

Sejarah mencatat pertama kali Indonesia menyatakan secara resmi untuk mewaspadaai penyakit misterius Covid-19 pada tanggal 6 Januari 2020 meskipun belum ditemukan kasus di tanah air. Kala itu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan mengatakan perlunya antisipasi masuknya virus misterius ke Indonesia dengan menyediakan alat pemindai panas tubuh di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas. Tindakan antisipasi juga sudah terbaca dari Surat Edaran Kemenkes tertanggal 5 Januari 2020 yang meminta seluruh pejabat rumah sakit daerah untuk mengantisipasi fenomena wabah Covid-19.

Kasus pertama sendiri terjadi di awal Maret 2020 yang menandai Indonesia memasuki pandemi. Kasus 01 dan 02 ditemukan di wilayah Depok, Jawa Barat pada seorang ibu dan anak yang diberikan kode 01 dan 02. Kasus ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menkes kala itu dijabat oleh Terawan Agus Putranto pada 2 Maret 2020. Kasus ini pun menandai perjalanan Indonesia di lorong pandemi yang mencekam, garis kuning polisi yang melingkari rumah kasus 01 dan 02 seolah-olah tempat tersebut berbahaya untuk didekati. Seketika terlihat pemerintah gagap untuk menangani kasus-kasus awal pandemi.

Kegagalan menangani pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun semua dunia saat itu tergegap menghadapi pagebluk. Informasi berbasis penelitian mengenai virus misterius itu belum memadai, tentu ini menyulitkan untuk penanganan si "pagebluk", belum lagi beredarnya hoaks sangat marak menambah permasalahan tersendiri.



Komunikasi Tunggal Satgas Percepatan Penanganan Covid-19

Maraknya pandemi Covid-19 diikuti dengan tumpah ruahnya isu-isu hoaks di awal pagebluk merasuk wilayah Indonesia. Di bawah komando Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo yang didaulat memimpin Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 menggandeng Kementerian Kominfo untuk memimpin komunikasi publik.

Selang beberapa hari setelah pembentukan Satgas, manajemen komunikasi krisis mulai ditata. Fokus utama komunikasi publik yang harus segera ditangani adalah; pertama, progres penanganan meliputi kebijakan-kebijakan darurat yang diambil pemerintah, bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah serta kesiapan faskes. Kedua, edukasi mengenai promosi kesehatan, meliputi antara lain protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan) dan anjuran untuk tetap dirumah.

Pemilihan lokasi media center di Kantor BNPB memperlihatkan penanganan yang terpusat, termasuk penanganan komunikasi publik. Semua informasi dan data perkembangan penanganan COVID serta narasumber diminta untuk disampaikan melalui media center BNPB. Melalui *media center* inilah semua informasi dikelola sedemikian rupa, agar masyarakat mendapat informasi dari sumber yang terpercaya.

Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik turut mendukung komunikasi publik yang dilakukan melalui penyediaan *live streaming* dengan berkolaborasi bersama TVRI yang menyediakan TV Pool. Dalam menjalankan komunikasi publik, Kementerian Kominfo bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Kesehatan, BNPB dan pakar komunikasi, pakar epidemiologi rutin mendiskusikan agenda setting, strategi komunikasi, penyusunan dan pendistribusian konten-konten edukasi melalui skema *above the line*, *through the line*, dan *below the line*.

Pekerjaan yang menantang dalam pengelolaan *media center* pada masa gelombang pertama adalah kehati-hatian dalam menyusun narasi yang harus disampaikan oleh sang Jubir yang ditunjuk untuk selalu meng-*update* perkembangan penanganan “pagebluk”. Dalam kondisi ketidakpastian dan serba sensitif ini, cara penanganan Covid-19 memerlukan empati, konsistensi dan ketegasan dalam menyampaikan informasi, salah diksi dalam penyampaian bisa menghancurkan reputasi pemerintah serta memperburuk situasi penanganan pandemi.

Tidak dipungkiri kegagalan pun terjadi dalam beberapa strategi komunikasi Publik, mulai dari kejadian “*slip of tongue*” oleh pejabat maupun dalam pengemasan pesan yang terkesan tidak berpihak ataupun tidak konsisten. Ini semua terjadi karena sulitnya memahami kondisi pandemi yang dialami seluruh dunia, kebijakan-kebijakan WHO yang sangat fluktuatif mempengaruhi kebijakan komunikasi publik. Namun yang pasti dan dipahami dari awal, bahwa upaya ampuh menurunkan tensi pandemi perlu kolaborasi semua pihak, termasuk keterlibatan publik.

Dalam pernyataan resmi sekitar bulan Juni 2020, WHO

mendefinisikan penularan virus melalui aerosol yang melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama, artinya penularan melalui udara ini sangat rentan terjadi. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah berkesimpulan bahwa upaya pencegahan wabah adalah dengan melakukan promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat, sehingga setiap individu melindungi individu lain. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan apabila mendapatkan dukungan sosial dari berbagai elemen (tokoh-tokoh masyarakat) untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat sebagai agen pemutus rantai penyebaran virus.

Untuk mencapai tujuan tersebut penting membanjiri ruang publik dengan informasi promosi kesehatan, pemerintah wajib hadir di semua lini kanal media untuk memastikan publik teredukasi dengan baik dan benar dalam penanganan pandemi. Tugas dan fungsi Kementerian Kominfo di sektor komunikasi diuji dalam penanganan pandemi, yaitu memastikan seluruh *stakeholder* komunikasi bisa berkolaborasi bersama-sama meyakinkan publik bahwa pencegahan penyebaran virus dapat dihambat ketika semua masyarakat bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Keterlibatan *media mainstream*, *influencer*, *public figure*, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, jejaring komunikasi pusat dan daerah sangat dibutuhkan.



Dukungan Komunikasi Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Masa sulit pandemi gelombang pertama sudah berhasil dilalui bersama, segala upaya perbaikan terus dilakukan salah satunya adalah Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2020 yang merevisi Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Melalui Perpres ini strategi penanganan pandemi pun berubah tidak hanya fokus pada penanganan COVID saja namun juga mulai berbenah diri di aspek ekonomi nasional. Karena bagaimana pun kita tidak bisa berlama-lama larut



dalam pandemi, perlu dibangun semangat untuk tetap bangkit menghidupkan kembali denyut perekonomian yang sempat tersendat.

Melalui slogan komunikasi “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit”, komunikasi publik penanganan pandemi diperkuat dengan pembentukan tim komunikasi KPCPEN yang diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. Di bawah komando Menkominfo ini dibentuk tim komunikasi yang fokus pada 3 hal, yaitu vaksin, pemulihan ekonomi dan tetap fokus menggaungkan protokol kesehatan. Keseimbangan “gas” dan “rem” yang dilakukan pemerintah harus mendapat dukungan publik, sehingga komunikasi “gas” dan “rem” perlu dilakukan bersamaan dan berimbang.

Perubahan kebijakan ini tidak bisa dipungkiri membuat publik pun terpecah, sebagian berpendapat bahwa keselamatan jiwa harus diutamakan dan sebagian berpandangan bahwa ekonomi harus segera diselamatkan. Menjaga keberimbangan ditengah dua kubu tersebut tentu membutuhkan kejelian komunikasi publik, di mana ritme dan diksi serta timing sangat menentukan.

Fokus utama pemulihan ekonomi yang disampaikan adalah bentuk-bentuk sentuhan pemerintah untuk bisa menghidupkan ekonomi rakyat. Cukup banyak bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah melalui program-program kementerian teknis terkait, seperti bantuan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, bansos yang melekat pada berbagai program bantuan Kementerian Sosial, bantuan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, bantuan uang tunai melalui program Pra Kerja dan jenis-jenis bantuan lainnya.

Framing ini tentu menyentuh dan sangat dibutuhkan masyarakat. Informasi seperti ini sebagai booster darah segar untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bertanggung jawab menghidupkan perekonomian rakyat. Namun dalam bernegara, selain ada konsumen tentu ada produsen, ada pekerja ada pemberi kerja di mana kedua belah pihak tersebut harus berimbang diberikan perhatian yang sama.

Pemulihan ekonomi nasional selain mem-*booster* daya beli masyarakat dengan berbagai bantuan, pemerintah juga perlu memberikan *booster* untuk pengusaha dengan berbagai macam insentif agar usaha mereka bisa bertahan di masa pandemi.

Ketepatan diksi narasi yang disusun akan memperlihatkan hasil “ketidakberpihakan” pemerintah kepada salah satu kubu tersebut. Beratnya informasi disisi pemberian insentif pengusaha tentu akan menghasilkan narasi keberpihakan pemerintah hanya pada kalangan mampu, sehingga perlu diimbangi *reason “why”* insentif diberikan untuk menjamin lapangan pekerjaan tetap terbuka.

Di sisi penanganan pandemi, tim komunikasi KPCPEN Kominfo fokus pada upaya vaksinasi nasional untuk mencapai angka Herd Immunity. Hingga bulan Juni 2021, tim komunikasi KPCPEN Kominfo berhasil membombardir publik dengan beragam informasi mengenai keamanan vaksin dan ketersediaan vaksin. Bukan hal yang mudah meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19 yang dipersiapkan dalam hitungan bulan siap untuk disuntikan ke manusia. Untuk memastikan keberhasilan vaksinasi nasional, komunikasi publik harus dirancang sampai level tertinggi dan diputuskan Presiden Joko Widodo yang akan mendapatkan suntikan pertama dari vaksin yang berhasil didatangkan di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020.

Bertempat di Istana Negara, Jokowi disuntik vaksin Sinovac pada Rabu (13/01), pukul 09.42 WIB oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Muthalib. Selain Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Ketua IDI, tokoh agama, dan juga *influencer* turut mengikuti vaksinasi ini. Aksi penyuntikan vaksin ke Presiden merupakan momen terbaik untuk meyakinkan keamanan vaksin ke publik, sehingga perlu digaungkan keseluruhan lini kanal. Beragam konten vaksinasi pertama ini diciptakan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Diketuai bersama Kominfo dan Kantor Staf Presiden, semua *stakeholder* komunikasi publik bergerak serentak, dan menghasilkan sambutan luar biasa dari masyarakat.



Komunikasi PPKM Darurat Jawa Bali; Saatnya Injak Rem

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 29 Juni 2021 jumlah penerima vaksin corona mencapai 27.419.898 orang. Namun, hasil pantau melalui JHU CSSE Covid-19 Data memperlihatkan kasus harian per Juni 2021 mengalami kenaikan tajam. Per tanggal 18 Juni kasus harian mencapai 12.990 kasus dan terus menanjak di angka-angka yang sangat signifikan, bahkan di akhir 30 Juni mencapai kasus harian 21.807.

Varian Delta melumpuhkan Indonesia dan harus bersiap menghadapi gelombang kedua pandemi dengan memberlakukan PPKM Darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2021.

Pemberlakuan PPKM Darurat ini berlangsung selama 18 hari terhitung sejak 3 – 20 Juli 2021 yang memfokuskan pada penghentian sementara mobilitas masyarakat sebagai upaya memutus rantai virus Delta yang disinyalir memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi. Hal ini terbukti peningkatan kasus yang terus melonjak dari bulan Juni hingga masa pemberlakuan PPKM Darurat ini (JHU CSSE Covid-19 Data memperlihatkan per 1 – 18 Juli tingkat kasus harian mencapai kisaran 40.000 – 56.000 kasus).

Penanganan komunikasi selama masa PPKM Darurat kembali diperkuat dengan berkolaborasi bersama beberapa pihak melalui konferensi pers rutin harian untuk meng-*update* perkembangan implementasi PPKM Darurat dan Penanganan pandemi varian Delta. Edukasi mengenai pemahaman perlunya pembatasan mobilitas menjadi kunci keberhasilan implementasi PPKM Darurat. Menginformasikan teknis implementasi di berbagai jalur dan moda transportasi terus gencar digaungkan agar tidak terjadi *chaos* di lapangan. Tim komunikasi publik perlu memahami kalangan masyarakat yang masih berpotensi menyebabkan mobilitas tetap tinggi, dan target inilah yang dilakukan *maintenance* komunikasi secara intens sesuai dengan pola konsumsi komunikasi yang mereka lakukan.

Sejalan dengan itu, fokus permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian yang sama besar adalah seolah-olah “ketidaksiapan” fasilitas dan sarana prasarana kesehatan. Keterbatasan fasilitas serta sarana prasarana di kala serangan gelombang kedua tentu jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kepanikan berlebihan. Mengelola psikis publik dengan menginformasikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentu menjadi obat pelipur lara ditengah kecemasan. Upaya-upaya pemerintah bersikeras menjamin ketersediaan fasilitas ruang rawat, ruang ICU, menjamin ketersediaan oksigen, obat, vaksin terus digelorkan diberbagai kanal informasi.

Dalam konferensi pers 20 Juli 2021 (hari terakhir penetapan PPKM Darurat), Presiden Jokowi mengklaim kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali berhasil menekan laju kasus penularan dan sekaligus menurunkan angka ketersediaan tempat tidur atau *bed occupancy ratio* (BOR) rumah sakit. Meskipun ada progres tingkat penurunan kasus belum mencapai angka normal, sehingga pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021, masa perpanjangan ini kini bernama PPKM Level 4 Covid-19. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

(PPKM) di wilayah Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021.

Berbeda dengan fokus komunikasi di masa PPKM Darurat, fokus komunikasi di saat PPKM Level 4 lebih banyak menyampaikan program-program bantuan ke masyarakat. Hal ini mempertimbangkan hasil dari implementasi PPKM Darurat yang menyebabkan tersendatnya nadi perekonomian rakyat selama 18 hari PPKM Darurat. Risiko menginjak rem tentu sudah memperhitungkan prioritas keselamatan rakyat, dan perlahan menyuntikkan dana-dana segar untuk memulihkan masyarakat.

Selama PPKM, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sejumlah Rp. 55,21 triliun yang akan dikucurkan dalam bentuk bantuan tunai, BLT desa, bantuan untuk program keluarga harapan atau PKH, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Selain dalam bentuk perlindungan sosial, Presiden memerintahkan untuk memberikan insentif bagi usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan juga komitmen pemerintah untuk memberikan paket obat gratis sebanyak 2 juta paket untuk pasien COVID yang menjalani isolasi mandiri.

Memahami kondisi publik saat ini, Menkominfo dalam rapat koordinasi dengan tim komunikasi KPCPEN pada tanggal 21 Juli 2021 menginstruksikan penebalan komunikasi publik isu perlindungan sosial dan berbagai bantuan di seluruh kanal media pemerintah dan non pemerintah. Pertemuan intens dengan para pemimpin redaksi dan tokoh masyarakat dilakukan agar menciptakan atmosfer komunikasi linier.

Memenangkan peperangan komunikasi di ruang publik di area konvensional dan digital menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah dan tanggung jawab moral instansi media massa. Strategi menggunakan aset kanal masing-masing *stakeholder* dalam berbagai macam bentuk kemasan adalah strategi tepat untuk melindungi rakyat dan negara Indonesia dari gempuran infodemic yang menimbulkan kepanikan bahkan dapat menyebabkan perpecahan. Proteksi informasi sampai lini bawah akan efektif jika dilakukan berbasis kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan berbasis pada riset pola komunikasi setiap lini masyarakat. Karena kita semua memahami, informasi adalah segalanya, informasi bisa menjadi pemecah dan juga menjadi pemersatu tinggal bagaimana pemerintah bersikap dan berstrategi. Salam sehat dan produktif. (FDM)

Referensi

- <https://mediaindonesia.com/humaniora/387702/satu-tahun-perjalanan-covid-19-maret-yang-mencekam>
- <https://www.dw.com/id/linimasa-perjalanan-covid-19-di-indonesia/g-54171184>
- <https://ik.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/e-book-dinamika-komunikasi-di-masa-pandemi.pdf>
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/10/091406523/pernyataan-resmi-who-virus-corona-menyebarkan-di-udara-dan-menular?page=all>
- <https://www.dw.com/id/linimasa-perjalanan-covid-19-di-indonesia/g-54171184>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/vaksin-pertama-covid-19-tiba-di-indonesia.html>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/21/12031651/pemerintah-berlakukan-ppkm-level-4-di-jawa-bali-apa-maksudnya>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/114000665/aturan-lengkap-ppkm-darurat-jawa-bali-berlaku-3-20-juli-2021?page=all>
- <https://github.com/cssegisanddata/covid-19>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4594535/update-29-juni-2021-28304774-orang-di-indonesia-sudah-divaksinasi-covid-19>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1485374/ppkm-diperpanjang-jokowi-sebut-pemerintah-akan-bagikan-2-juta-paket-obat>



Karantina dan Isolasi Mandiri, Kenali Perbedaannya

Covid-19 telah menjadi masalah kesehatan global setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Virus ini sudah menyebar di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Selama 10 bulan ini, seluruh elemen bangsa dihadapkan pada keseharian untuk berdamai dengan Covid-19 dan kondisi ini masih terus berlanjut hingga beberapa waktu yang belum dapat ditentukan kapan akan berakhir.

Hingga saat ini, pada 25 Juli 2021, paparan sebaran Covid-19 di Indonesia mencapai angka 3.166.505 dengan 2.509.318 jiwa sudah dinyatakan sembuh dan 83.279 rakyat telah tiada.

Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan karantina atau isolasi. Lantas, apa perbedaan dari keduanya?

“

Karantina merupakan upaya memisahkan seseorang yang terpapar Covid-19 atau belum memiliki gejala Covid-19, namun memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat pertama kali mengalami gejala,” tulis Admin Kominfo melalui akun Instagram resmi @kemenkominfo, Jumat (02/07/2021).

Proses karantina dilakukan sejak dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19. "Dilakukan pemeriksaan entry test di hari pertama dan exit test hari kelima, jika hasilnya negatif maka karantina selesai," ujar Minfo.

Selama masa karantina, dilakukan pemantauan harian oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria *suspect* Covid-19, maka dilakukan tatalaksana sesuai kriteria.

Berbeda dengan karantina, pengertian isolasi mandiri (isoman) adalah memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas yang bertujuan untuk mencegah penularan.

"Isolasi berlaku bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan dilakukan sejak dinyatakan sebagai kasus *suspect* dan dihentikan apabila telah memenuhi kriteria *discarded*," jelas Minfo.

Isoman dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kriteria untuk isolasi mandiri adalah keluarga yang mampu melaksanakan ketentuan pelaksanaan isolasi mandiri dan masyarakat mau menerima dan menyetujui pelaksanaan isolasi mandiri dan secara medis memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, sedangkan jika tidak mampu memenuhi hal tersebut, harus dilakukan isolasi di fasilitas khusus. Lama isolasi bagi pasien tidak bergejala adalah 10 hari, sementara yg bergejala 13 hari.

"Jika tidak bergejala, isolasi 10 hari sejak pengambilan swab positif. Jika bergejala, isolasi minimal sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan," terang admin pada slide tiga unggahannya.



Ketentuan Isolasi atau Karantina Mandiri



Ventilasi dan pencahayaan yang baik



Gunakan masker dengan benar



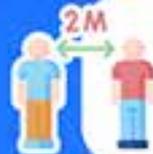
Kamar mandi terpisah, tetapi jika tidak tersedia lakukan disinfeksi rutin permukaan yang sering disentuh



Cuci tangan sabun



Gunakan alat tersendiri (makan/minum/mandi)



Jaga Jarak



Kamar tidur terpisah



Disinfektan/bersihkan permukaan dengan disinfektan berkala



Ketentuan Isolasi atau Karantina Mandiri



Hindari kontak dengan orang lain serta tidak berpergian dan tidak menerima tamu



Tangani sampah dengan hati-hati



Pemantauan harian gejala



Jika muncul gejala atau semakin parah lapor petugas



Berkoordinasi dengan Puskesmas



Orang yang merawat perhatikan protokol kesehatan 3M



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV
KOMINFO next

Pahami Tata Laksana Pasien Covid-19 agar Cepat Tanggap!

Setiap individu yang terinfeksi Covid-19 memiliki respon tubuh yang berbeda-beda. Sebagian tanpa gejala, sebagian lainnya ada yang bergejala ringan, sedang, bahkan berat. Oleh karenanya perlu bagi masyarakat untuk memahami tingkatan gejala dan protokol tatalaksana pasien Covid-19 sesuai gejalanya. Protokol ini telah diperbarui sesuai dengan perkembangan penyakit dan situasi terkini dan harus menjadi pegangan tenaga medis dalam tata laksana Covid-19.

Bagi pasien positif Covid-19 yang tidak bergejala, penanganan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat seperti RS Darurat. Isolasi minimal 10 hari sejak ditegakkan diagnosis. Setelah isolasi 10 hari maka pasien dinyatakan selesai isolasi.

"Sementara untuk pasien positif Covid-19 gejala sakit ringan-sedang diimbau untuk isolasi mandiri di rumah, RS Darurat, RS, maupun RS Rujukan Isolasi minimal 10 hari sejak munculnya gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan," tulis admin Instagram @kemenkominfo dalam tayangan infografis terkait Tata Laksana Pasien Covid-19 Sesuai Jumat (02/07/2021).

Sedangkan bagi pasien positif Covid-19 dengan gejala sakit berat, akan diisolasi di rumah sakit rujukan. "Pasien diisolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Pasien akan dilakukan lagi tes swab jika hasilnya negatif maka pasien akan dinyatakan sembuh," sambung Minfo mengutip keterangan dari Kementerian Kesehatan.



Tingkatan Gejala pada Pasien Covid-19



Pasien Tanpa Gejala

Gejala

Frekuensi napas **12-20** kali per menit
Saturasi $\geq 95\%$

Tempat Perawatan

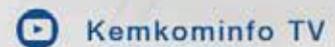
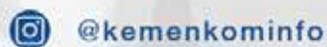
Isolasi mandiri dirumah, fasilitas isolasi Pemerintah

Terapi

Vitamin C, D, Zinc

Lama Perawatan

10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi





Pasien Ringan

Gejala

Demam, batuk (umumnya batuk kering ringan), fatigue atau kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indra penciuman/anosmia, kehilangan indra pengecapan atau ageusia, malgia dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit/perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas **12-20** kali per menit, saturasi $\geq 95\%$

Tempat Perawatan

Fasilitas isolasi Pemerintah, isolasi mandiri di rumah bagi yang memenuhi syarat

Terapi

Oseltamivir atau Favipiravir, Azitromisin, Vitamin C, D, Zinc

Lama Perawatan

10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV



Pasien Sedang

Gejala

Demam, batuk (umumnya batuk kering ringan), fatigue atau kelelahan ringan. anoreksia, sakit kepala, kehilangan indra penciuman/anosmia, kehilangan indra pengecapan atau ageusia, malgia dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit/perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas **20-30** kali per menit, saturasi **<95%**, sesak napas tanpa distress pernapasan

Tempat Perawatan

RS Lapangan, RS Darurat COVID-19, RS Non Rujukan, RS Rujukan

Terapi

Favipiravir, Remdesivir 200 mgIV, Azitromisin, Kortikosteroid, Vitamin C, D, Zinc, Antikoagulan LMWM/UHF berdasarkan evaluasi Dokter Penanggung Jawab (DPJP), pengobatan komorbid bila ada, terapi O2 secara noninvasif dengan arus sedang sampai tinggi (HFNC)

Lama Perawatan

10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV



Pasien Berat atau Kritis

Gejala

Demam, batuk (umumnya batuk kering ringan), fatigue atau kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indra penciuman/anosmia, kehilangan indra pengecapan atau ageusia, malgia dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit/perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas **>30** kali per menit, saturasi **<95%**, sesak napas tanpa distress pernapasan

Kondisi Kritis

ARDS/Gagal napas, sepsis, syok sepsis, dan multiorgan failure

Tempat Perawatan

HCU/ICU RS Rujukan

Terapi

Favipiravir, Remdesivir 200 mgIV, Azitromisin, Kortikosteroid, Vitamin C, D, Zinc, Antikoagulan LMWM/UHF berdasarkan evaluasi Dokter Penanggung Jawab (DPJP), pengobatan komorbid bila ada, HFNC/Ventilator, terapi tambahan

Lama Perawatan

Sampai dinyatakan sembuh oleh DPJP dengan hasil PCR Negatif dan klinis membaik



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV

Dalam infografis tersebut, Minfo turut mengingatkan agar pasien yang menjalani isolasi mandiri/karantina mandiri, selain memenuhi syarat klinis, juga harus memperhatikan syarat rumah dan proses terapi. Obat-obatan yang disebutkan tersebut, harus berdasarkan resep dokter.

“Jangan lakukan *self-medicating* tanpa konsultasi dan pengawasan nakes maupun petugas Puskesmas,” imbau Admin Kominfo.

Diingatkan pula, selama masa perawatan untuk tidak abai menaati dan mematuhi protokol kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, lakukan pola hidup bersih dan sehat, hindari stres, istirahat cukup serta rutin aktivitas fisik. “Jangan lupa semua tingkatan ini juga tetap perlu pantauan dokter/tenaga Kesehatan, ya Sob,” kata Minfo mengingatkan SobatKom (sebutan untuk Pengikut Media Sosial Kominfo).

World Health Organization (WHO) juga telah menyediakan kolom khusus seputar pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus melalui portal <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga menyediakan fitur tanya jawab serupa melalui <https://COVID19.go.id/tanya-jawab>, dan apabila masyarakat ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi pandemi Covid-19, dapat menghubungi Hotline 119.



Balmon Aceh

Dinamika Kinerja
Balmon Aceh dalam
Masa Pandemi
Covid-19

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang bencana non alam penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional merupakan tonggak bersejarah di mana dunia dan khususnya bangsa Indonesia bersiap menghadapi kondisi yang tidak normal perlu segera melakukan perubahan strategi dan arah kebijakan untuk menghadapi dan menangani bencana yang ada agar tepat sasaran.

Kondisi tersebut juga direspon dengan cepat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Kerja di kantor dan Fleksibilitas Tempat Bekerja/Flexible Working Space ((FWS) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Balmon SFR Kelas II Banda Aceh yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo juga bersiap untuk mengatur strategi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dengan kondisi yang berbeda bahkan belum pernah dilalui pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan merubah arah strategi bahkan pengalokasian anggaran agar sesuai dan tepat sasaran.

Dinamika pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balmon SFR Kelas II Banda Aceh juga menyesuaikan dengan aturan yang ada di mana pegawai dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi dua

tempat yaitu ada yang bekerja dari kantor dan ada yang bekerja dari luar kantor. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di mana pegawai harus siap dengan perubahan yang ada walaupun bekerja dari luar kantor harus tetap bekerja dan *standby* apabila diperlukan dengan segera untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan.

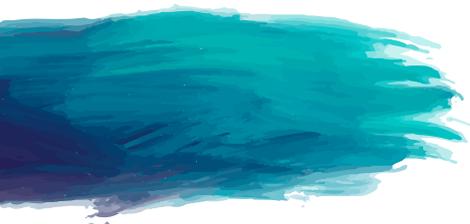
Target kinerja dan sasaran realisasi anggaran yang telah direncanakan menemui kendala dan tantangan di mana pergerakan pegawai tidak dapat leluasa dilakukan dengan adanya pembatasan-pembatasan di berbagai wilayah dan tempat hal ini menjadi salah satu hambatan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balmon SFR Kelas II Banda Aceh yang mengharuskan pelaksanaannya terjun kelapangan karena terkait dengan hal teknis seperti pengukuran, inspeksi, pemantauan dan penanganan gangguan frekuensi radio yang tidak bisa semata-mata melakukannya dari kantor saja harus tetap terjun ke lapangan. Namun kondisi sedang tidak mendukung karena adanya pandemi Covid-19 namun target harus tetap terlaksana.

Kondisi tersebut menguras pikiran dan tenaga untuk menyasati bagaimana agar target dan sasaran kinerja dapat tercapai, namun kondisi para pegawai juga tetap harus terjaga

kesehatannya. Dengan adanya peluang dan strategi kebijakan yang ada pemerintah memberikan pengecualian kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan untuk tetap dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya terkait dengan bidang telekomunikasi.

Berdasar dari kondisi tersebut Pimpinan dan Staf Balmon SFR Kelas II Banda Aceh sesuai dengan peribahasa "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" mengoptimalkan peluang yang ada dengan mempercepat kinerja dan realisasi anggaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan baik di dalam kantor maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

Tantangan yang juga perlu pemikiran dan tenaga yang prima adalah ketika ada pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, hal tersebut juga mengharuskan adanya strategi yang baru lagi. Namun dengan tetap optimis dan percaya kondisi ini bisa kita lalui bersama-sama dengan saling menguatkan satu sama yang lain pada akhirnya capaian kinerja dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2020 tidak jauh meleset dari target yang sudah ditetapkan, masih dalam batas toleransi kewajaran. Semua ini berkat kerja keras, kerja sama dan kerja cerdas serta kerja Ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



Berbekal pengalaman yang ada, pada awal tahun 2021 hingga saat sekarang ini pengalaman yang ada dijadikan pelajaran berharga, namun seiring waktu tantangan juga mengalami dinamika yang berbeda sehingga perlu terus sama-sama memacu optimis dan semangat untuk menghadapi kondisi dalam masa pandemi Covid-19 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan jangan pernah kendur.

Saat ini sebahagian besar pegawai Balmon SFR Kelas II Banda Aceh sudah di diberikan Vaksinasi Covid-19. Kondisi tersebut merupakan salah satu upaya mendukung program Pemerintah untuk mencapai Herd Immunity (kekebalan kelompok) dan tentunya untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas II Banda Aceh yang bahagian tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya, kita semua berharap kondisi bisa segera pulih kembali dengan tetap saling mendukung dan bahu-membahu demi tercapainya Indonesia maju dan masyarakatnya juga sejahtera.





***Pacu semangat, tingkatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi
serta iman dan taqwa untuk raih
prestasi Indonesia Jaya.***

Balmon Jakarta

Pandemi Covid-19 Tidak Menyurutkan Pelayanan UNAR

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk pertama kali diuji coba pada pertengahan tahun dan akhir tahun 2019 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balmon Jakarta), tepatnya pada pelaksanaan UNAR Non Reguler tanggal 30 Juni 2019 dan 15 Desember 2019. UNAR berbasis CAT ini ditujukan bagi peserta tingkat Penggalang dan Penegak.

Jumlah peserta UNAR pada tahun 2019 keseluruhan mencapai 664 orang dengan tingkat kelulusan 85.24% yaitu sebanyak 566 orang. Pelaksanaan UNAR berbasis CAT tersebut disambut baik oleh Organisasi Amatir Radio (ORARI) dan para penggiat amatir radio, karena UNAR CAT dinilai lebih cepat, efektif, efisien dan transparan sehingga program

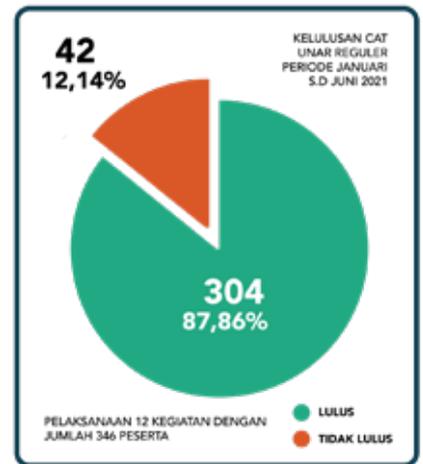
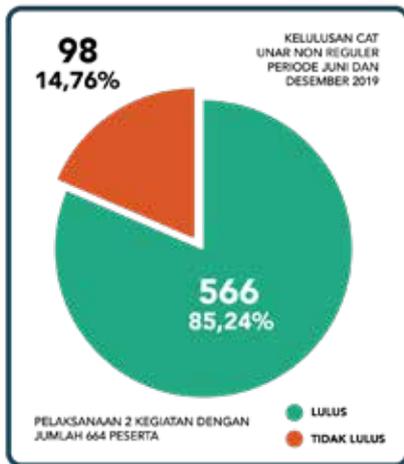
pelayanan UNAR berbasis CAT menjadi bagian pelayanan yang reguler dan harus dilaksanakan secara terjadwal setiap bulannya.

Menurut Ketua Orari Daerah DKI Jakarta (ODJ) Eko Cahyono, ODJ mengapresiasi kinerja Balmon Jakarta yang pantang surut walaupun dengan adanya pandemi Covid-19 dalam melayani anggotanya untuk kenaikan tingkat dan calon anggota untuk anggota baru.

Pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, pelaksanaan UNAR Reguler Berbasis CAT dilaksanakan untuk semua tingkatan (siaga, penggalang, penegak) dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kali dalam 1 (satu) tahun dan mencapai jumlah peserta 693 orang dengan tingkat kelulusan 83,84% atau 581 orang.

Sementara pada tahun 2021, situasi pandemi Covid-19 tidak menghalangi keinginan para penggiat Amatir Radio untuk terus meningkatkan potensi dan melatih diri dalam kegiatan Amatir Radio, serta saling berkomunikasi antar stasiun amatir radio dengan tetap taat dan tertib dalam penggunaan frekuensi radio. Hal ini terbukti dari keikutsertaan para penggiat Amatir Radio yang terus meningkat sampai diikuti oleh pejabat negara seperti Pada periode CAT UNAR IX Tahun 2021 juga diikuti oleh salah satu Anggota Komisi I DPR RI Bapak Dave Akbarshah Fikarno pada Tingkat SIAGA.

Untuk tahun 2021 pelaksanaan CAT UNAR Reguler dijadwalkan dan diselenggarakan sebanyak 2 kali per bulan (24 kali kegiatan untuk tahun 2021) oleh Balmon Jakarta di lingkungan kantor di wilayah Ciracas, Jakarta Timur.



Pada semester pertama 2021 telah dilaksanakan 12 kegiatan CAT UNAR Reguler yang diikuti sebanyak 346 peserta terdiri dari 298 peserta Siaga, 37 Penggalang dan 11 Penegak. Adapun peserta yang Lulus adalah sebanyak 304 peserta (87,86%) terdiri dari 259 peserta Siaga, 35 Penggalang dan 10 Penegak.

Sementara pada semester yang sama pada tahun 2020 lalu hanya sebanyak 169 orang atau meningkat 79,8%. Peningkatan ini terwujud atas Kerjasama Balmon SFR Kelas I Jakarta dengan ODJ dan ORDA Jawa Barat untuk mensosialisasikan keanggotaan dan calon anggota tentang pentingnya Ujian Negara Amatir Radio, agar penggunaan frekuensi radio untuk layanan amatir benar-benar dipahami dan tidak disalahgunakan sehingga berakibat fatal.

Kegiatan CAT UNAR Reguler yang diikuti oleh para peserta ujian dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 baik kepada petugas pelaksana maupun kepada peserta UNAR sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Alur Pelaksanaan Ujian



Balmon Makassar

Semangat Berkarya di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: Dewi Arisyanti – PFR Ahli Muda Balmon Makassar

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia, tidak menyurutkan semangat Balai Monitor SFR Kelas I Makassar yang dipimpin oleh Helmi Wartapane untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan demi kegiatan dilaksanakan dengan penuh semangat. Berbagai strategi diterapkan untuk mencapai kinerja dengan sistem dan alur yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

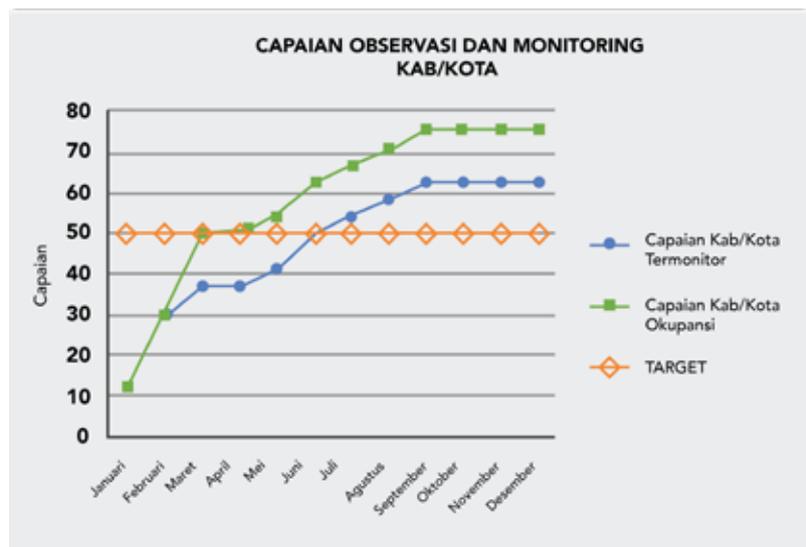
IFas Fest yang merupakan ajang persaingan prestasi bergengsi pada Direktorat SDPPI pun menjadi bukti nyata yang diukir oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada tahun 2020. Balmon Makassar berhasil meraih 3 penghargaan pada 3 kategori, yaitu Pemenang I SDPPI Creator Kategori Best Short Movie, Pemenang II SDPPI Idea Kategori Idea & Innovation, dan Pemenang II SDPPI Choice Award Kategori Penyelenggara MOTS Terbaik.

Untuk Target Kinerja Tahun Anggaran 2020, Balai Monitor SFR Makassar juga telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan selama beberapa bulan menghambat realisasi kegiatan, namun pengawasan terhadap penggunaan frekuensi tetap dilaksanakan walaupun dengan cara Work From Home (WFH).

Dukungan Fasilitas Monitoring yang dapat dikendalikan dari jarak jauh membantu pelaksanaan pengawasan penggunaan frekuensi di Wilayah Sulawesi Selatan selama PSBB dilaksanakan dari akhir bulan Maret hingga awal bulan Juli Tahun 2020. Sehingga Target Kinerja pada indikator ISR termonitor, Hasil monitor teridentifikasi, Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan *transport table* mampu tetap berjalan selama WFH.



Prestasi IFas Fest Balai Monitor SFR Kelas I Makassar TA. 2020



Beberapa indikator target kinerja mengalami revisi dikarenakan pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2020. Salah satunya untuk indikator persentase Pengukuran TV dan Radio Siaran, di mana pada awal tahun Target Kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 40%, kemudian menurun menjadi 35%. Untuk Capaian kinerja pada indikator ini telah dicapai pada bulan Februari 2020 sebelum penerapan PSBB, hal ini disebabkan oleh strategi kegiatan pengukuran TV dan Radio Siaran FM dititikberatkan pada wilayah layanan terpadat terlebih dahulu sehingga capaian kinerja untuk indikator ini dapat tercapai lebih awal dan hingga akhir tahun capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 93.07%.

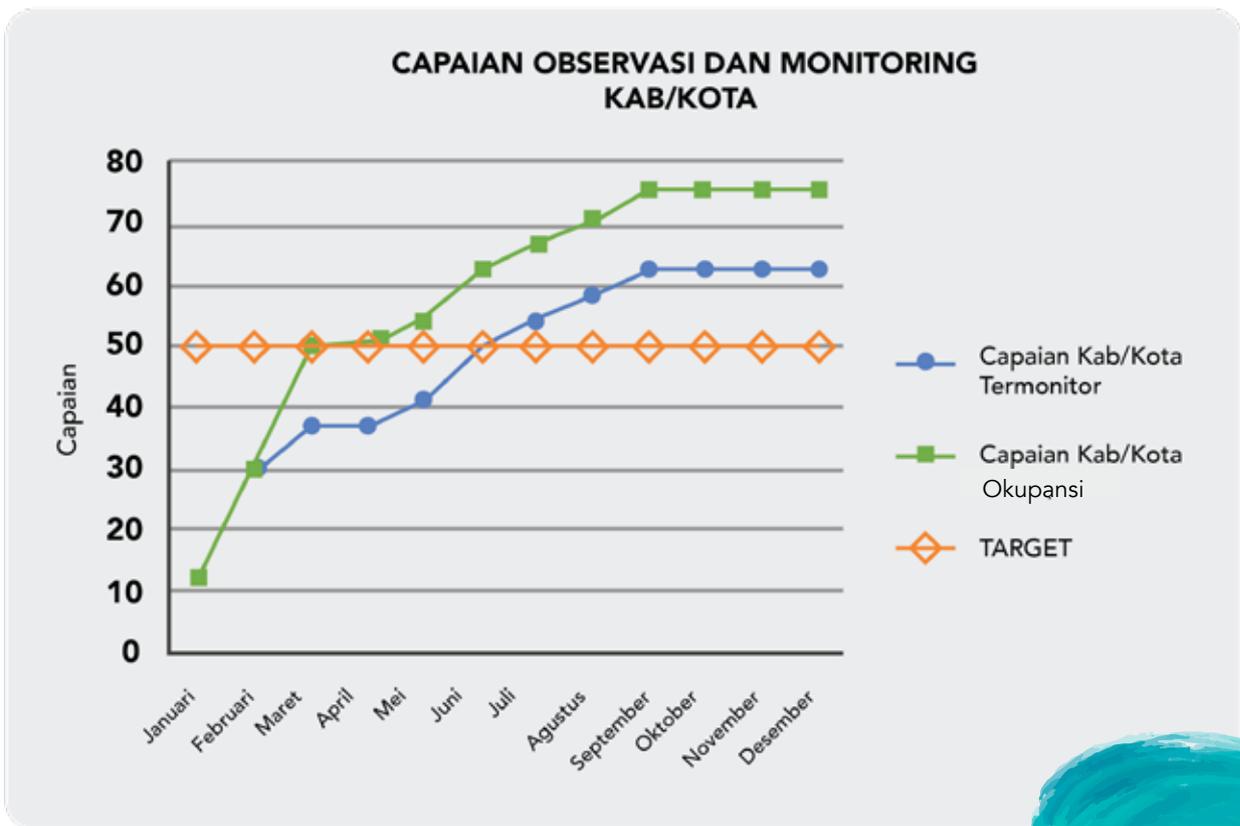
**Tabel 1. Capaian Kinerja Balmon
SFR Kelas I Balmon Makassar**

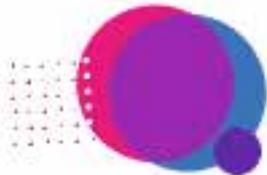
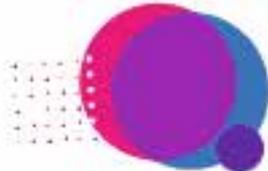
No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	Persentase
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1. Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	50	75%	150%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35	93.06%	265.91%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	60	64.13%	106.88%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90	100%	111.11%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ ukur di UPT	83%	91.50%	110.24%
		6. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12	26	216.67%
		7. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritim	100	100%	100%

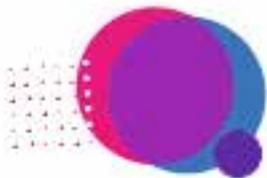
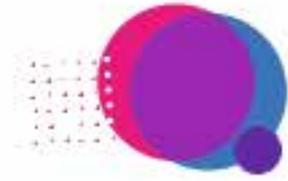
Indikator kinerja yang juga mengalami revisi pada pertengahan tahun 2020 adalah Persentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota, dimana pada awal tahun ditetapkan sebesar 80%, kemudian berubah menjadi 50%. Sulawesi Selatan sebagai wilayah Layanan Kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar memiliki 24 Kabupaten Kota, sehingga untuk mencapai target tersebut harus melaksanakan okupansi penggunaan frekuensi di 12 Kabupaten/ Kota.

Menjadi suatu tantangan yang sangat berat di tengah pandemi untuk mencapai 12 Kabupaten/Kota tersebut dikarenakan beberapa wilayah tergolong zona merah

dan menerapkan pembatasan perjalanan di Kabupaten/Kota tersebut. Pada bulan Juni 2020, di tengah pelaksanaan PSBB target tersebut dapat tercapai dengan menggunakan bantuan perangkat transportable pada 3 Kabupaten, yaitu Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara. Hingga Pada akhir tahun tercapai target sebesar 75% untuk indikator kinerja ini. Dengan berbagai kendala dan tantangan pada masa pandemi Covid-19 Balmon SFR Kelas I Makassar mampu mencapai seluruh target Kinerja TA. 2020 yang telah ditetapkan.







Balmon Merauke

Walau Sedang Tidak Baik-Baik
Saja, Kitorang Tetap Semangat

Merauke – Dalam mengemban tugas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di 5 (lima) kabupaten yang berada di ujung timur Wilayah Indonesia.

Kelima kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Mappi. Pembagian wilayah kerja ini berdasarkan Permen Kominfo No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Dalam mengemban tugas sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Balmon Merauke senantiasa mengedepankan nilai-nilai semangat, disiplin, profesional, dan integritas. Sehingga walaupun masa pandemi, program kerja dan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan lancar.

Pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja Balmon Merauke selama pandemi menemui banyak kendala. Salah satunya adalah pembatasan akses keluar masuk wilayah yang diberlakukan dengan persyaratan yang berbeda-beda setiap kabupaten.

Khususnya di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat yang tidak dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara.

Hingga saat ini, kabupaten yang disebut terakhir belum tersentuh selama masa pandemi dikarenakan adanya pelarangan transportasi udara.

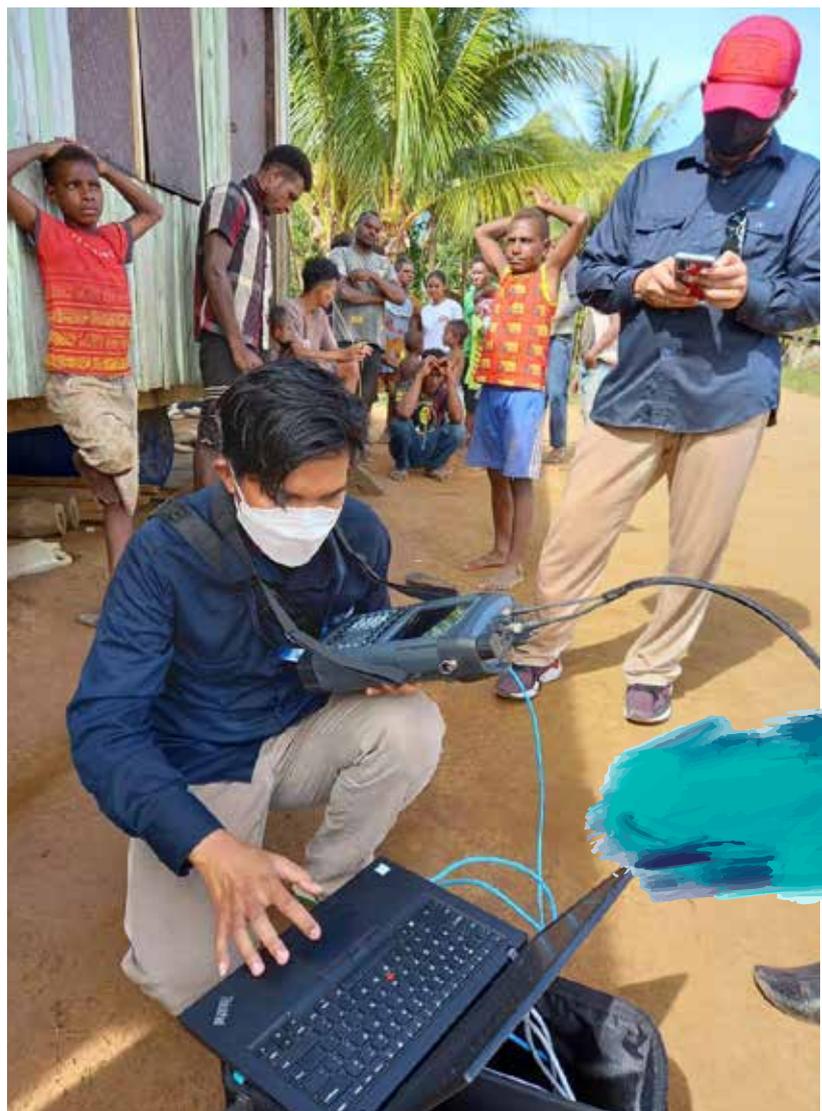
Dalam mengatasi kendala tersebut, Balmon Merauke memutuskan untuk memusatkan pelaksanaan

kegiatan dan pelayanan di Kabupaten Merauke dan sekitarnya yang dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat.

Walaupun demikian, prosedur perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tetap harus dipenuhi, seperti pemberlakuan SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) bagi pelaku perjalanan dengan transportasi darat ke Kabupaten Boven Digoel.

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak diharuskan mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan aparat setempat.

Meskipun pemberlakuan aturan yang ketat, pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio, Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembukaan loket pelayanan Perizinan ISR Maritim untuk nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke berhasil dilaksanakan dan mendapatkan apresiasi yang tinggi, baik dari Pimpinan Pemerintah Daerah, maupun dari para nelayan dan pemilik kapal di Merauke. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya koordinasi yang intens dengan para pihak terkait.



Selain pelayanan tersebut, Balmon Merauke tetap melaksanakan tupoksi utama, yaitu monitoring dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Penanganan gangguan frekuensi radio maritim di Bandara Mopah Merauke dan penanganan gangguan frekuensi radio di Wilayah Perbatasan NKRI dengan Papua New Guinea di Desa Mutimangge, Boven Digoel sebagai contoh upaya pelaksanaan kinerja oleh Balmon Merauke.

Balmon Merauke juga mengoptimalkan penggunaan Stasiun Monitoring Transportable yang ditempatkan di Kecamatan Merauke dan Kecamatan Tanah Merah dalam pemantauan okupansi penggunaan frekuensi radio, di mana akses perangkat monitoring dapat dilakukan dengan remote jarak jauh.

Pelaksanaan kegiatan saat ini juga difokuskan pada dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dilaksanakan di Papua (termasuk Kab. Merauke) pada bulan Oktober 2021, dimana Balmon Merauke turut mengambil peran dalam pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kelancaran kegiatan PON XX.

Dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang selalu siap. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian dalam persiapan pelaksanaan kegiatan adalah kesehatan.

Untuk itu, Balmon Merauke melaksanakan pemeriksaan Covid-19 secara rutin setiap dua pekan kepada semua pegawai. Pelaksanaan vaksinasi menjadi prioritas utama di mana sebanyak 28 dari 36 pegawai telah mendapatkan 2 dosis vaksin.

Penerapan protokol kesehatan di lokasi kantor diwajibkan kepada seluruh pegawai dan tamu. Penyediaan masker dan *sanitizer* serta vitamin juga dilaksanakan untuk membantu pencegahan penularan virus Covid-19.

Selama masa pandemi, Balmon Merauke berusaha tetap berkinerja dengan membangkitkan semangat dan berusaha menjaga daya juang pegawai untuk *survive* dari kondisi dan situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Hal ini tentunya berkat dukungan dan bimbingan dari seluruh jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal SDPPI.

**Balmon Merauke
senantiasa
berjuang agar kita
semua masih bisa
bersenandung 'Dari
Sabang Sampai
Merauke'.**

**PAPUA -
KITORANG
BISA !!**





Loka Monitor Gorontalo

*PPKM, Kunci - Kunci Adjustments,
dan Pesan Ibnu Sina*

PPKM adalah strategi kunci mencegah transmisi COVID-19 semakin meluas. Guna menjaga layanan esensial, salah satunya sektor telekomunikasi dapat tetap berjalan lancar tanpa gangguan, maka tugas pengendalian & pengawasan *resources* strategis spektrum frekuensi radio tidak boleh berhenti. Berikut enam kunci - kunci penyesuaian agar tetap aman & produktif di tengah pandemi ala Tim LG.

Dunia telah jauh berubah, wartanya bahkan tembus hingga tempat paling sunyi di bumi. Hingar bingar itu, menyesakkan. Semua teragap-gagap, tak peduli seberapapun pandainya. Sejak muncul Maret 2020 di Indonesia dan sebelumnya di Wuhan China, ujian besar umat manusia yang dikenali sebagai pandemi global ini telah menelan jutaan korban; tak hanya di negara dunia ketiga, bahkan di negara adikuasa dengan sistem kesehatan terbaik pun terdampak, beberapa kolaps. Daya survival manusia bereaksi kemudian, pelan-pelan keadaan terkendali, beberapa penyesuaian berhasil diterapkan pemerintah, komunitas, kelompok-kelompok masyarakat.

Lahir istilah normal baru. Orang-orang mulai kembali beraktivitas dengan penyesuaian protokol kesehatan. Cukup berhasil. Ekonomi meski masih lambat sudah mulai bangkit dari titik nadir. Di titik ini disadari teknologi banyak mengambil peran. Nyatalah bahwa program Indonesia Digital amat penting adanya. Slogan kita, Kominfo; "Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju" menemukan momentum yang tepat, ada ruang giant leap di sana. Pembatasan

interaksi manusia adalah *trigger* utamanya. Betapa tidak, satu-satunya ruang yang masih aman untuk saling sapa dan melanjutkan produktivitas hanyalah ruang – ruang maya, ruang digital. Karenanya dukungan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas datang dari berbagai pihak, dari Presiden dan masyarakat luas.

Cara bekerja juga total berubah, sebab untuk sektor *government* target capaian tak boleh turun, layanan kepada masyarakat harus tetap jalan apapun tantangannya. Beruntung di Kementerian Kominfo dan seluruh satkernya dengan cepat *adjust* dengan situasi. Tantangannya, penyesuaian yang telah menjadi jalan keluar masih terus diuji, belakangan muncul banyak varian baru, teranyar varian Delta yang lebih mematikan. Situasi kembali sulit, pertempuran kian berat dan tentu makin jauh dari kata selesai, but life must go on, yang penting penerapan tata kelola yang tepat. Di Gorontalo sendiri terdapat 6 pilar kunci *adjustments* yang konsisten diterapkan seluruh anggota tim agar bisa tetap perform, tetap produktif...

5M PLUS

Sejak dari pagar terluar, himbuan menegakkan protokol kesehatan sudah tampak jelas, ada banner edukasi berukuran besar. Petugas keamanan takkan segan mengingatkan bahkan menegur jika ada yang abai dengan protokol. Tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tersedia di berbagai tempat, outdoor maupun indoor. Cairan antiseptik ada di tiap-tiap sudut strategis. Seluruh pegawai dibekali kit anti covid-19 lengkap, termasuk masker medis standar tinggi yang harus dikenakan secara disiplin di area kantor.

Ringkasnya, protokol 5M secara sadar dilaksanakan dengan baik seluruh tim, di dalam maupun di luar kantor. Tak hanya itu, ada plusnya. Plusnya ini yang terpenting setelah seluruh ikhtiar manusia sudah paripurna dilakukan; DOA. Tim Gorontalo meyakini sepenuhnya bahwa Dialah sebaik-baik Pelindung, ia menjauhkan kita dari paparan pandemi seperti jauhnya timur dan barat, jauh yang tak mungkin bertemu. Begitu keyakinan psikologisnya.

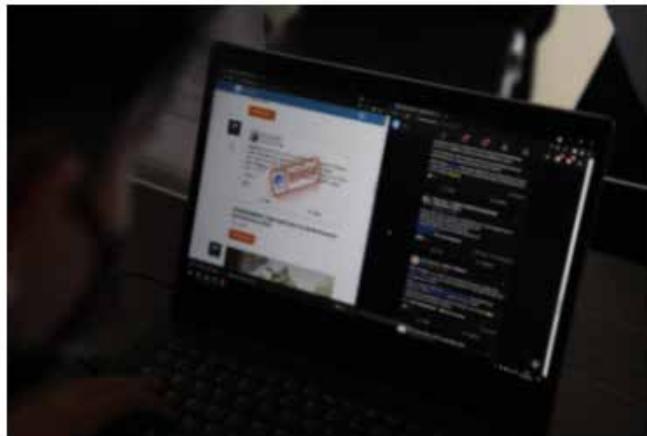


Sudah bukan rahasia lagi, selain pandemi juga ada infodemi. Kebanyakan kita tak cermat memilah informasi, banyak yang sesat karenanya dan menurunkan daya imunitasnya *caused by*. Bagaimana tidak, lebih dari resep dokter tiga kali sehari semua orang disuguhi berita mengerikan tentang *case fatality rate* (CFR), disinformasi tentang vaksinasi dan banyak hal melemahkan lainnya.

Program ini menekankan agar seluruh tim dan keluarganya cerdas memilah informasi; harus tahu perkembangan di luar tentang wabah namun terkendali dengan cukup mengupdate informasi maksimal dua kali dalam sehari, pagi dan sore saja. Menginternalisasi budaya konfirmasi ke sumber terpercaya atas setiap informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Memahami bahwa prinsip terhadap informasi yang berseliweran dengan mudah di platform sosial media seperti Whatsapp Grup, Facebook dan sejenisnya adalah dianggap salah sebelum terkonfirmasi benar. Ini dipimpin *top management*, *middle* dan *senior officer* di setiap kesempatan yang memungkinkan.



Literasi Sehat



Testing Reguler

Untuk memastikan tim terkendali dan sehat, telah terprogram agenda testing reguler di kantor, sekali dalam dua pekan. Setiap yang reaktif akan mendapatkan dukungan dan perhatian penuh test swab PCR dan layanan online pemantauan dari tim kantor ketika harus isolasi mandiri ataupun mendapatkan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan.

Flexible Working Space (FWS)

Kementerian Kominfo dan seluruh satkernya, salah satunya UPT Mon SFR Gorontalo, termasuk yang cukup *agile* dalam menerapkan pola bekerja *flexible working space* (FWS). Dukungan sistem yang dimiliki memadai, mulai dari platform *online meeting* hingga sistem *logbook* ketika bekerja di luar kantor; terdapat banyak *tools* untuk membantu produktivitas, di Gorontalo salah satunya dengan program *virtual engagement series*.



R & G

Ini bukan P&G, perusahaan multinasional yang produknya dipakai hampir sebagian besar masyarakat Indonesia dari desa hingga kota. Ini adalah program membangun imunitas riang dan gembira setiap waktu; memelihara suasana psikologis *happy* dalam situasi sulit. Pendekatannya macam-macam, bisa dengan olahraga bersama, dari senam, takraw, lari estafet, bulutangkis, quiz-quiz berhadiah, *sometimes* dengan Tiktokan, hehe.

Iman, Imun& Pesan Ibnu Sina



Seperti dijelaskan di bagian awal pada poin 5M plus, tim Gorontalo sangat meyakini spiritualitas sebagai benteng perlindungan dari segala macam wabah, penyakit; apapun keyakinannya. Inilah iman. Itulah sebabnya semua tim baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam setiap aktivitas ibadah secara sadar selalu menyisipkan doa keselamatan bersama, istilah populernya saling jaga dalam doa. Iman yang teguh akan membentuk imunitas yang kokoh dan tentu efektif menghalau segala macam penyakit yang ada di bumi, penyakit yang 'awas' mengintai insan yang lengah. Rumus andalan terakhir mengamalkan pesan Bapak Kedokteran Dunia, Ibnu Sina...

"Al-wahmishfud-dā-i, wal-ithmi'nānnishfud-dawā-i, wal-ṣabrbidāyah al-syifā"

Delusi (serba khawatir) adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan".

**...Hindari ilusi serba khawatir,
selalu tenang terkendali dan sabar.
Jangan lupa bahagia, pandailah
bersyukur, dalam segala keadaan.**

Zona Merah

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan pandemi virus corona di Indonesia telah memasuki gelombang kedua. Gelombang kedua terjadi begitu cepat dan dalam kurun tak sampai sebulan, kasus Covid-19 di Indonesia telah jauh melampaui gelombang pertama yang saat itu butuh 9 bulan untuk mencapai puncaknya. Mengutip laman covid19.go.id, per 18 Juli 2021, terdapat 180 zona merah Covid-19 di Indonesia.

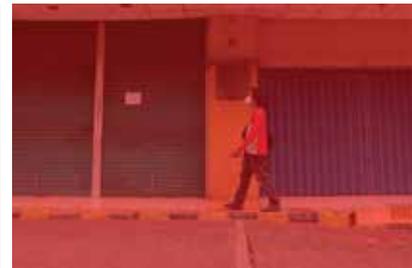


FOTO + TEXT : INDRA KUSUMA



Kurang lebih sebulan sudah sejak lonjakan drastis kasus Covid-19 ini diakibatkan oleh kemunculan beberapa varian baru Covid-19 yang telah masuk ke Indonesia, dan diperparah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Pemerintah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, yang resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Keputusan ini diambil karena meningkatnya kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir dan agar segera dapat membatasi penyebaran virus corona di Indonesia.





Berdasarkan data per Minggu (25/7/2021) total konfirmasi positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia menembus 3.166.505 orang. Dimana total kasus kesembuhan dari Covid-19 mencapai 2.509.318 orang, dan sebanyak 83.279 orang tercatat meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19.

Masyarakat diharapkan ikut menyebarkan edukasi terkait Covid-19 kepada orang-orang di sekitarnya seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan hingga vaksinasi. Diharapkan masyarakat tidak abai dan merasa kebal sesudah divaksin, sebab kekebalan komunal atau *herd immunity* baru dapat tercapai apabila vaksinasi telah mencakup 70 persen populasi.





Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan. Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Tanya Jawab Covid-19 dengan Prof. Wiku*



***Prof. Wiku Adisasmito adalah Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19**

Diolah dari tayangan Tanya Pakar Eps 1 (tayang pada 31 Maret 2021) dan Tanya Pakar Eps 2 (tayang 24 Mei 2021) yang dipublikasikan pada akun YouTube Lawan Covid-19 ID

Orang yang pernah/sedang positif Covid-19 tidak boleh divaksin. Bagaimana caranya tahu jika kita positif, terutama jika tidak bergejala?

Fungsi dari vaksinasi adalah untuk menimbulkan kekebalan. Jika seseorang sudah pernah terinfeksi dan sudah sembuh, maka sebaiknya vaksinasi dilakukan 3 bulan setelah sembuh. Namun apabila orang tersebut tidak pernah tahu apakah ia pernah tertular, dan kondisinya sehat, maka cara mengetahuinya bisa dilakukan dengan tes uji antibodi. Tetapi walaupun tidak mau dites, tidak masalah, karena Orang Tanpa Gejala (OTG) biasanya jumlah antibodinya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak apa-apa jika divaksin.

Apa saja kriteria orang yang boleh menerima vaksin Covid-19?

Pada prinsipnya orang yang bisa divaksin adalah orang yang sehat. Pertama, tidak memiliki gejala terkait Covid-19, misalnya batuk, pilek, sesak napas, suhu badan di bawah 37,5 derajat Celcius, tidak menderita beberapa penyakit komorbid seperti gangguan ginjal, jantung, kanker, dan autoimun. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmhg. Bagi penderita diabetes tipe 2, kadar HbA1c-nya harus di bawah 7,5%. Bagi penyintas Covid-19, bisa diberikan jika sudah 3 bulan sembuh.

Apakah penderita Covid-19 yang sudah tidak bergejala, namun hasil tes PCR masih positif dan nilai CT masih di kisaran angka 34, perlu melanjutkan isolasi mandiri?

Orang yang tertular Covid-19 tanpa gejala harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila bergejala, maka harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, ditambah 3 hari. Setelahnya sudah bisa beraktivitas kembali, namun ada beberapa tempat kerja yang mengharuskan pemeriksaan PCR dengan hasil negatif. Maka dari itu pastikan bahwa orang-orang yang pernah tertular betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan ketat setelah menjalani isolasi mandiri agar tidak menularkan pada orang lain.

Apa benar penyintas Covid-19 yang sudah isolasi mandiri selama 10 hari tidak perlu melakukan PCR lagi? Apakah virusnya sudah tidak menular? ✓

Betul, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5, setelah penyintas melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, tidak perlu lagi melakukan tes. Karena setelah 10 hari masa inkubasi, virusnya sudah tidak bisa menular lagi. Saat dilakukan tes memang berpotensi hasilnya positif, karena alat tes tersebut mengidentifikasi sisa-sisa dari virus tersebut. Pada prinsipnya, setelah isolasi mandiri, pastikan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Mengapa masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan? ✓

Penyebabnya antara lain berita-berita hoaks yang membuat masyarakat terkadang belum percaya pada Covid-19. Terkadang, menjalankan protokol kesehatan juga dirasa tidak nyaman sehingga mereka lengah. Padahal protokol memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, merupakan cara terampuh untuk bisa melindungi kita dari penularan Covid-19.



Apa penyebab meningkatnya jumlah kasus penderita Covid-19 di Indonesia? ✓

Jumlah kasus berpotensi meningkat apabila terjadi peningkatan mobilitas penduduk dan juga penurunan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Semakin banyak orang yang bepergian, mobilitas tinggi, maka kasus cenderung naik. Begitu juga jika protokol kesehatan tidak dijalankan dengan disiplin, maka kasusnya meningkat seperti yang terlihat di beberapa daerah.

Apakah vaksin dapat diberikan kepada penderita tuberculosis (TBC)? ✓

Pada prinsipnya vaksin diberikan pada orang yang sehat. Untuk orang yang pernah menderita atau sedang menderita TBC, selama dilakukan pengobatan yang rutin, maka orang tersebut bisa diberikan vaksinasi.

Apa yang dimaksud dengan phantasmia? ✓

Phantasmia adalah suatu gejala Covid-19 berupa gangguan penciuman sehingga merasa ada sesuatu bau, padahal tidak ada bau. Namun hal itu tidak menentukan adanya re-infeksi atau tidak. Jika ingin mengetahui apakah seseorang terinfeksi lagi atau tidak, maka ia harus periksa ke dokter untuk dilakukan pengecekan laboratorium. Jika hasil tes PCR-nya positif, ya artinya memang ada re-infeksi.



Infonya, penderita autoimun kelenjar tiroid tidak diperbolehkan menerima vaksin. Apakah ada surat resmi yang menyatakan hal tersebut? ✓

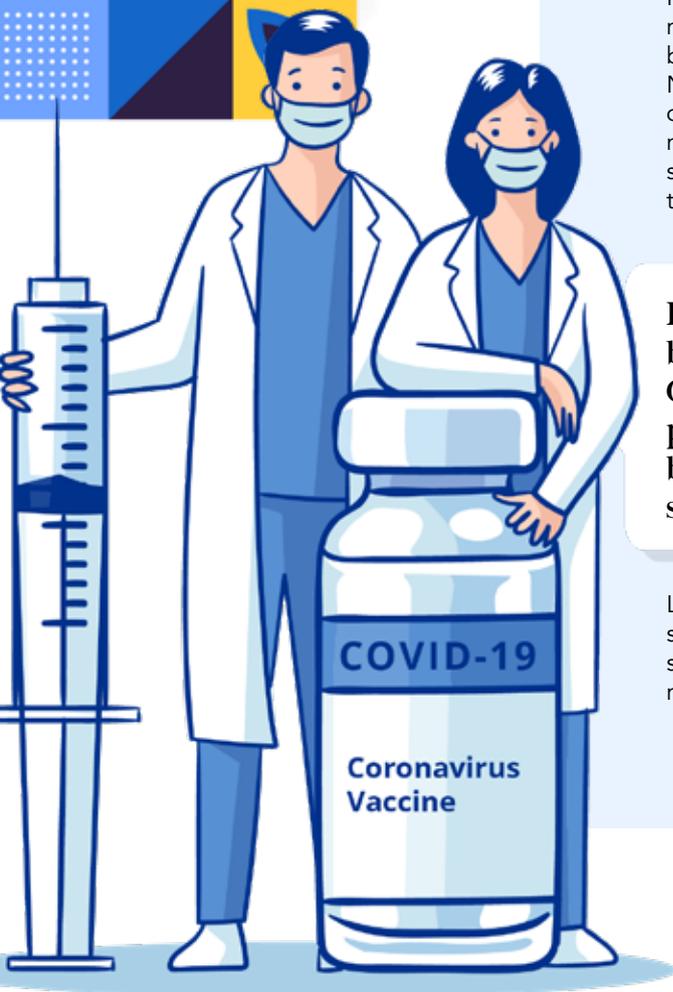
Menurut rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), orang-orang yang memiliki autoimun sebaiknya tidak divaksinasi kecuali dalam kondisi remisi atau terkontrol. Untuk tahu kondisi tersebut sebaiknya memeriksakan ke dokter.

Apakah orang yang memiliki alergi terhadap obat-obatan seperti obat anestesi, sulfa, dan parasetamol, boleh menerima vaksin? Akankah ada efek samping? ✓

Menurut rekomendasi PAPDI, orang-orang yang memiliki alergi sebaiknya tidak divaksin karena berpotensi menimbulkan reaksi yang lebih besar. Namun tetap perlu diperiksa ke dokter terlebih dulu untuk tahu keadaannya. Vaksin Covid-19 tidak mengandung parasetamol, sulfa, maupun anestesi, sehingga kemungkinan reaksi terhadap obat-obat tersebut tidak ada.

Bagaimana prosedur lokasi dan jarak bagi jenazah yang sudah terinfeksi Covid-19? Jika dimakamkan di pemakaman umum, apakah boleh berdekatan dengan pemukiman dan sumber air masyarakat? ✓

Lokasi pemakaman Covid-19 direkomendasikan setidaknya berjarak 500 meter dari pemukiman, sedangkan jarak dengan sumber air sebaiknya minimal 50 meter.





KOMINFO

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BESERTA SELURUH JAJARAN

Turut Berduka Cita



Atas Wafatnya:

H. HARMOKO

7 FEBRUARI 1939-4 JULI 2021

MENTERI PENERANGAN (1983-1997)

Semoga almarhum husnul khotimah
dan mendapatkan tempat mulia di sisi-Nya.

Apel Persada untuk Bapak Komunikasi Publik H. Harmoko

Saya berdoa kiranya almarhum Bapak H. Harmoko, Menteri Penerangan sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-10 dengan Masa Jabatan 1997-1999, dapat beristirahat dalam damai dan mendapat tempat yang layak di surga yang kekal,

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Minggu, 4 Juli 2021



Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya yang berperan besar dalam kemajuan bangsa, terutama di bidang penerangan dan komunikasi publik. Adalah H. Harmoko, putra dari almarhum Samirun Prawiro.

Duka yang mendalam atas kepergian mantan Menteri Penerangan itu dirasakan oleh keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Harmoko merupakan tokoh bangsa, mantan pejabat pemerintahan dan wakil rakyat yang memberikan perubahan paradigma bagi sektor komunikasi nasional. Sebab, di masa transisi era reformasi, kita tahu bahwa Kementerian Penerangan yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi salah satu institusi pemerintahan yang mempunyai peran penting di tengah dinamika sosial kala itu.

Menkominfo Johnny G. Plate mewakili pemerintah memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum H. Harmoko di peristirahatan terakhir. Bertindak sebagai inspektur upacara, Menteri Johnny persembahkan jasa dan pengabdian almarhum kepada pemilik-Nya.



Saya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum H. Harmoko, mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia era Kabinet Pembangunan, putra dari almarhum Bapak Samirun Prawiro



Menteri Penerangan sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-10 dengan Masa Jabatan 1997-1999

“Saya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum H. Harmoko, mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia era Kabinet Pembangunan, putra dari

almarhum Bapak Samirun Prawiro,” tutur Menteri Johnny dalam upacara Apel Persada pemakaman H. Harmoko di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Senin, 5 Juli 2021.

Pengabdian dan dedikasi Pak Harmoko kepada bangsa dan negara ditandai dengan beberapa gelar penghargaan, diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adhi Pradana, dan Darjah Yang Muli Panglima Setia Mahkota (Malaysia) berhak menyandang gelar Tan Sri, serta beberapa penghargaan lainnya.

Bagi Menkominfo Johnny G. Plate, generasi penerus bangsa perlu kiranya mengenang dan meneruskan gagasan, pengabdian dan karya dari mending Pak Harmoko.



Jasa dan Pengabdian di Industri Pers

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers mengambil peran sentral dalam kemajuan bangsa. Dalam perkembangannya hingga di era teknologi digital saat ini, industri pers terus menunjukkan eksistensinya karena ditopang oleh kekuatan organisasi atau komunitas yang tidak sedikit jumlahnya di Indonesia.

Berbicara mengenai organisasi pers, Pak Harmoko adalah salah satu tokoh bangsa yang juga ikut berkontribusi di dalamnya. Hal itu tercermin dalam kepemimpinannya di beberapa organisasi, yakni:

- 1 **1970-1972**
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jakarta
- 2 **1973-1983**
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia
- 3 **1973-1983**
Pengurus Serikat Grafika Pers
- 4 **1979-1984**
Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Penerbit Surat Kabar
- 5 **1980-1983**
Wakil Ketua Konfederasi Wartawan ASEAN
- 6 **1981**
Ketua Muktamar Mass Media Islam Internasional Pertama
- 7 **1982**
Ketua Asian Agricultural Journalists and Writers Association

Melihat sepak terjang pengabdian dan dedikasinya di industri pers tanah air, kita patut bersyukur bahwa Pak Harmoko meninggalkan sebuah warisan penting dengan memperkuat organisasi atau komunitas pers, tidak saja di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Atas dasar itulah, pers sebagai pilar demokrasi ikut mengantarkan Indonesia mewujudkan cita-cita para *the founding father* sebagai negara besar dan menuju negara maju.

Pak Harmoko juga dikenal sebagai Bapak Komunikasi Publik karena kepiawaiannya memotret Indonesia dalam menyambut

era teknologi informasi dan komunikasi. Khusus di sektor komunikasi, Pak Harmoko melihat arus informasi berkembang begitu pesatnya. Sehingga, pemerintah perlu menghadirkan tata kelola komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan dan program strategis.

Atas dasar itulah, dalam catatan sejarahnya di era Kabinet Pembangunan, Pak Harmoko dikenal sebagai pencetus Gerakan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan (Kelompencapir). Lahirnya Kelompencapir bertujuan untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Kini dikenal sebagai *Government Public Relations (GPR)* atau humas pemerintah.

Kini, usai sudah pengabdian dan dedikasi Pak Harmoko kepada bangsa, negara dan masyarakat. Kiranya, segala kebaikan, ketulusan dan kontribusinya kepada Indonesia menjadi bekal ibadah dalam menghadap Sang Khalik.

"Kami menyampaikan terima kasih yang besar atas pengabdian, karya dan karya beliau selama mengabdikan melalui kebijakan pembangunan di sektor media, pers, penerangan dan komunikasi publik," ucap Menkominfo Johnny G. Plate.

Selamat jalan mantan Menteri Penerangan RI dan Bapak Komunikasi Publik, H. Harmoko.







MEDIS DAN MEDIA

Susu sapi, lambangnya beruang, iklannya naga. Itulah bahan becandaan netizen terhadap sebuah produk susu yang jadi bahan rebutan begitu pandemi gelombang kedua meruyak. Terlihat dalam foto dan video segelombang orang menyerbu tumpukan stok susu tersebut begitu pintu supermarket dibuka. Orang tidak hanya mengambil satu dua kaleng, melainkan berlusin-lusin dan berkotak-kotak. Saling sikut saling grawut. *Chaos* terjadi, meski hanya di satu *spot* saja di keluasan swalayan. Petugas memilih menyingkir tak kuasa menahan *panic buying* dari massa.

Tak dapat dimungkiri, memang jenis susu ini sepertinya sudah menjadi menu wajib bagi mereka yang percaya akan khasiatnya untuk membentengi daya tahan tubuh. Sebelum dan, apalagi, setelah pandemi. Padahal jika mengacu pada pendapat para pakar, secara media tidak terdapat keistimewaan khusus khasiat gizi dan nutrisi yang melebihi produk susu lainnya.

Namun keyakinan masyarakat bicara lain. Produk ini dianggap memiliki khasiat obat. Tak heran jika mereka yang menempuh isolasi mandiri alias isoman dengan penuh keyakinan menempatkan minuman ini dalam daftar prioritas stoknya, baik belanja sendiri maupun mendapat kiriman. Besar kemungkinan, keyakinan itulah yang lebih berperan membawa kesembuhan.

Fenomena susu ini bukan hoaks, hanya lucu saja jadinya. Kehadirannya mencerminkan kehausan orang untuk tetap sehat dan selamat, yang menjadi tren sepanjang masa. Pandemi mendorong orang untuk lebih giat mencari informasi berisi kiat dan obat untuk menghadapinya. Meski sebelum krisis ini simpang siur informasi kesehatan juga sudah membanjir. Pandemi membuatnya menjadi tsunami.

Kabar kabur soal kesehatan ini merupakan salah satu kategori utama perhoaksan dunia. Selepas pemilu yang penuh adu hoaks di tahun 2019, misalnya, Kominfo

mencatat bahwa hoaks kesehatan lah yang muncul menggantikan isu panas tersebut.

Siapa yang menanggung untung dari disinformasi kesehatan? Apakah ada mafia obat atau mafia empon-empon terlibat agar mendapatkan keuntungan ekonomi? Ataukah sekadar perbuatan iseng? Adakah peran kekuatan politik yang bermain dalam rangka delegitimasi? Adakah keterlibatan elit global? Semua mungkin (makanya biar "aman" kita sampaikan dalam bentuk tanda tanya).

Hoaks Medis

Fenomena penyebaran informasi hoaks seputar kesehatan menjadi kajian bagi dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dr. Jenny Ratna Suminar, M.Si. Bersama dosen Fikom Unpad lainnya, Dr. Purwanti Hadisiwi, M.Ext.Ed., dilaporkan situs web Universitas Padjadjaran, Jenny mengkaji mengenai peran penangkis hoaks (*hoax buster*) dalam membendung informasi kesehatan yang beredar di grup WhatsApp.'

Menurut Jenny, hoaks kesehatan sangat mudah dipercayai oleh pengguna media sosial. Apalagi oleh kelompok usia 40 tahun ke atas. Jenny menganalogikan kelompok usia ini dengan istilah kelompok *baby boomers* atau digital *immigrant* di media sosial. Kelompok ini, kata Jenny, rentan menelan beragam informasi kesehatan dengan mentah. Padahal, informasi tersebut belum tentu benar. Kurangnya literasi penggunaan media sosial yang baik akan mudah memicu hoaks ini menyebar luas. "Orang Indonesia sangat mudah menerima dan mengiyakan informasi yang belum tentu kebenarannya," kata Jenny.

Dengan kemampuan literasi yang kurang, ditambah tidak melakukan konfirmasi akan kebenaran informasi tersebut mendorong

orang mudah percaya dan kembali menyebarkan hoaks tersebut ke grup WhatsApp lainnya.

Jenny mencontohkan, banyak orang percaya mengonsumsi produk tertentu yang diklaim ampuh menyembuhkan penyakit. Padahal, belum ada sumber referensi ilmiah yang membenarkan klaim tersebut. Sejatinya, beragam informasi terkait kesehatan perlu dibarengi dengan bukti ilmiahnya.

"Kita sering menerima informasi, membacanya, lalu menyebarkan kembali tanpa dibarengi konfirmasi terlebih dahulu. Bahkan, ada orang yang menerima lalu melihat judulnya bagus, dan langsung disebar, tanpa dibaca isinya," papar Jenny.

Meresahkan. Selain bisa membagongkan, informasi kesehatan yang sesat juga membahayakan.

Peran Media

Maka seorang dokter asal Amerika, Vivek Murthy, seperti dipalorkan Republika, menegaskan bahwa informasi kesehatan keliru yang banyak beredar di media sosial bisa memperburuk dan memperpanjang pandemi COVID-19. Karenanya, mantan wakil laksamana dalam Public Health Service Commissioned Corps tersebut mendesak platform media sosial termasuk Twitter dan Facebook untuk serius mengatasi problem ini.

Murthy juga meminta agar platform media sosial membuat seperangkat pedoman yang benar-benar bisa membangun lingkungan informasi kesehatan yang kredibel bagi pengguna media sosial. "Hari ini, kita hidup di mana informasi yang salah menimbulkan ancaman yang berbahaya bagi kesehatan bangsa. Perusahaan teknologi modern telah membiarkan informasi yang salah dan disinformasi menyebar ke seluruh platform mereka," kata Murthy.

Murthy juga mendesak keseriusan aplikasi dalam memotong rantai hoaks kesehatan dan informasi keliru tentang kesehatan khususnya COVID-19. Misalnya dengan meningkatkan pengawasan secara ketat, atau sanksi yang lebih lebih agresif kepada siapapun penyebar dan pembuat informasi menyesatkan tentang COVID-19.

Literasi

Pengetahuan kesehatan adalah pengetahuan yang cukup pelik dan rumit. Tak sebarang orang dapat menguasainya dengan baik. Proses akademisnya panjang dan selektif banget. Hanya sebagian kecil yang mampu benar-benar literate. Itupun jumlahnya makin berkurang karena banyak tenaga kesehatan yang menjadi martir dalam wabah ini.

Jadi, mungkin saja ketika membangun atau membagikan berita salah, baik secara sengaja maupun tak sadar ataupun sekadar becanda, kita secara tak langsung memperburuk pandemi ini. Becandaan atau berita nyinyir tentang vaksin mungkin kita anggap biasa, namun bagi orang yang anti atau takut vaksin, bisa mempertebal penolakan akan vaksinasi. Pada gilirannya, secara tak langsung, *sorry to say*, kita menjadi salah satu sekrup dalam mesin pembunuh yang membuat mereka ini *meninggal*. Horotoyoh!***



Oleh: FX Bambang Irawan
Redaktur KominfoNext



KOMINFO TALK

EPISODE

Data Pribadi Bocor, Kita Harus Apa?



Teguh Arifiyadi
Plt. Direktur Pengendalian
Aplikasi Informatika



Alfons Tanujaya
Information Technology
Security Specialist - Vaksincom

Sejak adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia, kita dipaksa untuk beralih ke digital. Seluruh kegiatan yang sebelumnya bersifat tatap muka dibatasi guna menekan penyebaran virus Covid-19. Berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara luring seperti bekerja, berbelanja, bahkan hingga kegiatan akademik dilakukan secara daring. Kita dipaksa, suka tidak suka, untuk menggunakan berbagai teknologi agar tetap bisa berkegiatan.

Indonesia juga merupakan salah satu yang menggunakan teknologi selama pandemi. Peningkatan penggunaan internet di Indonesia naik hingga 443 persen di masa pandemi (medcom.id). Kenaikan terbesar berada pada aplikasi, seperti aplikasi ruang rapat, aplikasi telemedicine, aplikasi hiburan, aplikasi permainan, dan penggunaan pada sektor perdagangan (e-commerce).

Tentunya dengan meningkatnya

penggunaan aplikasi, terdapat juga ancaman, salah satunya adalah kebocoran data. Selama pandemi, Indonesia sudah mengalami berbagai macam kebocoran data baik ringan ataupun berat. Sebut saja kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia dan kebocoran data 297 juta WNI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Plt. Direktur Pengendalian Aptika Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Sepanjang 2019 Kementerian Kominfo menerima laporan 3 kasus kebocoran, yang kemudian meningkat drastis hingga 20 kasus pada tahun 2020. Sementara terhitung hingga April 2021, Kementerian Kominfo menerima tiga aduan kasus kebocoran data. E-commerce merupakan tempat terbanyak terjadinya kebocoran data dalam aduan tersebut (39,3 persen).

Klasifikasi PSE yang melakukan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Menurut Teguh, terdapat beberapa institusi yang bertanggung jawab dalam kasus kebocoran data. Kebocoran data merupakan kesalahan kolektif, karena kesalahan bisa dari penyelenggara, pengguna, regulasi, dan pihak lain yang patut diduga.

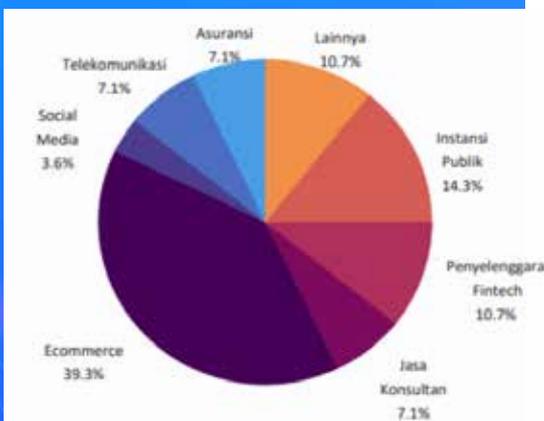
"Dalam tata kelola investigasi, apabila ada kasus kebocoran data yang mau diproses dalam konteks pidana, maka penanggung jawab utama adalah POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia-red). Sementara apabila dari sisi cyber security maka fungsinya terdapat di BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)"

ungkap Teguh pada Seminar Daring Kominfo Talk! (07/07/21)

Sementara kasus kebocoran data yang tidak berujung pidana ditangani oleh Kementerian Kominfo di bawah Direktorat Pengendalian Aptika. Kementerian Kominfo akan memberikan rekomendasi (proses, prosedur, SDM, kepatuhan kepatuhan yang harus dipenuhi) hingga kemungkinan diberikan sanksi apabila terbukti melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Teguh pun menjelaskan alur investigasi dugaan kasus kebocoran data pribadi. Hal pertama adalah melakukan pengecekan dengan memeriksa secara mandiri (investigasi mandiri) dari sumber seperti media, internal, atau laporan dari instansi lain.

PROSES INVESTIGASI



“Setelah itu kami akan mengirim surat untuk mengisi form isian standar pengelolaan data pribadi. Kemudian pertanyaan dan data dari penyelenggara kita kumpulkan dan mengambil kesimpulan benar tidak sebuah insiden atau hanya cuplikan insiden sebelumnya atau misinformasi,” tambah Teguh.

Setelah memastikan bahwa kasus tersebut benar merupakan kasus kebocoran data, tim investigasi melakukan pengelompokkan kasus tersebut (high, medium, atau low risk).

Dalam kasus Tokopedia tim melakukan investigasi selama \pm 4 sampai 5 bulan yang berujung pada sanksi yang diberikan oleh Menkominfo. Pada setiap hasil investigasi pun tim mengirim rekomendasi perbaikan yang perlu dibenahi.

“Terdapat beberapa sanksi yang diberikan seperti peringatan, pemutusan akses, hingga pemberian denda. Khusus sanksi denda hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan,” lanjut Teguh.

Proses Investigasi

Teguh menjelaskan secara regulasi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyampaikan insiden kebocoran data pada setiap pemilik data yang bocor. Setelah itu, PSE harus melakukan keamanan sistem yang lebih baik serta melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyidikan untuk diproses.

Pada kesempatan yang sama, Ahli Keamanan Siber Vaksincom Antonius Alfons Tanujaya mengatakan bahwa dengan maraknya kasus kebocoran data, dapat diindikasikan bahwa terdapat banyak data yang berharga. Dengan banyaknya perusahaan digital seperti Tokopedia, Gojek, dan Traveloka menunjukkan peranan penting Indonesia di dunia digital.

“Indonesia diuntungkan dengan keadaan demografis penduduk terbesar keempat di dunia sehingga kita bahkan mengalahkan Jerman dalam akses internet. Akan tetapi negatifnya, banyak data yang dikelola sehingga memerlukan skill kedisiplinan untuk mengelola data tersebut dan tentunya tidak bisa menggunakan metode lama,” ungkap Alfons.

Alfons pun menerangkan bahwa tidak perlu khawatir dengan kebocoran data dikarenakan data tersebut akan selalu bocor. Alfons menyarankan kepada PSE untuk mengakui kasus kebocoran data dan melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga menemukan tindakan preventif agar tidak terulang kembali.

Perusahaan juga harus menerapkan sertifikasi seperti ISO 27001 dan harus dilakukan dengan benar dalam

menjaga data. Alfons memberi contoh kasus Telkomsel yang menerapkan sertifikasi dengan baik, sehingga ketika terjadi kebocoran data, kasus cepat ditangani dan ditemukan pula pelaku serta tempatnya.

“Ada juga kasus kebocoran data pada dua e-commerce. E-commerce A saat mengalami kebocoran data dia diam saja dan tidak melakukan suatu tindakan dan perusahaan tersebut hanya mengirim surat elektronik ke usernya untuk diharapkan mengganti passwordnya. Padahal Tindakan yang berarti adalah mencegah agar hal tersebut tidak terjadi dan mencegah eksploitasi atau kerugian atas kebocoran data ini karena secara tidak langsung e-commerce ini menjual data pribadi apapun alasannya,” tambah Alfons.

Dari 26-29 kasus yang ditangani Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2019 – 2021, beberapa PSE dengan sukarela mengakui kelemahan akan sistem mereka, sementara banyak PSE yang tidak mengakui kelemahan pada sistem mereka. Sehingga Kementerian Kominfo tidak dapat memberikan pendampingan penanganan ataupun membantu keamanan sistem.



Jaga kerahasiaan Nomor Kartu ATM

Jaga Kode OTP



Update perubahan nomor HP, alamat tinggal atau data pribadi lainnya

Jika tiba-tiba menerima kode OTP padahal kamu merasa tidak sedang melakukan transaksi apapun, segera lapor ke bank, untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan.

Masyarakat dapat melaporkan kasus kebocoran data pribadi melalui surat elektronik pengendalianaptika@kominfo.go.id dan melalui fitur **Whatsapp di 0822 3327 0099**.



Menkominfo: Laporan Gubernur DKI Jakarta Buktikan Vaksinasi Signifikan Tekan Angka Kematian

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau masyarakat yang belum menerima vaksin segera mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Menurut Menkominfo hal itu sebagai upaya bersama menekan risiko terpapar dan menghindari gejala berat ataupun kematian akibat Covid-19.

"Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden yang menekankan pentingnya dua upaya terkait penanganan pandemi Covid-19, yaitu disiplin pada protokol kesehatan dan akselerasi program vaksinasi. Data yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta dalam rapat koordinasi, Rabu (21/07/2021), menunjukkan efektivitas vaksin terhadap pencegahan infeksi dan penularan virus Covid-19," paparnya di Jakarta, Kamis (22/07/2021).

Menurut Menteri Johnny, *Case Fatality Rate* atau CFR Jakarta bergerak di sekitar angka 1.7% pada kasus sebelum divaksin.

Pada kasus yang sudah divaksin dosis pertama, angka CFR turun ke 0.33%. Sementara, pada kasus yang sudah divaksin dosis kedua, CFR turun ke angka 0.21%.

"Semakin lengkap dosis vaksin yang telah kita terima, resiko terinfeksi virus Covid-19 akan semakin rendah, selain mengurangi timbulnya gejala berat. Pada kasus positif penerima vaksin, tingkat kematian (CFR) juga menurun jauh," jelasnya.

Merujuk data itu, Menkominfo menegaskan adanya bukti kuat bahwa vaksinasi menurunkan angka kematian. "Kami mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti program vaksinasi di daerah masing-masing, demi melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Pemerintah terus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia, dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia," paparnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya secara massif dalam mengkomunikasikan informasi terkait vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah, agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar mengenai vaksin.

"Kami mengajak tokoh-tokoh masyarakat lebih aktif berbicara melalui media, memanfaatkan pengaruh positifnya untuk menenangkan masyarakat, mengedukasi tentang pentingnya vaksinasi, dan memanfaatkan media untuk penyebarluasan informasi yang benar, agar dapat bersatu mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Menteri Johnny.

Hari ini tercatat sudah 43.155.795 warga Indonesia menjalani vaksinasi pertama. Sementara untuk jumlah warga yang telah menjalani vaksinasi kedua sebanyak 16.896.200 orang. Adapun target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang.



Tingkatkan Kualitas Konektivitas Digital, Kominfo Mulai Refarming di 9 Klaster

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memulai penataan ulang (*refarming*) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di 9 klaster. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan *refarming* itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas konektivitas digital lewat layanan seluler dengan mengalokasikan penggunaan spektrum frekuensi radio secara efisien.

"*Refarming* pita frekuensi radio 2,3 GHz rencananya berlangsung secara nasional dengan langkah pertama akan dimulai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan paling lambat akan dituntaskan pada bulan September 2021," jelasnya di Jakarta, Rabu (14/07/2021).

Pelaksanaan *refarming* ditargetkan tuntas pada bulan September 2021. Menurut Menkominfo *refarming* akan berlangsung di 9 klaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh pengguna pita frekuensi 2,3 GHz, termasuk Telkomsel dan Smart sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2021.

Selain kedua operator seluler tersebut, *refarming* ini juga akan melibatkan PT Berca Hardayaperkasa sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* (operator BWA) yang juga merupakan pengguna pita frekuensi 2,3 GHz.

“Diawali di klaster yang mencakup wilayah Kepulauan Riau dan direncanakan tuntas paling lambat pada bulan September 2021 di klaster yang mencakup wilayah Jawa Timur. Secara keseluruhan, terdapat total 9 klaster yang didefinisikan untuk keperluan refarming pita frekuensi radio 2,3 GHz,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan langkah refarming spektrum frekuensi diambil agar memungkinkan penggelaran layanan 5G dengan kualitas lebih baik sekaligus mendukung pemanfaatan 4G agar semakin optimal.

“Banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat pengguna layanan seluler khususnya terkait dengan perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan, baik itu layanan 4G maupun 5G,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo peningkatan kualitas layanan tersebut dimungkinkan karena terciptanya optimalisasi penggunaan spektrum

frekuensi radio. “Spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan secara optimal, maka kapasitas jaringan seluler pun akan turut meningkat sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan *traffic* data yang terus bertumbuh pesat, bahkan di sejumlah titik saat ini terjadi kepadatan jaringan (*network congestion*),” jelasnya.

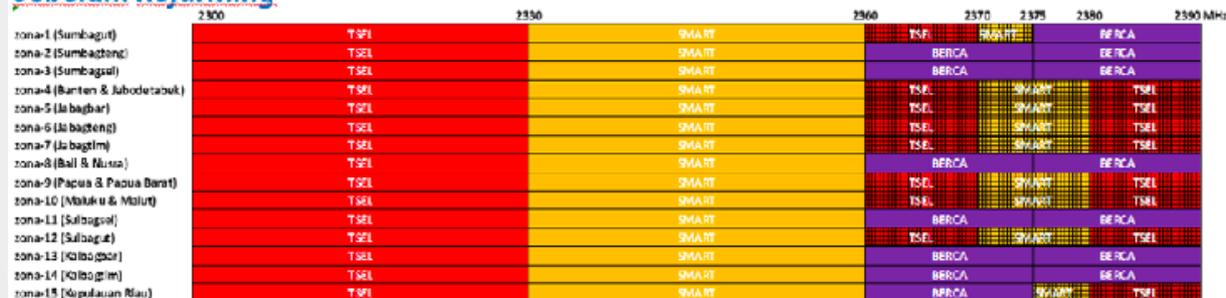
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah menerapkan kebijakan Netral Teknologi berdasarkan pada evolusi standar teknologi *International Mobile Telecommunications* (IMT) atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dan industri sebagai teknologi 3G, 4G, dan 5G. “Kebijakan Netral Teknologi tersebut berlaku di seluruh pita frekuensi radio yang digunakan untuk menyediakan layanan seluler, termasuk pita frekuensi radio 2,3 GHz,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan kebijakan Netral Teknologi tersebut diharapkan dapat mempermudah operator layanan seluler untuk memilih teknologi IMT yang akan diimplementasikan.

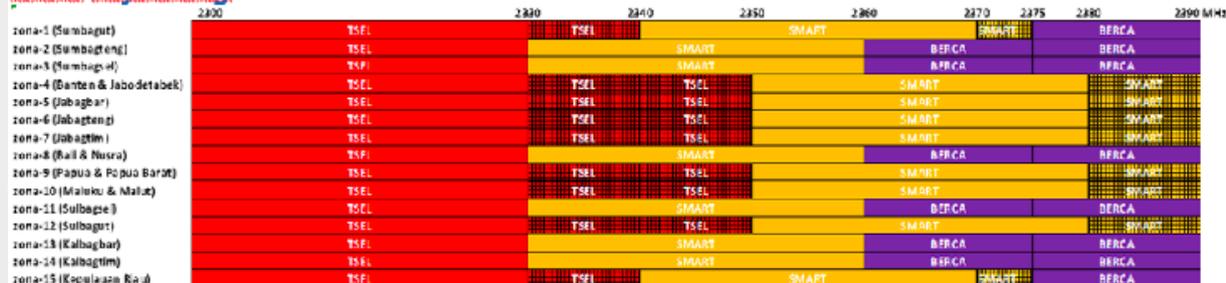
“Operator seluler dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam mengimplementasikan teknologi IMT-Advanced atau yang biasa dikenal dengan istilah 4G (LTE) dan operator juga dapat menerapkan teknologi IMT-2020 atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah 5G. Sepanjang operator seluler tersebut telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dari Kementerian Kominfo,” paparnya.

Libatkan Tiga Operator
Pada tanggal 17 Mei 2021, Kementerian Kominfo menetapkan PT Telekomunikasi Selular (TSEL) dan PT Smart Telecom (SMART) sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi 2,3 GHz Tahun 2021. TSEL memenangkan Blok A dan Blok C, sedangkan SMART memenangkan Blok B. Ketiga Blok hasil seleksi tersebut merupakan pita frekuensi radio 2,3 GHz di luar penetapan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT Berca Hardayaperkasa (BERCA) di dalam rentang pita frekuensi 2360 – 2390 MHz.

Sebelum Refarming



Pasca Refarming



Kondisi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Sebelum dan Setelah Refarming

Berdasarkan gambar sebelum refarming, terdapat kondisi penetapan penggunaan pita frekuensi radio yang tidak berdampingan (*non-contiguous*). Ditargetkan dengan *refarming* dengan penetapan sebelumnya, yaitu kepada TSEL dan SMART.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz, apabila terdapat penetapan IPFR yang tidak saling berdampingan (*non-contiguous*), maka selanjutnya wajib dilakukan *refarming* pada pita frekuensi 2,3 GHz.

Teknis pelaksanaan *refarming* khususnya untuk 2 (dua) operator yaitu BERCA dan SMART, dilaksanakan melalui proses pemindahan pita frekuensi radio (*retuning*) dari pita frekuensi radio eksisting ke pita frekuensi radio baru secara bertahap di setiap cluster yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan itu mengacu pada Keputusan Menteri Kominfo Nomor 300 Tahun 2021 tentang Penataan Ulang (*Refarming*) Pita Frekuensi Radio 2,3. Kedua, Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Ulang (*Refarming*) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

Kebijakan *refarming* tersebut bersifat mengikat dan akan dilaksanakan oleh seluruh operator telekomunikasi yang menjadi pemegang IPFR pada pita frekuensi radio 2,3 GHz yang terdiri dari 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler yaitu TSEL dan SMART, serta penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched yaitu BERCA.

Kementerian Kominfo telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi teknis diantara operator pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*). Ketentuan untuk melakukan koordinasi teknis tersebut telah diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Koordinasi Teknis dan Tata Cara Pelaporan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

Guna melakukan mitigasi dan menjaga kualitas layanan seluler kepada masyarakat dapat dipertahankan pada level terbaik, Kementerian Kominfo akan melaksanakan pemindahan pita frekuensi radio di setiap klaster saat mayoritas kondisi *traffic* data relatif rendah yaitu pukul 23.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 keesokan harinya. Secara umum, teknis pemindahan pita frekuensi radio sendiri rata-rata hanya berjalan kurang lebih 1 s.d. 2 jam.

Selanjutnya, sampai dengan pukul 18.00 keesokan harinya, dilakukan pemantauan kinerja jaringan oleh BERCA atau SMART, antara lain melalui mekanisme *drive test*. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalkan potensi interferensi pada pita frekuensi radio 2,3 GHz.

Apabila kondisi kinerja jaringan pasca pemindahan pita frekuensi radio dapat dipertahankan pada level yang memadai, maka proses pemindahan pita frekuensi radio di *cluster* tersebut dapat dinyatakan selesai. Secara keseluruhan, proses *refarming* di suatu cluster dapat diselesaikan hanya dalam tempo kurang dari 24 jam.

Guna mendukung keberhasilan proses *refarming*, Kementerian Kominfo melalui Unit Pelaksana Teknis Balai dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan selama *refarming* pita frekuensi radio 2,3 GHz.

Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah *Frequency Clearance* minimal dua kali yakni sebelum proses pemindahan pita frekuensi radio dan setelah pemindahan pita frekuensi radio, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

PORTAL
Kominfo.go.id



Pertahankan Produktivitas Masyarakat, Kominfo Buka Pelatihan Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka peluang pelatihan digital untuk mempertahankan produktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan hal itu ditujukan untuk optimalisasi ekonomi digital dan memanfaatkan ruang digital secara produktif.

“Pengembangan sumber daya manusia di bidang digital menjadi perhatian Menkominfo Johnny G. Plate sesuai instruksi Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional. Di masa pandemi Menkominfo terus genjot program SDM digital dan menjangkau jutaan peserta,” tuturnya dalam Konferensi Pers Virtual Pertahankan Produktivitas Masyarakat di masa Pandemi, Menkominfo Terus Genjot Program SDM bidang Digital Jangkau Jutaan Peserta, dari Jakarta, Kamis (22/07/2021).

Jubir Kementerian Kominfo menyatakan sektor informatika dan komunikasi merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh dalam tiga kuartal tahun 2020. "Secara kumulatif di tahun 2020 sektor informatika dan komunikasi tumbuh 10,58% *cumulative to cumulative*. Artinya sektor ini memiliki peluang yang luar biasa Untuk dioptimalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Melihat peluang itu, Jubir Dedy Permadi menilai ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan Program Pengemangan SDM Kementerian Kominfo. "Bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia untuk bisa bersaing di ruang digital mulai dengan Program Literasi Digital Nasional, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy dan Institut Digital Nasional University," paparnya.

Tingkatkan Keahlian Digital Kementerian Kominfo terus berkomitmen meningkatkan keahlian dan kemampuan digital masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dimulai dari program Literasi Digital Nasional, telah disediakan lebih dari 12,4 juta program pengembangan sumber daya manusia di level paling dasar. Program tersebut merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar literasi digital.

"Sampai hari ini sudah ada sekitar 2,6 juta masyarakat Indonesia yang mengikuti pelatihan literasi digital. Cara mengikuti program ini dapat diakses informasinya dengan mengakses media sosial Kominfo," ujarnya.

Program Literasi Digital Nasional menghadirkan 4 modul literasi digital, antara lain kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. "Di dalamnya masyarakat juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan gadget atau HP, komputer dan laptop untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif," jelasnya.

Menurut Jubir Dedy Permadi, program pertama dalam pengembangan SDM digital itu akan menjangkau sekitar 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. "Jadi bagi masyarakat yang belum memanfaatkan kesempatan ini bisa segera ikut, karena masih ada kesempatan sekitar 10 juta slot pelatihan literasi digital," tandasnya.

Program kedua yakni Digital Talent Scholarship ditujukan kepada lulusan SMA dan perguruan tinggi. Menurut Jubir Kementerian Kominfo, program DTS memberikan pelatihan dengan intensitas lebih tinggi daripada program Literasi Digital Nasional.

"Program ini pasti menarik karena akan memperkenalkan terkait dengan kecakapan-kecakapan baru di era digital, ini sangat penting karena memang membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar terkait dengan kecakapan digital," tuturnya

Jubir Dedy Permadi menjelaskan program tersebut menyediakan 100 ribu kursi untuk masyarakat Indonesia. Hingga saat ini telah terdaftar 56.921 peserta, sedangkan masih ada kesempatan lebih dari 40 ribu peserta untuk mengikuti program DTS.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo, program DTS memiliki 7 pelatihan akademi, antara lain Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Professional Academy, Talent Scouting Academy, Thematic Academy, Government Transformation Academy, dan Digital Entrepreneurship Academy.

"Betapa komprehensifnya program yang ditawarkan oleh Kementerian Kominfo untuk bisa menjangkau masyarakat atau kaum milenial, kaum muda, untuk belajar terkait talenta digital," paparnya.

Jubir Dedy Permadi menyatakan khusus untuk program Digital Leadership Academy (DLA) bersifat terbatas, yaitu hanya untuk 300 slot. Namun, program DLA dibuat dengan sangat lebih eksklusif untuk pemimpin era digital. "Untuk para leader di bidang digital, baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta bisa mengikuti program ini tentu dengan mengikuti proses seleksi yang ada," ujarnya.

Program DLA yang akan diluncurkan pada Agustus 2021 mendatang, nantinya dipisah menjadi dua sektor, yakni 150 peserta mendapatkan pelatihan pemimpin era digital di sektor publik atau pemerintahan, dan 150 peserta lainnya di sektor swasta.

"Program ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman dan penguatan pengalaman para pemimpin, untuk bisa mengenal ekosistem digital yang lebih komprehensif di universitas kelas dunia. Program DLA bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University di Tiongkok, dan Harvard University," imbuhnya.



Cegah Peredaran Kartu SIM Ilegal, Kominfo Larang Penjualan dalam Keadaan Aktif

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur penjualan Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) dalam keadaan tidak aktif sebagai upaya mencegah peredaran ilegal atau menggunakan identitas tanpa hak dan tidak benar. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli mengimbau operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual Kartu SIM (SIM Card) mematuhi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

"Saya selalu menekankan bahwa sesuai dengan PM 5/2021 agar betul-betul, baik operator maupun seluruh jajarannya sampai ke tingkat penjual kartu prabayar mematuhi ini dengan melaksanakan registrasi secara benar, dan kemudian tidak ada lagi cerita menjual SIM Card dalam keadaan aktif," ujarnya dalam Webinar Ayo Dukung Peredaran Kartu Perdana dalam Keadaan Aktif, dari Jakarta, Kamis (08/07/2021).

Mengutip beberapa sumber, Dirjen Ramli menyatakan di Indonesia saat ini pengguna Kartu SIM aktif secara

nasional mencapai 345,3 juta. "(Peguna SIM Card) ini melebihi jumlah penduduk memang, karena kita tahu bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari satu nomor. Jadi, kalau melihat ini, maka kita juga bergerak lagi," paparnya.

Dirjen PPI Kementerian Kominfo menjelaskan PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2021 itu mengatur registrasi kartu SIM prabayar. Pengaturan itu bukan tanpa tujuan, sebab saat ini pengguna layanan telekomunikasi seluler juga cenderung meningkat.

"Seringkali terjadi dimanfaatkan juga untuk penipuan, kejahatan dan lain-lain. Oleh karena itu (melalui PM Kominfo 5/2021), di sinilah esensi pentingnya registrasi pra bayar secara konsisten. Karena apa? Fungsinya untuk kesehatan, ekonomi digital, perbankan dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Dirjen Ramli, saat ini pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa. Dari banyaknya jumlah tersebut, rata-rata memanfaatkan *over the top* dan berbagai aplikasi digital untuk kehidupan sehari-hari. "Meskipun masih ada yang sengaja menggunakan untuk melakukan tindak kejahatan," ungkapnya.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (5) disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi. Selanjutnya dalam ayat (6) peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, *outlet*, pelapak, dan/atau orang perorangan.

Dalam peraturan yang sama, terdapat prinsip Mengenal Pelanggan (*Know Your Customer/ KYC*) yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.

Tolak Kartu SIM Ilegal

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh yang juga hadir dalam webinar tersebut, mengajak ekosistem di industri telekomunikasi untuk menggenapkan penolakan terhadap Kartu SIM ilegal atau kartu yang sudah terhubung dengan data pribadi orang lain tetapi tetap diperjualbelikan.

"Mari kita bersama-sama menggelorakan penjualan kartu prabayar yang betul-betul nol (0), belum ada datanya. Jadi, kepada yang mendaftar betul-betul menggunakan dengan nama dirinya sendiri," ujarnya.

Dirjen Dukcapil menyatakan penggunaan Kartu SIM yang resmi berdasarkan data pribadi akan dapat membantu Pemerintah untuk membangun Single Identity Number. Menurutnya di era media sosial hal itu menjadi wujud peran masyarakat untuk memanfaatkan data secara lebih bertanggung jawab.

"Untuk keutuhan bangsa, keselamatan negara dan tentu saja untuk kemudahan kita di dalam berkomunikasi sosial, berkomunikasi dalam transaksi ekonomi, bahkan suatu ketika nanti mungkin di dalam kita melakukan transaksi politik bisa jadi melalui elektronik voting

yang berbasis kartu prabayar atau dengan nomor handphone atau dengan media apapun," jelasnya.

Mencermati perkembangan teknologi, Dirjen Dukcapil Zudan Arif menyatakan kehadiran *smartphone* adalah revolusi yang sangat besar dalam kehidupan di era digital saat ini.

"Dengan *smartphone* bisa menggantikan fungsi televisi, fungsi perkuliahan, fungsi komunikasi konsultasi dengan dokter, dan banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa tergantikan dengan *smartphone* ini," tandasnya.

Meskipun demikian, Dirjen Dukcapil mengakui masih dijumpai dampak negatif seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan plagiarisme. Namun, Dirjen Zudan menyatakan pemanfaatan secara positif masih jauh lebih besar.

"(Konten negatif) itu adalah dampak yang minor dibandingkan besarnya manfaat, tentu saja yang minor ini yang harus kita antisipasi dan semakin kita tekan," ungkapnya.

Dalam webinar itu, turut hadir Pakar Hukum Telekomunikasi I Ketut Prihadi, Kanit 2 Subdit 2 Dit. Tipid Siber Bareskrim Polri Kompol Irvan Reza, dan Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Telekomunikasi seluruh Indonesia Merza Fachys, serta perwakilan dari asosiasi, komunitas maupun mitra penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler di Indonesia.



Antisipasi Keamanan Siber, Kominfo dan BSSN Berkolaborasi Bentuk KCSIRT

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pembentukan Kominfo-Computer Security Incident Response Team (KCSIRT) yang ditujukan untuk mengantisipasi insiden keamanan siber. Hal ini sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Oleh karena itu, Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber.

"Kebutuhan tersebut, untuk menjawab khususnya pemulihan insiden keamanan siber sehingga perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team," ujar Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba dalam Peluncuran Kominfo-CSIRT yang berlangsung virtual, dari Jakarta, Jumat (02/07/2021).



Sekjen Mira menyatakan ada tiga tujuan utama yang diusung dalam Kominfo-CSIRT, yakni; mewujudkan ketahanan siber handal dan profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan siber, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber.

KCSIRT juga nantinya akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit atau pemangku kepentingan di lingkungan Kominfo terkait keamanan informasi.

Sekjen Mira menjelaskan, KCSIRT tidak hanya akan beranggotakan tim dari Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI), namun juga melibatkan perwakilan unit kerja eselon I di Kementerian Kominfo. Ia menilai, hal itu sebagai efektivitas kerja.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, KCSIRT juga membuka sejumlah kanal untuk menerima semua respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo, baik melalui form aduan di website, call center maupun pesan WhatsApp.

"Selanjutnya, tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait layanan," ungkapnya.

Transformasi untuk Pemanfaatan Layanan Digital

Sebagai *leading sector* bagi transformasi digital Indonesia, Kominfo ditugaskan melaksanakan berbagai agenda prioritas untuk memastikan penyediaan akses digital bersifat inklusif, memberdayakan, serta mendorong seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan berbagai akses layanan digital secara bijak dan cerdas.

"Kemampuan untuk mengkomunikasikan kegiatan dari ruang fisik ke ruang digital saat ini menjadi sebuah keharusan dan bukan lagi pilihan, termasuk bagi sektor publik," kata Sekjen Kementerian Kominfo.

Di sisi lain, Kementerian Kominfo tetap dan terus bekerja melayani masyarakat di tengah interaksi fisik yang harus dibatasi untuk memutus penyebaran Covid-19. "Kami pun harus tetap beroperasi dan memastikan bahwa layanan publik yang disediakan tetap berjalan, dan dapat diakses dengan mudah, nyaman dan aman," tuturnya.

Sekjen Mira menyatakan Kominfo pun menyadari, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh instansi pemerintah kerap menjadi target serangan siber. Dengan begitu, kata dia, berdampak sangat merugikan karena bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas Kominfo secara khusus dan pemerintah secara umum," ungkapnya.

Sekjen Kominfo menegaskan proses pengendalian dan pemulihan insiden keamanan informasi membutuhkan upaya bersama. Sehingga semua unit kerja perlu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan melaporkan insiden keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Kominfo melalui KCSIRT.

"Saya meminta Kominfo-CSIRT untuk berkoordinasi dengan CSIRT pada tingkat yang lebih tinggi bila diperlukan, bersama dengan itu, menciptakan tim yang tangguh dan kompeten, saya juga meminta agar kompetensi dan keahlian anggota tim terus dibangun. Mari kita bangun kerja sama dengan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber dengan Kominfo-CSIRT," ajaknya.

Perlu Kerjasama Berbagai Pihak

Sementara itu, Kepala BSSN Hinsu Siburian menyatakan, dalam menjaga ruang digital yang sehat dan mencegah kejahatan siber. Berbagai pihak, lanjut Kepala BSSN, harus saling meningkatkan koordinasi dan bekerja sama dalam menghadapi ancaman di ruang siber seperti hacking, social engineering, dan human error. Apalagi sistem serang di internet dikenal memiliki dua sifat, yakni secara teknis dan sosial.

“Inilah yang menjadi tugas utama dari apa yang kita launching hari ini, atau apa yang menjadi bisnis utamanya CSIRT. Kominfo membangun, BSSN mengamankan. Ibarat uang yang punya dua sisi, Kominfo beserta tim dengan swasta dan kementerian lain tentu ada proses pembangunan yang dikomandani. Ketika sudah dibangun, tentu perlu pengamanan, untuk mengamankan itulah perlu kehadiran dari BSSN. Jadi, Kominfo dengan BSSN ini tidak bisa dipisahkan dilihat dari sisi tugas pokoknya,” paparnya.

Kemudian, Kepala BSSN juga menjelaskan, sistem serang dalam ruang siber dikenal memiliki dua sifat, yaitu serangan bersifat teknis dan serangan bersifat sosial. Ia memaparkan, serangan bersifat teknis meliputi Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat sosial, menjadi tugas Kementerian Kominfo untuk menangkal maraknya hoaks dan disinformasi.



“

“Tugas pokok dari (Kominfo-CSIRT) ini adalah serangan yang bersifat teknis, karena jika serangan yang bersifat teknis ini menyerang akan mengganggu dan berdampak pada infrastruktur yang lain, karena semua sudah terhubung dan sudah tersambung,” tandas Hinsu.



Kominfo-CSIRT sejatinya telah mulai diinisiasi melalui program asistensi disertai dengan penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sejak tahun 2019. Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu CSIRT Sektor Administrasi Pemerintah, kemampuan SDM Kominfo-CSIRT harus selalu ditingkatkan sebagai bekal pelaksanaan tugas sebagai anggota Kominfo-CSIRT.

“Peningkatan kualitas SDM CSIRT dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, workshop, cybersecurity drill serta program lainnya. Dan nantinya Kominfo-CSIRT dapat terus berkolaborasi, bersinergi, serta berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sehingga Indonesia dapat memiliki visibilitas yang menyeluruh terhadap aset siber, guna melakukan aksi respons yang lebih cepat dan pemulihannya lebih efektif dan efisien terhadap insiden siber,” tutup Hinsu.

Kegiatan peluncuran Kominfo-CSIRT dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hadir dalam acara, antara lain : Deputi Penanggulangan dan Pemulihan BSSN; Mayjen TNI Yosep Puguh Eko Setiawan, Kepala PDSI Kementerian Kominfo Irawati Tjipto Priyanti, dan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah BSSN; Hasto Prastowo, serta undangan lain secara terbatas.

Menkominfo Tinjau Vaksinasi

Di Bentara Budaya Kompas



Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate didampingi Dirjen APTIKA Samuel A. Pangerapan, dan Dirut BAKTI Anang Latif meninjau pelaksanaan Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia untuk 10.000 Pekerja Media di kawasan Bentara Budaya Kompleks Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (25/06/2021). Program hasil kerja sama Kompas Gramedia dengan Dewan Pers ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-56 Harian Kompas.



Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (jaket biru) didampingi Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo (kemeja putih) berkeliling meninjau pelaksanaan Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia untuk 10.000 Pekerja Media di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat, (25/6/2021). Dengan target peserta harian 500 orang, kegiatan vaksinasi ini diperkirakan akan digelar selama 20 hari.

Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Sejumlah pekerja media yang sebelumnya mendaftar lewat organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui *online* melakukan registrasi ulang untuk menjalani Vaksinasi Massal Covid-19 gelombang IV di Bentara Budaya Kompleks Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (25/6/2021). Penyelenggara menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya lajur antrian, penyediaan tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jarak fisik sebelum memasuki venue hingga pengaturan kapasitas ruangan di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat, (25/6/2021)



Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Sejumlah pekerja media yang sebelumnya mendaftar lewat organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui *online* melakukan registrasi ulang untuk menjalani Vaksinasi Massal Covid-19 gelombang IV di Bentara Budaya Kompleks Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (25/6/2021). Penyelenggara menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya lajur antrian, penyediaan tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jarak fisik sebelum memasuki venue hingga pengaturan kapasitas ruangan di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat, (25/6/2021)



Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Menkominfo Johnny G. Plate (jaket biru) didampingi Wakil Pimpinan Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo (kemeja putih), anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo (batik coklat) beserta rombongan berkeliling meninjau langsung pelaksanaan Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia untuk 10.000 Pekerja Media.



Menkominfo Tinjau Vaksinasi Di Bentara Budaya Kompas

Menkominfo Johnny G. Plate (jaket biru) memberikan Keterangan Pers usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia, Jumat (25/6/2021). Menkominfo menegaskan Vaksinasi Covid-19 menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk bersatu, agar seluruh kekuatan dan energi bisa digunakan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia secepat mungkin. Ia turut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarang menyebarkan *barcode* yang terdapat pada Sertifikat Vaksin Covid-19 setelah menjalani vaksinasi karena hal itu diperlukan untuk menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

di Universitas Atma Jaya

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Universitas Atma Jaya

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pelaksanaan Sentra Vaksinasi Covid-19 massal tahap pertama untuk masyarakat di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Program ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UNIKA Atma Jaya) sebagai inisiator Sentra Vaksinasi Atma Jaya bersinergi dengan Yayasan Atma Jaya dalam rangka mendukung upaya pemerintah mempercepat *Herd Immunity*. Program Vaksinasi massal ini diselenggarakan dari tanggal 7-29 Juli 2021, di Kampus UNIKA Atma Jaya, Jakarta, Rabu (7/7/2021)



Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Universitas Atma Jaya

Suasana saat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 massal untuk masyarakat tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dilaksanakan dari tanggal 7 Juli hingga 29 Juli 2021 yang dibagi dalam 4 tahapan, yaitu tahap pertama 7-10 Juli 2021, tahap kedua 12-14 Juli 2021, tahap ketiga 21-23 Juli 2021, dan tahap keempat 26-29 Juli 2021. Program vaksinasi massal untuk masyarakat ini ditargetkan dapat menjangkau 30.000 orang.





Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Universitas Atma Jaya

Suasana saat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 massal untuk masyarakat tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dilaksanakan dari tanggal 7 Juli hingga 29 Juli 2021 yang dibagi dalam 4 tahapan, yaitu tahap pertama 7-10 Juli 2021, tahap kedua 12-14 Juli 2021, tahap ketiga 21-23 Juli 2021, dan tahap keempat 26-29 Juli 2021. Program vaksinasi massal untuk masyarakat ini ditargetkan dapat menjangkau 30.000 orang.



Petugas Medis melakukan screening terlebih dahulu kepada peserta vaksin sebelum melakukan penyuntikan Vaksin Covid-19 yang bertujuan untuk pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum tubuh menerima suntikan Vaksin Covid-19. Pemeriksaan awal yang dilakukan antara lain meliputi pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan apresiasi atas inisiatif UNIKA Atma Jaya dan Yayasan Atma Jaya dalam menyelenggarakan program Vaksinasi Covid-19 massal ini. Menurut Menkominfo saat ini sudah ada sekitar 13,3 juta vaksin dosis pertama yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mendorong agar vaksinasi terus meningkat, sehingga pada bulan Agustus 2021, lebih dari 2 juta dosis vaksin tersalurkan kepada masyarakat. Jika semua itu terlaksana dengan baik, maka di bulan November atau Desember akan menghasilkan *herd immunity* secara nasional.

ASO di Kaltim Mulai 17 Agustus 2021, Dirjen PPI: Jadi Provinsi Percontohan

Implementasi kebijakan migrasi terestrial televisi analog ke televisi digital atau Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam Tahap I pada tanggal 17 Agustus 2021.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M. Ramli menyatakan hal itu dilatari pertimbangan wilayah tersebut merupakan daerah prioritas yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu yang lalu. Ia memaparkan, kebijakan ASO yang akan diimplementasikan pada seluruh wilayah terbagi dari lima tahapan, yakni Tahap 1 pada 17 Agustus 2021 yang akan dilakukan pada 6 wilayah layanan di 15 kabupaten atau kota.



AHMAD M. RAMLI
DIREKTUR JENDERAL PPI KEMKOMINFO

Balmon Manado Tertibkan Minahasa Utara dan Sitaro

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado menertibkan seluruh pengguna frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) atau yang memancar tidak sesuai peruntukkan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro (Sitaro).

“Tindakan tegas dan terukur kami berikan. Pembinaan dan edukasi akan secara terus-menerus dilakukan, tetapi jika dengan pembinaan dan edukasi tidak menimbulkan efek jera, maka tindakan tegas diambil, kata Kepala Balmon Manado Heriyanto,

dalam apel persiapan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal, Senin (5/7/2021). Apel persiapan penertiban tersebut dihadiri unsur Pengendali Frekuensi Radio, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon Manado dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Utara.



Kolaborasi dengan Penerima Beasiswa, Kominfo Terapkan Inovasi untuk Kembangkan DTS

Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun kolaborasi dengan penerima beasiswa Program Beasiswa S2 Luar Negeri. Hasil inovasi itu akan diterapkan untuk proses pembelajaran dalam beasiswa pelatihan stimulan Digital Talent Scholarship (DTS).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan kolaborasi itu merupakan bentuk apresiasi kepada penerima beasiswa agar bisa memberikan peluang kontribusi terhadap pembangunan SDM di Indonesia. "Diperlukan kolaborasi lebih lanjut untuk bisa menghasilkan inovasi teknologi pembelajaran untuk DTS yang lebih tepat sehingga dapat diterima oleh para peserta pelatihan DTS," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/07/2021).



Dukung Telemedicine, Kominfo Gandeng Operator Seluler Jaga Kualitas Layanan

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng penyelenggara operator layanan telekomunikasi seluler untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi berjalan baik. Hal itu ditujukan agar dapat mendukung aktivitas masyarakat yang menggunakan layanan telekomunikasi dan layanan telemedicine yang kerap digunakan selama pandemi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli menyatakan pihaknya menurunkan tim untuk memantau kualitas layanan selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali. "Dalam keadaan darurat seperti saat ini, kami tetap menurunkan tim. Karena tim ini masuk ke dalam sektor esensial untuk mengukur *quality of service* di lapangan," ujarnya dalam Webinar Ayo Dukung Peredaran Kartu Perdana dalam Keadaan Aktif, dari Jakarta, Kamis (08/07/2021).





Literasi Jadi Solusi Utama Berantas Fintech Ilegal

Literasi masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam memberantas kehadiran fintech ilegal, khususnya pinjaman daring yang jumlahnya terus meningkat. Terhitung selama bulan Juli 2021 OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menutup 172 pinjaman daring ilegal.

"Kementerian Kominfo telah banyak melakukan hal untuk memberantas pinjaman daring ilegal, mulai

dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum. Namun hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas pinjaman online ilegal ialah dengan literasi, literasi, literasi," tegas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, saat acara Berita Satu TV: Zooming Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (22/07/2021)

Beri Efek Jera, Puluhan Perangkat Ilegal Dimusnahkan

Pemusnahan puluhan unit perangkat telekomunikasi hasil operasi penertiban dilakukan guna memberikan efek jera terhadap masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap akan mengedepankan pembinaan, agar masyarakat menghindari perangkat ilegal. "Pemusnahan perangkat ini diharapkan memberikan efek jera kepada masyarakat," jelas Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram Sunardi, Senin (5/7/2021), saat memimpin kegiatan pemusnahan 79 unit perangkat telekomunikasi hasil operasi penertiban dari 2002 sampai 2021.

Pemusnahan ini juga bertujuan agar masyarakat lebih tertib dalam menggunakan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, serta untuk menghindari penyalahgunaan perangkat yang berpotensi menyebabkan masalah baru.



Tiga Karakter Startup Digital Bantu Pertahankan Ekonomi Indonesia



Startup digital memiliki tiga karakteristik utama yang dinilai mampu membantu mempertahankan perekonomian Indonesia selama pandemi. “Sebagai pemecah masalah, startup memiliki karakter pertumbuhan pendapatan yang cepat sekitar 10 persen per minggu, memiliki pasar yang besar dan capital efficient. Karakter ini membantu perekonomian dan dicapai melalui penggunaan teknologi,” ujar Koordinator Startup Digital Direktorat Pemberdayaan Informatika, Sonny Sudaryana dalam acara Tok Tok Kominfo, Jumat (09/07/2021).

Menurut Sonny, startup di Indonesia kebanyakan bergerak pada bidang e-commerce dan fintech. Baru sejak pandemi, bermunculan startup bidang lingkungan dan kesehatan. Ia mengajak masyarakat yang memiliki minat mendirikan startup untuk mulai sedini mungkin. “Untuk mendirikan startup tidak perlu menunggu waktu yang tepat, lakukan sedini mungkin sebelum terlambat,” ujarnya.

Pemkab Beltim Sambut Smart City untuk Kembangkan Wisata Tanjung Kelayang

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyambut baik pembuatan masterplan smart city untuk Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Tanjung Kelayang di Pulau Belitung. Kementerian Kominfo akan memfasilitasi penyusunan masterplan itu bersama konsultan terpilih.

“Kami sambut baik dan berterima kasih atas pembuatan masterplan smart city di Belitung Timur, sebagai upaya pengembangan kawasan pariwisata prioritas Tanjung Kelayang,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab.

Beltim, Khaidir Lutfi membacakan sambutan dari Bupati Beltim saat acara Bimbingan Teknis Tahap 1 Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di Auditorium Zahari MZ, Manggar, Belitung Timur, Kamis (1/7/2021). Menurut Khaidir, masterplan tersebut juga dapat menjadi acuan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Beltim.

IGDX Jadi Pendorong Industri Game Indonesia agar Mampu Bersaing Global



Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2021 digelar untuk mendorong industri game Indonesia agar mampu bersaing secara global. IGDX menjadi ajang bertemunya perusahaan dan pelaku industri global dengan pelaku industri lokal.

“IGDX 2021 merupakan upaya meningkatkan kapasitas pelaku industri game dalam negeri dan mendorong industri game lokal untuk go global. Sehingga industri game Indonesia semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi produsen maupun penggunanya,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, saat Konferensi Pers Pembukaan Pendaftaran HUB.ID Startup Digital & Indonesia Game Developer Exchange, Rabu (28/07/2021).

Menkominfo: Semoga Jalan Bakti Harmoko Jadi Suri Tauladan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan jasa Almarhum Mantan Menteri Penerangan selama mengabdikan menjadi pejabat teras di dalam negeri dapat menjadi contoh yang baik.

“Dengan ini, mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi. Jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Harmoko dengan jabatan

Mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa,” ujarnya ketika membacakan Apel Persada dalam Upacara Pemakaman Mantan Menteri Penerangan Harmoko di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (5/7/2021)



HAH?! PPKM LAGI?!



INI SEMUA PASTI GARA-GARA MASYARAKAT GAK TAAT PROKES, TERUS SUSAH BANGET DISURUH DIEM DIRUMAH! KALAU UDAH GINI YANG SUSAH JADI KITA SEMUA! HARUSNYA YA.. KITA ITU..



SSSSSTTTT... MULUT SIAPA INI ENTENG BENER HAH?



SAAT INI SANGAT GAK TEPAT UNTUK SALING MENYALAHKAN.. APALAGI KITA SESAMA MASYARAKAT



SINGKATAN PPKM BAIKNYA KITA MAKNAI JADI **PERBANYAK PERTOLONGAN KURANGI MAKIAN..** BIAR YANG KESULITAN BISA TERTOLONG..

KITA BISA BANTU KEBUTUHAN WARGA, AJAK PERKETAT PROKES, ATAU APAPUN YANG BISA KITA PERBUAT BIAR PANDEMI CEPET SELESAI

KURANGI BACA HOAKS, CARI SUMBER YG KREDIBEL BIAR KITA GAK MAKIN DIBUNUH PANDEMI

GAES YANG BUTUH ISI OKSIGEN BISA HUBUNGI INTI YA..

SHARE POSTINGAN INI GUYS!

COVID-19 10 HOAKS JULI 2021

Manfaat Labu dalam Surat As Shaffaat

- Mempercantik Kulit
- Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
- Mencegah Kanker
- Memelihara Kesehatan Jantung
- Rendah Kalori dan Tinggi Serat
- Memperkuat Jantung
- Menyembuhkan Luka Kulit
- Menurunkan Berat Badan
- Mendukung Kesehatan

Sharing dari group sa...
Mas Bagus kakak sy nomor 2 dr Keluarga Witoyo selama 18 hari telah dirumah sakit sampai ndak kuat dan kritis tapi atas seijin Allah disertai dengan doa akhirnya kakak sy sembuh dan bener2 sembuh dg sering dikirimkan obat oleh istrinya yaitu labu kuning yg kita kukus buat cemilan. Alhamdulillah menggigil dan sesak nafasnya hilang dan paru2 yg putih blentong2 bersih ,jantung,mata,otak semuanya sehat dan lolos medical , sehingga kakak sy saat ini bisa kerja kembali di Malaysia. Alhamdulillah. Aamin

Istri Kakak Saya awalnya juga merasakan bersih2 bentar capek ngos Zan keringat dingin setelah kena covid, tapi setelah konsumsi labu kuning kemaren ikut antri vaksin dan jalan jauh tidak capek dan sehat.

Begitu juga Kemaren ada tetangga kakak begitu positip makan labu.

HOAKS

1

[HOAKS] Labu Kuning Kukus Dapat Sembuhkan Covid-19

Beredar sebuah informasi melalui WhatsApp grup yang menyebutkan bahwa memakan labu kuning kukus dapat menyembuhkan penyakit Covid-19. Informasi ini juga menyertakan kisah dari orang lain yang sembuh dari Covid-19, 3-4 hari setelah mengonsumsi labu kuning kukus ini.

Namun setelah dilakukan penelusuran, informasi ini ternyata keliru. Khasiat labu untuk dapat menyembuhkan penyakit Covid-19 belum dapat dibuktikan kebenarannya. Guru Besar Farmasi UGM, Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt menyatakan bahwa belum ada hasil penelitian terhadap labu kuning hangat bisa menyembuhkan penderita Covid-19. Zullies menyatakan, labu kuning memang mengandung antioksidan dan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan. Namun, manfaat tersebut tidak dikhususkan untuk mengobati penderita Covid-19.

2

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Semarang

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Melalui akun Instagram resmi miliknya @mbakitasmg, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengunggah tangkapan layar dari akun Facebook palsu yang mencatut nama serta fotonya itu. Dirinya mengimbau untuk berhati-hati terhadap permintaan pertemanan atau pesan messenger dari akun yang mengatasnamakan dirinya itu. Jangan langsung percaya dengan pesan dan permintaan apapun yang bertujuan untuk menipu.

4

[HOAKS] Kurir Tetap Bekerja Meskipun Positif Covid-19

Beredar sebuah pesan WhatsApp tentang informasi dari customer perusahaan logistik/ jasa layanan pengantaran barang. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa sejumlah kurir terkena Covid-19 dan menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, namun kurir-kurir yang sakit tersebut tetap harus bekerja jika masih kuat.

Dilansir dari antaranews.com, pesan tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Menurut VP Sales & Marketing Anteraja, Andri Hidayat menegaskan bahwa perusahaannya selalu mementingkan keselamatan kurir serta menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dengan ketat dan disiplin. Disampaikan juga oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), Mohamad Feriadi menjelaskan bahwa penerapan protokol yang ketat dan disiplin menjadi hal yang harus dikomunikasikan asosiasi kepada seluruh anggota tidak hanya bagi kurir, tapi keseluruhan seperti kantor, alat transportasi, dan lainnya.

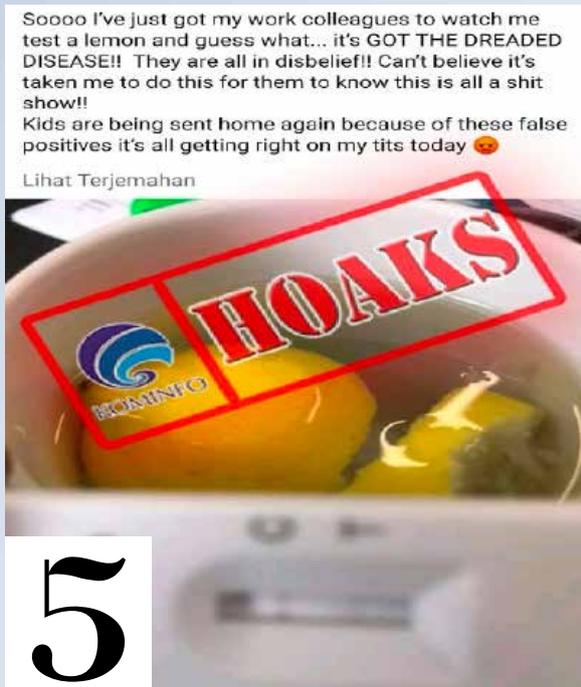
3

[HOAKS] Ajakan Stop Upload Berita Covid-19 oleh Pemkab Gresik

Beredar poster di media sosial Twitter yang berisi sebuah informasi terkait ajakan kepada masyarakat Gresik untuk tidak mengunggah berita tentang Covid-19. Poster tersebut juga memuat logo Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim poster atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik yang berisi ajakan masyarakat Gresik kompak untuk tidak upload berita tentang Covid-19 agar masyarakat tentang dipastikan hoaks. Faktanya, Reza Pahlevi sebagai Kabag Humas Pemkab Gresik menyatakan bahwa Pemkab Gresik tidak pernah merilis poster tersebut.





[HOAKS] Vaksinasi Covid-19 Merusak Genetika Tubuh dan Sebabkan Kematian 2 Tahun Kemudian

Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah di vaksinasi Covid-19 akan meninggal dunia 2 tahun kemudian. Selanjutnya, orang yang telah divaksin akan mengalami kerusakan genetik dan tidak bisa diselamatkan. Disebutkan pula bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan vaksinasi Covid-19 secara massal karena alasan tersebut.

Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut bukan merupakan informasi resmi yang disampaikan pihak berwenang, seperti WHO. Klaim yang menyebutkan vaksin Covid-19 dapat merusak genetika adalah tidak benar. Hal ini telah diklarifikasi oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melalui situs resminya covid19.go.id yang mengatakan bahwa modifikasi genetik hanya bisa terjadi jika memasukkan DNA asing ke dalam inti sel manusia, sedangkan vaksin Covid-19 sama sekali tidak melakukan itu.

Dilansir dari Cek Fakta medcom.id, terkait klaim yang menyebutkan Amerika Serikat membatalkan vaksinasi Covid-19 secara massal akibat vaksin dianggap tidak aman adalah hoaks. Pemerintah Amerika Serikat tidak mewajibkan vaksinasi universal dan Mahkamah Agung juga belum mempertimbangkan masalah ini.

6

[HOAKS] Lemon dan Tomat Sebabkan Hasil Tes Rapid Positif

Beredar di sosial media Facebook sebuah informasi mengenai sejumlah nama buah-buahan seperti tomat, blackberry dan lemon yang diklaim bisa menyebabkan hasil uji rapid test positif.

Dikutip dari kumparan.com, makanan dengan kandungan asam tinggi seperti buah-buahan jenis kiwi, anggur, jeruk, dan minuman manis bisa menghasilkan hasil positif. Hanya saja hal itu tidak akurat. Sebab, alat tersebut tidak dipergunakan untuk buah-buahan seperti itu.

7

[HOAKS] Kartu Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Buat KTP

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa informasi yang menyebutkan bahwa syarat membuat kartu tanda penduduk (KTP) kini memerlukan kartu vaksin Covid-19.

Dilansir dari kompas.com, klaim tersebut tidak benar. Faktanya hal ini disampaikan oleh kepada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia mengatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada persyaratan tambahan dalam pembuatan KTP elektronik di pelayanan Dukcapil. Ia juga menambahkan mengenai alur pembuatan KTP elektronik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, dia memastikan masih tetap sama seperti sebelumnya.

8 [HOAKS] Mulai 21 Juli 2021 Warga Jember Lepas Masker

Beredar sebuah flyer berisi pengumuman “mulai tanggal 21 Juli 2021, Warga Jember Lepas Masker”. Flyer tersebut diklaim dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur serta memuat foto Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Faktanya, informasi pada flyer tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan informasi resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember. Pada media sosial milik Pemerintah Kabupaten Jember diklarifikasi bahwa flyer tersebut adalah hoaks. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Habib Salim menghimbau masyarakat Jember untuk berhenti menyebarkan flyer atau infografis tersebut.

9 [HOAKS] Cara Mengecek Gelombang Bluetooth Bagi yang Sudah Vaksin

Beredar informasi di media sosial dan aplikasi percakapan yang menyebut penerima Vaksin Covid-19 bisa dideteksi via bluetooth. Hal itu bisa terjadi karena vaksin yang disuntikkan mengandung microchip atau magnet. Pada narasinya juga terdapat petunjuk untuk mengecek gelombang bluetooth bagi orang yang sudah divaksin Covid-19.

Faktanya, dilansir dari covid19.go.id yang mengutip dari lembaga pengecekan fakta fullfact.org, klaim tersebut tidaklah benar alias hoaks. Tubuh yang sudah divaksin tidak mungkin dapat terkoneksi ke bluetooth karena vaksin terdiri dari sejumlah bahan kimia yang tidak bisa mentransmisikan gelombang radio dari jarak pendek. Saat fullfact.org melakukan penelusuran untuk mengetahui AC dan EC berasal, ditemukan bahwa kode “EC”, yang diklaim sebagai vaksin sebenarnya adalah produk dari perusahaan Logitech yang membuat aksesoris nirkabel, dan kode “AC” adalah produk yang dibuat oleh perusahaan bernama Chongqing Fegui Electronics, yakni produsen sejumlah perangkat elektronik, seperti pemutar video, laptop, dan printer. Kode bluetooth yang tersambung pada perangkat elektronik orang di dalam video tersebut dimungkinkan berasal dari perangkat elektronik lainnya, entah itu laptop, komputer, atau smartphone yang ada di dekatnya.

10

[HOAKS] Tidak Ada Nakes yang Tertular Covid-19

Beredar unggahan di media sosial Twitter berupa narasi yang menyebut tidak ada Tenaga Kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 selama pandemi terjadi. Selain itu, disebutkan juga bahwa yang menjadi korban virus corona hanya masyarakat kecil dan kematian akibat Covid-19 hanya ada di rumah sakit.

Dilansir dari merdeka.com, klaim pada unggahan tersebut adalah hoaks. Adapun menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr M Adib Khumaidi SpOT ada ratusan nakes tertular Covid-19 bahkan sebagian dari mereka ada yang meninggal dunia karena virus tersebut. Selanjutnya, klaim yang menyebut kematian akibat Covid-19 hanya di rumah sakit adalah hoaks. Faktanya, terdapat ratusan pasien Covid-19 meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri di rumah, diduga akibat tidak adanya pendampingan dari nakes.

SEMUA WAJIB PAKAI MASKER

Jangan pernah lepas
saat bertemu orang lain.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id